

Laporan Penelitian

**KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM :**

**Studi Tentang Upaya Fakultas Tarbiyah UIN-SU
Dalam Implementasi Undang-Undang RI Nomor 14
Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen**

Peneliti :

**Dr. Al-Rasyidin, M.Ag
(Dosen Fakultas Tarbiyah UIN SU)**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

Laporan Penelitian

KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN

AGAMA ISLAM :

**Studi Tentang Upaya Fakultas Tarbiyah UIN-SU
Dalam Implementasi Undang-Undang RI Nomor 14
Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen**

Peneliti :

Dr. Al-Rasyidin, M. Ag

(Dosen Fakultas Tarbiyah UIN SU)



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN

PADA MASYARAKAT (LP2M)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2016

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, penulis ucapkan karena penelitian ini telah rampung peneliti lakukan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya. Amin.

Penelitian ini tentu banyak menemukan hambatan dan halangan dalam penelusuran berbagai sumber buku bacaan yang dianggap sebagai buku premier, namun karena keseriusan yang sangat dalam dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat relative panjang dari waktu yang telah ditentukan.

Semoga penelitian yang sangat sederhana ini mengenai **“Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam”**.

Dan semoga penelitian ini bermanfaat, bagi para peneliti yang lain yang tertarik dengan judul penelitian ini.

Akhirnya, terlepas dari kekurangan dan kelebihan penelitian ini, penulis harapkan semoga penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca dan penulis sendiri.

Medan, 01 November 2016

Dr. Al-Rasyidin, M.Ag

DAFTAR ISI

	Hlm.
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Kompetensi Guru	10
B. Kompetensi Guru dalam Perspektif Undang-Undang kependidikan	13
C. Kompetensi Calon Guru Pendidikan Agama Islam	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Disain Penelitian	29
B. Subjek Penelitian	30
C. Sumber Data Penelitian	30
D. Strategi Pengumpul Data	32
E. Teknik Analisis Data	33
F. Validitas dan Objektivitas Data	38
BAB IV TEMUAN UMUM PENELITIAN	
A. Visi, Missi, dan Tujuan Jurusan Pendidikan Agama Islam	40
B. Kurikulum Pendidikan Jurusan PAI ..	42
C. Dosen dan Mahasiswa	47
D. Sistem Pembelajaran	49

BAB V

PROSES PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI CALON GURU PAI

A. Pengembangan Kompetensi Pedagogik	56
B. Pengembangan Kompetensi Kepribadian	73
C. Pengembangan Kompetensi Sosial ...	79
D. Pengembangan Kompetensi Profesional	84
E. Diskusi Hasil Penelitian	88

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA	105
----------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Masalah

Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik.¹ Sedangkan secara khusus, pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.²

Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi keguruan. Dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya.³

¹ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: PT Almaarif:1989), hlm. 37.

² Lihat Bab XI Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 20.

³ Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Jakarta: CV. Eka Jaya, 2006), hlm. 5.

Secara teoritik, persyaratan kompetensi guru dimaksudkan untuk menjamin ketercapaian tujuan pendidikan yang berkualitas. Melalui para guru yang kompeten dalam melaksanakan tugas profesionalnya diharapkan lahir *output* pendidikan nasional yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴

Upaya untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Sebab, dalam tataran praktis, salah satu masalah krusial yang dihadapi pendidikan nasional justru masih banyaknya guru yang kurang layak mengajar.⁵ Menurut laporan World Bank, *many teachers are poorly trained*.⁶ Kemudian survei pendidikan yang dilakukan Diknas pada tahun 2004 menunjukkan bahwa belum semua pendidik memiliki kualifikasi pendidikan seperti yang dipersyaratkan.⁷ Dilihat dari tingkat pendidikannya, sebahagian besar guru SD, sekitar

⁴ Lihat Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, *op. cit.*, hlm. 5.

⁵ Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005)

⁶ lihat World Bank, *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery* (East Asia and Pacific Regional Office: Education Sector Unit, 1998)

⁷ *Ibid.*, hlm 20.

separo guru SLTP, dan sekitar 20% guru SLTA masih berpendidikan kurang dari yang dituntut. Persoalan yang sama, bahkan dengan kondisi yang lebih parah, terjadi di lingkungan Departemen Agama. Sebanyak 60% guru madrasah (MI, MTs, dan MA) tidak memiliki kualifikasi yang memadai sebagai guru; sebanyak 20% guru "salah kamar", yaitu mengajar di luar bidang keahliannya, dan dari seluruh guru hanya 20% yang layak dari segi kualifikasi pendidikannya.⁸

Persoalan tersebut sudah tentu berdampak negatif terhadap upaya mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Untuk itu, tampaknya upaya pengembangan kompetensi guru yang bertumpu pada pendidikan akademik merupakan sebuah keniscayaan. Sebab -- secara teoritik -- semakin baik pendidikan akademik yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam membina dan mengembangkan kompetensi guru, maka akan semakin besar peluang pendidikan bagi meningkatkan mutu atau kualitasnya.

Pada sisi lain, keniscayaan pengembangan kompetensi guru yang bertumpu pada pendidikan

⁸ Lihat Dedi Supriadi dan Fasli Jalal, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), hlm. 262.

akademik juga dilatari oleh kenyataan bahwa kompetensi bukanlah 'barang yang sudah jadi', melainkan seperangkat kemampuan yang hanya akan diperoleh seorang guru melalui proses pembelajaran. Dalam konteks ini, maka eksistensi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) menempati posisi strategis dan semakin penting. Sebab, secara formal, Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 secara tegas menyatakan bahwa LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru, menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan, serta mensertifikasi guru.⁹

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dilatari oleh kenyataan bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tugas, fungsi, peran, dan tanggung jawab guru. Namun disadari bahwa untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan guru-guru yang berkualitas. Karenanya, sekali lagi, eksistensi LPTK menempati posisi strategis dan semakin penting. Sebab, secara institusional, LPTK

⁹ *Ibid.* hlm. 6 dan 9.

merupakan lembaga pencetak dan penghasil guru, sekaligus tempat dimana para calon guru melatih dan mengembangkan kompetensinya, baik dalam aspek paedagogik, kepribadian, sosial, maupun profesionalitas yang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya.

Fakultas Tarbiyah IAIN SU adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Islam (LPTKI) yang bertugas melakukan pengkajian, pengembangan, dan penerapan ilmu-ilmu keislaman dalam bidang pendidikan Islam dan keguruan dengan tujuan untuk membentuk sarjana pendidik Muslim yang berkhlak mulia, menguasai pengetahuan keagamaan Islam serta cabang-cabang pengetahuan dalam bidang pendidikan dan keguruan.¹⁰ Tidak berbeda dengan LPTK pada umumnya, sebagai LPTKI, Fakultas Tarbiyah IAIN SU bertanggung jawab dalam menyiapkan calon guru agama Islam yang profesional, yakni yang memiliki kompetensi kependidikan atau keguruan.

Namun kondisi objektif memperlihatkan bahwa masih banyak guru-guru pendidikan agama Islam yang kualitasnya jauh dari yang diharapkan. Menurut Furqan, mutu kebanyakan lulusan PTAI masih belum dapat

¹⁰ IAIN-SU, *Buku Panduan Akademik IAIN Sumatera Utara Tahun Akademik 2004/2005* (Medan: IAIN SU, 2004), hlm. 50.

memenuhi harapan masyarakat, mulai dari kompetensi yang paling dasar sampai profesionalitas dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan jurusannya, seperti menjadi guru agama Islam.¹¹

Mencermati hal tersebut, sebagai LPTKI, Fakultas Tarbiyah IAIN SU seyogyanya senantiasa berupaya meningkatkan mutu atau kualitas lulusannya. Upaya tersebut, disamping merupakan respon positif terhadap kenyataan masih kurang kompetennya guru-guru PAI, juga idealnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya implementasi Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam konteks itu, adalah suatu hal yang urgen untuk menstudi secara kritis dan mendalam upaya-upaya yang dilakukan Fakultas Tarbiyah IAIN SU dalam mengembangkan kompetensi mahasiswa calon guru PAI sesuai dengan tuntutan kompetensi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar masalah di atas, maka secara umum rumusan masalah penelitian ini adalah *upaya apa yang*

¹¹ Arief Furqan, *Memetakan Persoalan Perguruan Tinggi Agama Islam: Visi, Misi, dan Program Ditpertaits Departemen Agama RI* (Jakarta: Ditpertaits Ditjenbinbagais Departemen Agama RI, 2004), hlm. 14-15.

dilakukan Fakultas Tarbiyah IAIN SU dalam mengembangkan kompetensi calon guru PAI dalam rangka implementasi Undang-Undang RI nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen? Secara khusus, rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Upaya apa yang dilakukan Fakultas Tarbiyah IAIN SU dalam mengembangkan kompetensi pedagogik mahasiswa calon guru PAI?
2. Upaya apa yang dilakukan Fakultas Tarbiyah IAIN SU dalam mengembangkan kompetensi kepribadian mahasiswa calon guru PAI?
3. Upaya apa yang dilakukan Fakultas Tarbiyah IAIN SU dalam mengembangkan kompetensi sosial mahasiswa calon guru PAI?
4. Upaya apa yang dilakukan Fakultas Tarbiyah IAIN SU dalam mengembangkan kompetensi profesional mahasiswa calon guru PAI?

Seluruh pertanyaan di atas akan berkaitan dengan program pengembangan kurikulum, pengembangan kualitas proses pembelajaran, pengembangan kualitas praktik pengalaman lapangan, dan pengembangan sistem evaluasi pembelajaran.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap, mendalam, dan komprehensif tentang upaya-upaya Fakultas Tarbiyah IAIN SU dalam mengembangkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional mahasiswa calon guru PAI dalam rangka implementasi Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005. Penelitian ini berupaya menggali dan menganalisis secara kritis seluruh upaya tersebut untuk menemukan praktik pengembangan kompetensi mahasiswa calon guru PAI yang dilakukan Fakultas Tarbiyah IAIN SU dalam rangka menyahuti implementasi Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi merumuskan konsep-konsep teoritis berkaitan dengan upaya pengembangan kompetensi guru PAI. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan, perbandingan, dan pertimbangan bagi: (a) para pengambil kebijakan pembinaan guru-guru PAI, baik di tingkat pusat maupun daerah, (b) Fakultas Tarbiyah IAIN/STAIN dalam melaksanakan pembe-

lajaran bagi mahasiswa calon guru PAI yang kompeten dalam rangka merespon secara positif implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan (3) para guru dan mahasiswa calon guru PAI dalam mempersiapkan, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi diri sebagai tenaga pendidik profesional.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kompetensi Guru

Secara literal, kompetensi bermakna kecakapan dan kemampuan¹, yakni kecakapan atau kemampuan dalam melakukan sesuatu.² Sedangkan secara terminologi, kompetensi dapat diartikan sebagai gambaran penampilan dari suatu kemampuan tertentu secara utuh yang merupakan perpaduan dari pengetahuan dan kemampuan yang dapat diamati dan diukur.³

Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional⁴ memaknai kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dari satu sisi, pengertian ini menegaskan bahwa kompetensi merupakan suatu kemampuan yang berbasis ilmu

pengetahuan, ketarampilan dan nilai-nilai. Sedangkan dari sisi lain, pengertian di atas juga menegaskan bahwa suatu wujud nyata kompetensi seseorang itu diperlihatkan dari kebiasaannya dalam berpikir dan bertindak yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai. Karena itu, kompetensi tersebut hanya dimungkinkan diraih seorang guru manakala ia dilatih dan dibiasakan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus dalam melakukan sesuatu, baik dalam artian mencari dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap atau nilai-nilai.

Berdasar kutipan di atas, bila dikaitkan dengan profesi guru, maka kompetensi merupakan kemampuan seorang guru dalam melakukan sesuatu, dimana kemampuan itu sebenarnya merupakan kesatuan atau gabungan integral dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai-nilai yang dimilikinya.⁵ Totalitas kompetensi dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai-nilai tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat ditampilkan, yang aktualisasinya dapat

¹ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 132.

² A. S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. edisi keempat (Oxford: Oxford University Press, 1994), hlm. 235.

³ Lihat <http://www.dikmenum.depdiknas.go.id/silabus/php>

⁴ Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2002).

⁵ Bdk. Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional, *Standar Kompetensi Guru Pemula Sekolah Lanjutan Pertama/ Sekolah Lanjutan Atas* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, 2004:8-9).

dilihat dari sejumlah indikator. Berdasar indikator inilah kemudian dikembangkan alat penilaian untuk mengevaluasi dan menentukan apakah seorang guru kompeten di bidangnya atau tidak.

Secara umum, kompetensi guru itu bisa dibedakan kepada tiga kawasan utama, yaitu: (1) kompetensi personal atau pribadi, (2) kompetensi profesional, dan (3) kompetensi sosial atau kemasyarakatan. Menurut Usman, kompetensi pribadi seorang guru meliputi: (a) kemampuan mengembangkan kepribadian, (b) kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi, dan (c) kemampuan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Kemudian kompetensi profesional seorang guru mencakup empat kemampuan pokok, yaitu: (a) penguasaan terhadap landasan kependidikan, (b) mengetahui fungsi sekolah di masyarakat, (c) mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan, (d) menguasai bahan pengajaran, baik materi pokok dalam kurikulum maupun bahan pengayaan, (e) kemampuan menyusun program pengajaran, dan (f) kemampuan menyusun perangkat penilaian hasil dan proses pembelajaran.⁶

⁶ M. U. Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

Di luar kedua kompetensi di atas, seorang guru atau pendidik juga dipersyaratkan memiliki kompetensi sosial kemasyarakatan. Kompetensi ini berkaitan dengan kecakapan seorang guru dalam mengambil dan melaksanakan peran, fungsi, dan tugasnya sebagai makhluk sosial dan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu komunitas atau masyarakat. Secara umum, kompetensi sosial kemasyarakatan ini mencakup tiga kemampuan dasar, yaitu: (a) kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan kolega atau teman sejawat, (b) kemampuan mengidentifikasi dan memahami fungsi institusi-institusi kemasyarakatan, dan (c) kemampuan menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dan harmonis, baik dengan masyarakat maupun institusi yang terkait dengan pendidikan secara luas.

B. Kompetensi Guru dalam Perspektif Undang-Undang Kependidikan

Dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa guru atau pendidik adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan,

serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada jenjang perguruan tinggi.⁷

Kemudian dalam pasal 40 ayat 2 dinyatakan bahwa pendidik berkewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.⁸

Baik dari sudut definisi maupun kewajiban - sebagaimana dikemukakan di atas - keduanya mensyaratkan sejumlah kriteria khusus yang harus dimiliki seorang guru. Bila dicermati, dari sudut definisi, seorang guru adalah pekerja profesional yang diharuskan memiliki setidaknya lima kompetensi, yaitu: (1) kompeten dalam merencanakan proses pembelajaran, (2) kompeten dalam melaksanakan proses pembelajaran, (3) kompeten dalam menilai hasil pembelajaran, (4) kompeten dalam melakukan pembimbingan, dan (5) kompeten dalam melakukan pelatihan. Di luar lima

⁷ Lihat Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 20.

⁸ Ibid., hlm. 21.

kompetensi tersebut, bagi pendidik atau dosen perguruan tinggi dipersyaratkan pula memiliki kompetensi dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sedangkan dari sudut pelaksanaan kewajibannya, seorang guru profesional diharuskan pula memiliki tiga kompetensi, yaitu: (1) kompeten dalam menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya

Secara lebih spesifik, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 mensyaratkan agar seluruh tenaga pendidik profesional atau guru wajib memiliki kompetensi. Pada pasal 8 dan 10 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik atau guru tersebut, tidak terkecuali guru PAI, mencakup empat hal, yaitu: (1)

kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional.⁹

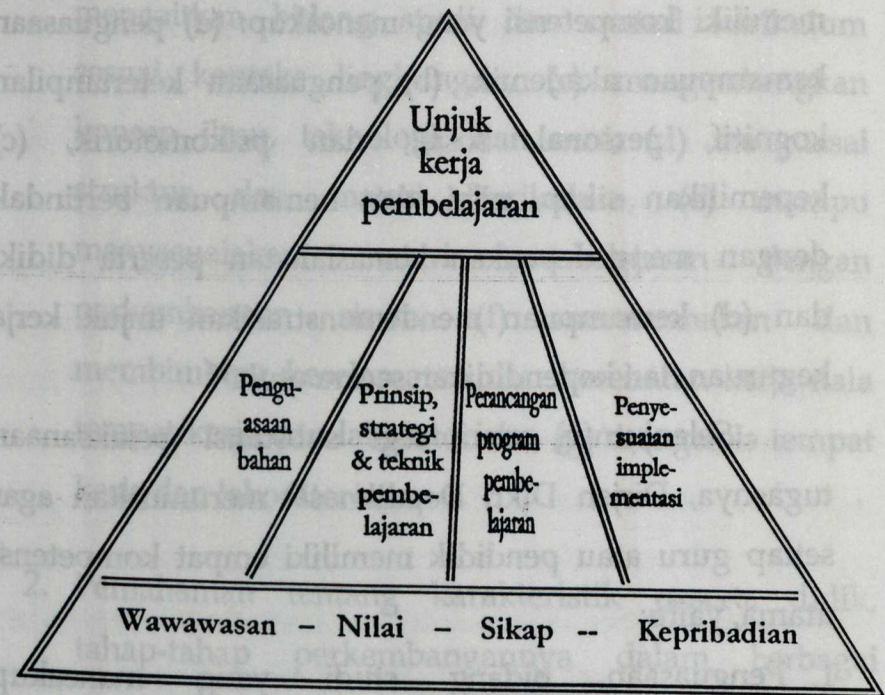
Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Sedangkan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Kemudian kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Akhirnya, yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.¹⁰

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional merumuskan sosok utuh kompetensi seorang guru berdasarkan kinerja yang teramati (*observable performance*). Kinerja tersebut harus didukung oleh penguasaan bahan atau bidang studi yang diajarkan guru, penguasaan prinsip, strategi, dan teknik pembelajaran yang mendidik, kemampuan guru

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 22.

¹⁰ Lihat *op. cit.*, hlm 77-78.

dalam perancangan program pembelajaran, dan kemampuan guru dalam penyesuaian implementasi atau keputusan transaksional. Kesemuanya itu didasarkan pada wawasan, nilai, sikap, dan kepribadian sebagai seorang pendidik.¹¹ Konsepsi ini dapat diilustrasikan melalui gambar berikut:



Gambar 1: Tampilan utuh kompetensi guru diadopsi dari Dirjen Dikti Depdiknas, 2003, hlm. 25.

¹¹ Lihat Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional, *Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI Program Pendidikan D-II PGSD* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketegaan Perguruan Tinggi, 2003), hlm. 24-25.

Setiap calon guru, idealnya memiliki standar kompetensi yang mencakup empat kawasan di atas yang dapat diamati dari kinerja atau performa yang ditampilkannya dalam melaksanakan seluruh tugas dan kewajibannya.

Unjuk kerja seorang guru harus didasarkan pada profesionalitas. Dari sisi ini, seorang guru dipersyaratkan memiliki kompetensi yang mencakup: (a) penguasaan kemampuan akademik, (b) penguasaan keterampilan kognitif, personal, sosial, dan psikomotorik, (c) kepemilikan sikap, nilai, dan kemampuan bertindak dengan mengedepankan kemaslahatan peserta didik, dan (d) kemampuan mendemonstrasikan unjuk kerja keguruan dan kependidikan secara utuh.¹²

Selanjutnya, dari segi substansi pelaksanaan tugasnya, Dirjen Dikti Depdiknas¹³ merumuskan agar setiap guru atau pendidik memiliki empat kompetensi utama, yaitu:

1. Penguasaan bidang studi yang mencakup penguasaan disiplin ilmu dan kurikuler. Penguasaan disiplin ilmu menyangkut substansi dan metodologi

¹² Lihat *ibid.*, hlm 26.

¹³ Lihat *ibid.*, hlm. 29-31 dan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional, *Standar Kompetensi Guru Pemula Sekolah Lanjutan Pertama/ Sekolah Menengah Atas* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Keteagaan Perguruan Tinggi, 2004), hlm. 11-13.

dasar keilmuan yang diajarkan. Sedangkan penguasaan kurikuler berhubungan dengan pemilihan, penataan, pengemasan, dan representasi materi bidang studi sesuai kebutuhan peserta didik. Dalam konteks penguasaan bidang studi ini, butir-butir kompetensi yang harus dimiliki guru adalah: (a) menguasai substansi bidang studi, (b) mampu mengaitkan bidang studi dan materi kurikulum sesuai konteks lingkungan, (c) mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan seni, (d) menguasai struktur dan materi kurikulum, (e) mampu menyesuaikan materi pembelajaran dengan perkembangan siswa, (f) merencanakan dan membimbing keselamatan dan kesehatan kerja dalam tempat kerja dan laboratorium, (g) mengelola tempat kerja dan laboratorium.

2. Pemahaman tentang karakteristik peserta didik, tahap-tahap perkembangannya dalam berbagai aspek, dan penerapannya dalam mengoptimalkan perkembangan dan pembelajaran peserta didik. Tujuan pemahaman aspek ini berkaitan dengan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Karenanya, guru wajib

memahami: (a) peserta didik sebagai pribadi yang unik, (b) lingkungan keluarga dan sosial budaya masyarakat dimana peserta didik tumbuh dan berkembang, dan (c) pemahaman terhadap kemajemukan masyarakat Indonesia dan dunia. Butir-butir kompetensi yang harus dimiliki guru mencakup: (a) mampu mengidentifikasi potensi peserta didik, (b) menguasai karakteristik potensi peserta didik, (c) memiliki komitmen terhadap hak dan kewajiban peserta didik, (d) mengena dan memanfaatkan lingkungan peserta didik, (e) menguasai cara dan gaya belajar peserta didik, (f) bersikap dan berperilaku empati terhadap peserta didik, dan (g) membimbing perkembangan karir peserta didik.

3. Penguasaan pembelajaran yang mendidik, yaitu pemahaman terhadap konsep dasar serta proses pendidikan dan pembelajaran, pemahaman terhadap konsep dasar dan proses pembelajaran bidang studi yang bersangkutan, serta penerapannya dalam pelaksanaan dan pengembangan proses pembelajaran yang mendidik. Butir-butir kompetensi yang harus dimiliki guru mencakup: (a) merencanakan dan merancang pembelajaran yang mendidik, (b)

menguasai pendekatan, metode, dan media pembelajaran, (c) melaksanakan pembelajaran yang mendidik, (d) mengenal prinsip dan prosedur asesmen proses dan hasil belajar peserta didik, (e) merencanakan dan melaksanakan asesmen proses dan hasil belajar peserta didik, (f) memanfaatkan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran, dan (g) merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran.

4. Pengembangan kepribadian dan keprofesionalan melalui pengembangan intuisi keagamaan dan kebangsaan yang relegius dan berkepribadian, pemilikan sikap dan kemampuan aktualisasi diri, serta pemilikan sikap dan kemampuan mengembangkan profesionalisme kependidikan. Butir-butir kompetensi yang harus dimiliki guru mencakup: (a) mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, (b) mampu menilai kinerjanya sendiri, (c) mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dengan orang lain, (d) mampu mencari sumber-sumber baru dalam bidang studinya, (e) memiliki komitmen terhadap profesi dan tugas profesional, (f) mampu berkomunikasi dengan eman sejawat dan

peserta didik, dan (g) mampu meningkatkan diri dalam kinerja profesinya.

Seluruh kompetensi di atas dipersyaratkan harus diperoleh seorang guru melalui pendidikan profesi, yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, termasuk Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Islam (LPTKI), yang disertai tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru, menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu pendidikan dan non kependidikan, dan program sertifikasi guru. Selain itu, untuk meraih kompetensi tersebut, setiap guru juga bisa mengikuti berbagai program pendidikan dalam jabatan atau *inservice training* dan program-program pendidikan atau pelatihan keguruan lainnya.

C. Kompetensi Calon Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

Secara khusus, calon guru PAI adalah sosok yang diharapkan mampu melaksanakan tugas profesinya, baik dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, merevisi, dan memberikan *feedback* dalam pembelajaran PAI, baik pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, maupun Aliyah. Selain tugas-tugas

tersebut, calon guru PAI juga diharapkan mampu melakukan pembimbingan dan pelatihan, membantu pengelolaan dan pengembangan program madrasah, melakukan penelitian di bidang PAI, dan mengembangkan profesionalitasnya sebagai guru PAI. Untuk itu, dalam proses pendidikannya di LPTKI, setiap mahasiswa calon guru PAI dibekali dengan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai serta sikap yang seharusnya dimiliki setiap guru PAI. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk membentuk calon guru PAI yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai guru atau pendidik.

Dalam perspektif Islam, tugas guru ialah mendidik. Mendidik itu sebahagian dilakukan dalam bentuk mengajar, memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberi contoh, membiasakan, dan lain-lain.¹⁴ Karenanya, tugas guru sangat luas. Untuk itu, guru harus memiliki kompetensi, baik kompetensi ilmu pengetahuan keislaman, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial-kemasyarakatan.

Dalam hal ilmu pengetahuan keislaman, kompetensi seorang guru PAI setidaknya meliputi: (a)

¹⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 78.

memiliki ilmu pengetahuan keislaman yang luas dan 'mumpuni', terutama berkaitan dengan ilmu atau bidang studi yang diajarkannya, (b) memahami kedudukan dan hubungan fungsional antara suatu ilmu atau bidang studi yang diajarkannya dengan ilmu-ilmu atau bidang studi lainnya, (c) mengamalkan seluruh ilmu pengetahuan yang diketahui atau diajarkannya, (d) memiliki kemauan dan kemampuan dalam mengembangkan secara kontiniu ilmu pengetahuan keislaman yang menjadi spesialisasinya.

Kemudian dalam hal kepribadian, kompetensi seorang guru PAI harus memiliki kompetensi spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Dari dimensi spiritual, seorang guru PAI haruslah seorang yang: (a) beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, (b) taat beribadah kepada Allah SWT, (c) mengetahui dasar-dasar pelaksanaan ibadah dan mampu mempraktikkan ibadah yang benar, (d) bersikap *zuhud*, *wara'*, *tawadlu'*, dan *ikhlas* dan (e) senantiasa berupaya mensucikan jiwanya dari sifat-sifat tidak terpuji. Dari dimensi moral, seorang guru PAI harus: (a) mampu membedakan yang *haq* dan *bathil* atau antara yang baik dan buruk, (b) mampu menyesuaikan perkataan dengan perbuatan, (c) tidak *riya* dan sombong, (d) jujur, (e) pemaaf, (f)

bertanggung jawab, (g) disiplin, (h) mampu mengendalikan diri, (i) mampu menerima kritik dan saran, (j) mampu mengakui kesalahan dan meminta maaf, (k) mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta didik, sesama guru, dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan norma agama serta moral, (l) respek terhadap nilai, norma, dan tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan (m) penuh komitmen dan dedikasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dari dimensi intelektual, seorang guru PAI setidaknya harus kompeten dalam: (a) mengembangkan penalaran dan kecerdasannya, (b) bersikap kritis, analitis, dan inovatif, dan (c) suka dan gemar membaca, berdiskusi, dan meneliti. Dari dimensi profesional, seorang guru PAI harus kompeten dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi tugas dan tanggung jawab profesionalnya yang meliputi pengajar, pembimbing, pelatih, penilai, pemimpin lembaga, kelas, peserta didik, dan masyarakat, motivator, dinamisor, klarifikator, supervisor, dan inovator.

Secara umum, dalam konteksnya dengan lembaga pendidikan Islam formal, kompetensi yang harus dimiliki guru PAI pada dasarnya tidak berbeda dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki guru pada

umumnya. Artinya, sama halnya dengan guru pada umumnya, guru PAI juga harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sebagaimana dimaksud Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal-hal yang membedakan kompetensi guru PAI dengan guru pada umumnya adalah penekanan yang lebih kuat pada *basic* dan penguasaan pengetahuan tentang agama Islam, sikap dan nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian Muslim, serta keterampilan dalam mendidihkan Pendidikan Agama Islam kepada peserta didik. Artinya, selain kompeten di bidang pengetahuan tentang agama Islam, setiap guru PAI dituntut agar beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, ikhlas dalam melaksanakan tugasnya, berakhlak mulia dalam perilaku kesehariannya, dan mampu menjadi teladan kebaikan bagi seluruh peserta didik dan masyarakatnya.¹⁵ Kompetensi keberagamaan ini merupakan nilai tambah (*value added*) dan sekaligus yang mencirikan guru PAI bila dibanding dengan guru pada umumnya.

Sebagaimana dinyatakan dalam standar kompetensi guru SD dan Madrasah Ibtidaiyah, guru PAI

¹⁵ Bdk. Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hlm. 37-45.

juga harus memiliki wawasan, nilai, sikap, dan kepribadian sebagai pendidik.¹⁶ Wawasan, nilai, sikap, dan kepribadian tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam dan berdasarkan nilai-nilai tersebut seorang guru PAI mengaplikasikan pengetahuan dan mendemonstrasikan keterampilan dalam mendidik, membimbing, melatih, dan mengajar.

Secara khusus, dalam konteks pembelajaran PAI di madrasah atau sekolah, setiap guru PAI dipersyaratkan harus memiliki kompetensi sikap dan perilaku serta keterampilan dalam *manage* pembelajaran. Dalam konteksnya dengan sikap dan perilaku, seorang guru PAI dipersyaratkan memiliki kompetensi: (a) beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, (b) berakhlak mulia, (c) memiliki sikap keberagamaan yang inklusif dan toleran, (d) memiliki sikap dan kepribadian Muslim, (e) memiliki wawasan dan sikap ilmiah yang sesuai dengan ajaran Islam, dan (f) memiliki wawasan kebangsaan Indonesia. Sedangkan dalam konteks keterampilan pembelajaran, seorang guru PAI dipersyaratkan memiliki kompetensi dalam: (a) mendesain program pembelajaran PAI dengan menggunakan pendekatan, metode, dan teknik

¹⁶ Lihat *op. cit.*, hlm. 24-25.

pembelajaran yang mutakhir, (b) melaksanakan program pembelajaran PAI dengan menggunakan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang mutakhir, (c) merancang dan melaksanakan evaluasi hasil dan proses untuk menilai pembelajaran PAI, (d) mengidentifikasi berbagai problematika yang muncul dalam proses pembelajaran dan berupaya mengajukan solusi atau jalan keluar, (e) melakukan penelitian untuk menguji coba dan memverifikasi pendekatan, metode, dan teknik baru di bidang PAI, (f) menulis artikel ilmiah, baik berdasarkan penelitian ataupun tidak, di bidang PAI, (g) memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik dalam kaitannya dengan pembelajaran dan problematika PAI.¹⁷

¹⁷ Bdk. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Kegiatan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan Tahun 2003* (Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan, 2003), hlm. 12.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Disain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang menggunakan disain *mode of inquiry qualitative* yang menggunakan teknik berhadapan langsung dalam pengumpulan data dengan informan atau subjek penelitian di dalam latar alamiah mereka.¹ Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mestudi dan memahami secara mendalam dan komprehensif seluruh upaya yang dilakukan Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa calon guru PAI dalam rangka implementasi Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen. Upaya tersebut peneliti lakukan dengan cara membangun suatu gambaran kompleks dan holistik melalui deskripsi-deskripsi rinci tentang fenomena dan berbagai perspektif informan atau partisipan penelitian. Peneliti berusaha menggambarkan konteks penelitian secara interaktif, memaparkan berbagai perspektif informan mengenai masalah yang diteliti, dan secara kontiniu menggali,

¹ James H. McMillan dan Sally Schumacher, *Research in Education: A Conceptual Introduction* (New York: Longman, 2001), hlm. 35.

mencari, dan menganalisis data mengenai masalah yang diteliti dari pengalaman selama berada di lapangan.

B. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Tarbiyah, tepatnya pada jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), IAIN Sumatera Utara. Subjek penelitian ini adalah seluruh informan yang terlibat langsung pada peristiwa dan maslaah yang diteliti, yaitu: (a) Dekan Fakultas Tarbiyah, (b) Pembantu Dekan I bidang akademik, (c) ketua jurusan PAI, (d) Sekretaris Jurusan PAI, (e) Kepala Laboratorium Jurusan PAI, dan (f) dosen jurusan PAI.

C. Sumber Data Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu: (1) dokumen atau kepustakaan, dan (2) data lapangan. Sumber data dokumen atau kepustakaan adalah buku atau literatur yang berkaitan dengan konsep dan teori-teori tentang kompetensi guru, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Sedangkan sumber data lapangan adalah data-data yang diperoleh dari observasi mendalam berkenaan dengan masalah yang diteliti dan

indefth interview yang dilakukan terhadap pimpinan Fakultas Tarbiyah IAIN SU, yaitu Dekan, Pembantu Dekan I, dan ketua, sekrterais, dan kepala laboratorium jurusan PAI.

Sebagaimana layaknya dalam semua penelitian kualitatif, pada prinsipnya *researcher is the primary instrument for data collection and analysis*², yaitu peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Namun dalam tataran praktis, observasi dan *indefth interview* digunakan sebagai instrumen pengumpul data. Observasi akan dilakukan untuk mengamati secara langsung upaya-upaya yang dilakukan Fakultas Tarbiyah IAIN SU dalam mengembangkan kompetensi mahasiswa calon guru. Sedangkan *indefth interview* dilakukan untuk menjaring data dari partisipan penelitian berkenaan dengan topik penelitian.

Selain berasal dari sumber data di atas, data penelitian ini juga diperoleh dari sejumlah dosen yang mengajar pada jurusan PAI dan menjadi pembimbing atau pamong praktikum mahasiswa.

² Lihat Sharan B. Merriam, *Case Study Research in Education: A Qualitative Approach* (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1988).

D. Strategi Pengumpul Data

Miles dan Huberman³ menyatakan bahwa pengumpulan dan analisa data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara sirkuler. Senada dengan itu, McMillan dan Shumacher⁴ juga menyatakan bahwa pengumpulan dan analisa data kualitatif berlangsung secara interaktif dan *overlapping*, karenanya tidak disebut sebagai prosedur tetapi strategi pengumpulan dan analisis data. Lebih lanjut, menurut McMillan dan Schumacher, dalam semua pengumpulan data kualitatif, fase-fase penelitian secara relatif sama, yaitu dimulai dari: (1) fase perencanaan, (2) fase permulaan mengumpul data, (3) fase mengumpulkan data dasar atau pokok, (4) fase mengakhiri pengumpulan data, dan (5) fase melengkapi data.⁵

Dengan memodifikasi fase-fase di atas, maka strategi utama yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini dibagi kepada 3 fase, yaitu:

- (1) Pada fase perencanaan, strategi yang digunakan adalah studi dokumen atau telaah literatur. Strategi ini digunakan untuk memperoleh data yang

³ Lihat Mathew B. Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, edisi Indonesia terj. Thetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Perss, 1992).

⁴ *Op. cit.* hlm. 35.

⁵ Lihat *ibid.*, hlm. 405-407.

berkaitan dengan pemahaman teoritik tentang kompetensi calon guru PAI.

- (2) Pada fase pengumpulan data pokok, strategi pengumpul data yang digunakan adalah: (a) observasi berkenaan dengan upaya pengembangan kompetensi mahasiswa calon guru PAI yang dilakukan jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU, dan (b) wawancara mendalam dengan seluruh sumber data untuk menjaring data pokok yang berkenaan dengan topik penelitian.
- (3) pada fase melengkapi data, maka strategi pengumpul data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indefth interview*) dengan teknik semi terstruktur (*semi-structured interview*). Aktivitas ini dilakukan dengan dua tujuan utama, yaitu: (a) melengkapi data yang masih memerlukan informasi tambahan dari seluruh sumber data, dan (b) memverivikasi data yang masih memerlukan kejelasan untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran atau penarikan kesimpulan.

E. Tehnik Analisa Data

Dalam studi kualitatif, analisis data adalah sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk menyeleksi,

mengkategorikan, membandingkan, mensintesa, dan menginterpretasi data untuk membangun suatu gambaran komprehensif tentang fenomena atau topik yang sedang diteliti. Karena itu, sebagaimana dinyatakan Merriam⁶, analisis data merupakan proses memberi makna terhadap suatu data. Data diringkas atau dipadatkan dan dihubungkan satu sama lain ke dalam sebuah narasi sehingga dapat memberi makna kepada para pembaca. Proses itu, menurut Taylor dan Bogdan⁷ adalah "*to come up with reasonable conclusions and generalizations based on a preponderance of the data*", yaitu menarik sejumlah kesimpulan dan generalisasi yang rasional berdasarkan sekumpulan data yang telah diperoleh.

Menurut McMillan dan Schumacher⁸ proses analisa data kualitatif pada dasarnya berlangsung secara berulang (*cyclical*) dan terintegrasi ke dalam seluruh tahapan penelitian. Analisis data sudah dilakukan peneliti sejak penelitian berlangsung hingga masa akhir pengumpulan data. Karena itu, ketika menganalisis data

⁶ Sharan B. Merriam, *Case Study Research in Education: A Qualitative Approach* (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1988), hlm. 127.

⁷ S.J. Taylor dan R. Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods* (New York: Wiley, 1984), hlm. 139.

⁸ McMillan dan Schumacher, *op. cit.*, hlm 463.

penelitian ini, peneliti berulang-alik bergerak dari data deskriptif ke arah tingkat analisis yang lebih abstrak, kemudian kembali lagi pada tingkat abstraksi sebelumnya, memeriksa secara berulang analisis dan interpretasi yang telah dibuat, bernegosiasi kembali ke lapangan untuk memeriksa secara cermat data-data yang masih memerlukan tambahan informasi, dan demikian seterusnya.

Secara khusus, dalam konteksnya dengan penelitian ini, peneliti mengadaptasi analisa data kualitatif sebagaimana disarankan oleh McMillan dan Schumacher⁹, yaitu:

(1) *Inductive analysis*, yakni proses analisis data yang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah *cyclical* untuk mengembangkan topik, kategori, dan pola-pola data guna memunculkan sebuah sintesa deskriptif yang lebih abstrak.

Dalam proses mengembangkan topik, peneliti beranjak dari informasi atau data dasar yang bersumber dari literatur, pengamatan, dan wawancara mendalam untuk selanjutnya dibaca secara cermat dan diidentifikasi bagian-bagian tertentu yang bisa memunculkan suatu topik. Sebuah

⁹ *Ibid.*, hlm. 463.

topik merupakan kumpulan dari sejumlah potongan data yang bisa diikat dengan sebuah tema atau makna yang sama. Masing-masing topik tersebut ditulis dalam suatu kolom pada komputer (seperti sebuah indeks), kemudian diperiksa berulang kali untuk menghindari duplikasi dan adanya topik yang saling tumpang tindih.

Setelah proses di atas selesai, peneliti kemudian mengembangkan topik ke dalam sejumlah kategori. *Categorizing* adalah mempersatukan unit-unit yang kelihatannya memiliki *content* yang sama ke dalam satu kategori sementara.

Setelah kategorisasi selesai dilakukan, peneliti kemudian menganalisis hubungan antara kategori yang telah dibuat untuk memunculkan pola-pola data. Karena sebuah pola merupakan *a relationship among categories*¹⁰, maka proses pemolaan dilakukan dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi teoritis. Pola-pola pokok yang telah dibuat tersebut selanjutnya peneliti gunakan sebagai kerangka untuk melaporkan temuan dan menyusun laporan penelitian.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.476.

- (2) *Interim analysis*, yakni melakukan analisis yang sifatnya sementara selama pengumpulan data. Menurut McMillan dan Schumacher¹¹ hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat berbagai keputusan dalam pengumpulan data dan mengidentifikasi topik dan pola-pola yang muncul secara berulang. Dalam analisis ini, tehnik yang peneliti gunakan adalah mengadopsi strategi yang disarankan McMillan dan Schumacher, yaitu: (a) meninjau semua data yang telah dikumpulkan yang berkaitan dengan topik. Penekanan yang diberikan di sini bukanlah pada makna topik, tetapi pada upaya memperoleh sebuah perspektif global mengenai jajaran topik-topik data, (b) mencermati makna-makna yang berulang yang bisa dijadikan sebagai tema atau pola-pola utama. Tema-tema bisa didapatkan dari telaah dokumen atau literatur dan percakapan dalam latar sosial dengan kyai, kepala madrasah, *ustadz*, atau santri dan alumni pesantren. Untuk membuat tema, peneliti memberi komentar terhadap temuan dari studi dokumen dan literatur dan mengelaborasi hasil wawancara, dan (c) berfokus kembali pada topik studi untuk analisis

¹¹ *Ibid.*, hlm 466.

data tertentu. Karena kebanyakan data kualitatif bersifat terlalu luas, maka peneliti mempersempit fokus analisis data hanya pada topik yang diteliti.

F. Validitas dan Objektivitas Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas dimaknai sebagai tingkat di mana berbagai konsep dan interpretasi yang dibuat peneliti memiliki kesamaan makna dengan makna-makna yang dipahami subjek atau partisipan penelitian. Dalam konteksnya dengan penelitian ini, ada 4 (empat) strategi yang peneliti gunakan untuk menjamin validitas data penelitian, yaitu:

- (1) Berlama-lama atau memperpanjang waktu dalam mengumpulkan data di lapangan (*prolonged data collection*), hal ini dimaksudkan agar peneliti bisa mendapatkan sebanyak mungkin bukti-bukti yang menguatkan untuk menjamin kesesuaian antara berbagai temuan dengan keadaan yang sebenarnya.
- (2) Melakukan triangulasi dalam pengumpulan dan analisa data. Hal ini dilakukan untuk mengecek data, dengan menyilang informasi-informasi dari sumber data yang berbeda, seperti antara hasil wawancara dengan pengamatan atau sebaliknya

guna menjamin akurasi semua data yang telah dikumpulkan.

- (3) *Member checks*, yaitu membawa data dan interpretasi data tersebut kembali kepada partisipan dan menanyakan kepada mereka apakah data dan penafsiran terhadap data yang peneliti buat sudah benar atau sudah sesuai dengan makna sebagai mana dipahami partisipan.
- (4) Melengkapi semua data lapangan dengan tanggal, waktu, tempat, dan sumber dari mana data tersebut diperoleh.

BAB IV

TEMUAN UMUM PENELITIAN

A. Visi, Misi, dan Tujuan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI)

Secara kelembagaan, jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu program studi di lingkungan Fakultas Tarbiyah. Di IAIN-SU, pendirian program studi ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1973 tertanggal 01 Nopember 1973. Dalam buku *Borang Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN SU* dinyatakan bahwa visi prodi ini adalah menjadi jurusan yang terkemuka dalam bidang pengkajian, pengembangan, dan penerapan ilmu-ilmu pendidikan agama Islam dalam rangka menghasilkan sarjana muslim yang memiliki keahlian dalam melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara profesional pada tingkat nasional dan regional.¹

¹ Lihat Fakultas Tarbiyah, *Borang Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara* (Medan: Fak. Tarbiyah IAIN Su, 2006).

Selanjutnya dinyatakan bahwa misi prodi PAI adalah: (1) mempersiapkan Sarjana Pendidikan Islam yang handal, baik dalam kompetensi keilmuan, moral, dan sosial, (2) mempersiapkan Sarjana Pendidikan Islam yang menguasai metodologi pendidikan dan pengajaran agama Islam, (3) mempersiapkan Sarjana Pendidikan Islam yang memiliki keahlian untuk melaksanakan proses pembelajaran agama Islam di SD/MI, SLTP/MTs, dan SMU/MA sesuai kebutuhan masyarakat, dan (4) mempersiapkan Sarjana Pendidikan Islam yang memiliki kemampuan mengembangkan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD/MI, SLTP/MTs, dan SMU/MA sesuai kebutuhan masyarakat.²

Secara umum, prodi PAI bertujuan untuk membentuk Sarjana Pendidikan Islam yang berakhlak mulia, menguasai pengetahuan agama Islam serta cabang-cabang pengetahuan dalam bidang pendidikan Islam dan keagamaan.³ Secara lebih spesifik, tujuan prodi PAI adalah; (a) menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan profesional dalam bidang pendidikan

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

agama Islam, (b) menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan mengembangkan pendidikan agama Islam di masyarakat, (c) menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan memecahkan masalah-masalah pendidikan agama Islam di masyarakat, dan (d) menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan mendorong masyarakat menjadi masyarakat Islam yang terdidik.⁴ Rumusan tujuan ini berorientasi pada pencapaian tujuan institusional Fakultas Tarbiyah IAIN SU sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan Agama (LPTKA) yang bertujuan untuk membentuk Sarjana Muslim yang berakhlak mulia, menguasai pengetahuan keagamaan Islam dan cabang-cabang pengetahuan dalam bidang pendidikan Islam dan Keguruan.⁵

B. Kurikulum Pendidikan Jurusan PAI

Secara umum, perkuliahan pada jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara menggunakan Kurikulum Nasional IAIN tahun 1997. Kurikulum ini

⁴ IAIN Sumatera Utara, *Buku Panduan Akademik IAIN Sumatera Utara* (Medan: IAIN Sumatera Utara, 2006), hlm. 74-75.

⁵ Lihat *ibid.*, hlm. 73; Tim Penyusun Buku Profil IAIN SU, *Profil IAIN Sumatera Utara 2005* (Medan: IAIN Sumatera Utara, 2005), hlm. 6.

merupakan modifikasi dan peyempurnaan dari Kurikulum Nasional IAIN tahun 1995 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Dalam implementasinya pada jurusan PAI, sejak tahun 1997, sebaran matakuliah kurikulum tersebut dibagi kepada tiga komponen utama, yakni komponen institut (INS), komponen fakultas (TAR), dan komponen program studi atau jurusan (PAI). Namun sejak tahun akademi 2003/2004, sebaran mata kuliah prodi PAI hanya dikelompokkan ke dalam dua komponen, yaitu komponen institut (INS) dan komponen program studi atau jurusan (PAI).⁶

Secara teoritik, seluruh matakuliah yang diajarkan pada jurusan PAI dimaksudkan untuk memberikan kompetensi dasar dan kompetensi keguruan lainnya kepada seluruh mahasiswa agar mereka nantinya bisa memenuhi kualifikasi akademik sebagai sarjana PAI, yakni sarjana pendidikan Islam yang ahli dalam

⁶ Dalam buku Borang Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Tahun 2006, mata kuliah komponen institut diberi kode MKU dan komponen prodi diberi kode PAI. Lihat *op. cit.*, hlm. 4-5.

pengetahuan keagamaan Islam dan menguasai metodologi dan pengajaran agama Islam.

Seluruh matakuliah Kurikulum Nasional IAIN tahun 1997 tersebut didistribusikan ke dalam 8 (delapan) semester, sesuai masa perkuliahan untuk jenjang Strata 1, dan keseluruhannya berbobot 150 SKS. Untuk tiap semester, beban studi yang ditawarkan kepada mahasiswa rata-rata sebesar 20 SKS. Secara rinci, distribusi matakuliah pada jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU berdasar semester, komponen, dan beban SKS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Distribusi Matakuliah Jurusan PAI Berdasar Semester, Komponen dan Beban SKS

SEMESTER I				SEMESTER II			
Kode	Matakuliah	K		Kode	Matakuliah	K	
INS 001	Ilmu Tauhid	2		INS 009	Ushul Fiqh	2	
INS 002	Akhlaq Tasauf	2		INS 010	Fiqh	2	
INS 003	Ulumul Qur'an	2		INS 011	Tafsir I	2	
INS 004	Ulumul Hadits	2		INS 012	Hadits I	2	
INS 005	Pancasila	2		INS 013	Bahasa Arab II	2	
INS 006	Bahasa Indonesia	2		INS 014	Bahasa Inggris II	2	
INS 007	Bahasa Inggris I	4		INS 015	IAD, IBD, ISD	2	
INS 008	Bahasa Arab I	4		INS 016	Komputer	4	
PAI 001	Ilmu Pendidikan	4		PAI 002	Filsafat Umum	2	
J U M L A H		24		J U M L A H		20	
SEMESTER III				SEMESTER IV			
Kode	Matakuliah	K		Kode	Matakuliah	K	
INS 303	Sejarah Peradaban Islam	2		INS 002	Manajemen Organisasi	2	
INS 304	Filsafat Ilmu	2		PAI 008	Sej. Pendd. Umum/Islam	4	
INS 201	Metode Studi Islam	2		PAI 009	Filsafat Pendidikan	2	
INS 202	Civic Education	2		PAI 010	Psikologi Pendidikan	2	
PAI 003	Psikologi Umum	2		PAI 011	Psikologi Agama	2	
PAI 004	Fiqh II	2		PAI 012	Materi PAI	4	
PAI 005	Tafsir II	4		TAR013	Perencanaan Pengajaran Agama Islam	4	
PAI 006	Hadits II	4					
PAI 007	Administrasi Pendidikan	4					
J U M L A H		20		J U M L A H		20	

SEMESTER V			SEMESTER VI		
Kode	Matakuliah	K	Kode	Matakuliah	K
PAI 014	Strategi Pengajaran Agama Islam	4	INS 023	Metode Penelitian I	2
PAI 015	Teknik Evaluasi Pengajaran Agama Islam	4	PAI 020	Statistik Pendidikan	4
PAI 016	Kepemimpinan Pendidikan	2	PAI 021	Bimbingan dan Konseling	2
PAI 017	Media Pengajaran	4	PAI 022	Pengem. Sistem Evaluasi PAI	2
PAI 018	Psikologi Belajar	2	PAI 023	Sosiologi Pendidikan	2
PAI 019	PPL I	4	PAI 024	Profesi Keguruan	4
		2	PAI 025	Pendidikan Prasekolah	2
		4	PAI 026	Pendidikan Luar Sekolah	2
J U M L A H		20	J U M L A H		20
SEMESTER VII			SEMESTER VIII		
Kode	Matakuliah	K	Kode	Matakuliah	K
INS 020	Kewirausahaan	2	INS 025	KKN	4
INS 024	Metode Penelitian II	2	NS 026	Skripsi	6
PAI 027	Pengemangan Kurikulum PAI	2			
PAI 028	PPL II	4			
PAI 029	Kapita Selekta Pendidikan Umum dan Agama	2			
PAI 030	Filsafat Pendidikan Islam	2			
PAI 031	Perbandinga Pendidikan	2			
J U M L A H		16	J U M L A H		10

Sumber: Buku Panduan Akademik IAIN Sumatera Utara Tahun Akademik 2005/ 2006

C. Dosen dan Mahasiswa

Ketika penelitian ini dilakukan, yakni tahun akademi 2005/2006, jumlah mahasiswa yang sedang menjalani studi pada jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU sebanyak 957 orang. Secara rinci, jumlah tersebut dapat diterakan pada tabel berikut:

Tabel 2: Jumlah mahasiswa PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU berdasar semester dan jenis kelamin

No	JENIS KELAMIN	SEMESTER					TOTAL
		I	III	V	VII	N. Aktif	
1	Laki-Laki	103	87	77	53	105	425
2	Perempuan	152	62	94	72	152	532
J U M L A H		255	149	171	125	257	957

Sumber: Dokumentasi Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU Tahun 2006

Kemudian, sampai tahun akademi 2005/2006, jumlah dosen tetap yang bertugas pada jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU berjumlah 34 orang. Secara rinci, jumlah dosen tetap jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU berdasar jenis kelamin dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Jumlah dosen tetap jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU berdasar jenis kelamin dan jenjang pendidikan.

Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan			Total
	Strata-1	Strata-2	Strata-3	
Laki-Laki	3	12	4	19
Perempuan	-	14	1	15
Jumlah	3	26	5	34

Sumber: Diolah dari Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan Nomor 61 Tahun 2006

Berdasar jumlah di atas, maka sampai tahun akademi 2005/2006, rasio perbandingan dosen dan mahasiswa pada jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU adalah 1:28,15. Rasio perbandingan dosen-mahasiswa ini tentu masih kurang memadai bila dikaitkan dengan upaya memberikan pelayanan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi pembentukan dan pengembangan kompetensi mahasiswa calon guru PAI dari Fakultas Tarbiyah IAIN SU. Untuk menjembatani hal itu, jalan keluar yang ditempuh pimpinan jurusan dan Fakultas Tarbiyah IAIN SU adalah mengangkat dosen tidak tetap guna memperlancar dan meningkatkan pelayanan pendidikan bagi mahasiswa jurusan PAI Fakultas

Tarbiyah IAIN SU. Pada tahun akademi 2005/2006, jumlah dosen tidak tetap yang diperbantukan untuk membelajarkan mahasiswa jurusan PAI berjumlah 34 orang. Berdasarkan jumlah dosen tetap dan tidak tetap, perbandingan jumlah dosen-mahasiswa adalah 1:14,07. Secara rinci, jumlah dosen tidak tetap jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU berdasar jenis kelamin dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4: Jumlah dosen tidak tetap jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU berdasar jenis kelamin dan jenjang pendidikan

Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan			Total
	Strata-1	Strata-2	Strata-3	
Laki-Laki	2	24	5	31
Perempuan	-	3	-	4
Jumlah	2	27	5	34

Sumber: Diolah dari Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan Nomor 61 Tahun 2006

D. Sistem Pembelajaran

Kegiatan belajar mengajar pada jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU setiap harinya dimulai dari

pukul 07.30 Wib dan berakhir pada pukul 16.00 Wib. Jadwal perkuliahan diatur menurut semester. Secara rinci, jadwal kegiatan pembelajaran kelas pada jurusan PAI adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Jadwal perkuliahan semester ganjil jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU tahun Akademi 2005/ 2006

No.	Semester	Jadwal Kuliah
1.	I (Satu)	11.30 – 16.00
2.	III (Tiga)	07.30 – 11.20
3.	V (Lima)	11.30 – 16.00
4.	VII (Tujuh)	07.30 – 11.20

Sumber: Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU Tahun 2006.

Seluruh perkuliahan kelas pada jurusan PAI berlangsung dari hari Senin sampai Jum'at. Khusus untuk hari Jum'at, jadwal tatap muka berlangsung dari pukul 07.30 – 11.30 (sesi pertama) dan 14.00-16.30 (sesi kedua). Kemudian untuk hari Sabtu, semua jadwal digunakan untuk praktikum, seperti praktik ibadah, *micro teaching*, bahasa Arab, bahasa Inggris, observasi lapangan, praktik pengalaman lapangan, dan lain-lain.

Sesuai jadwal perkuliahan sebagaimana di atas, maka sejak pagi hari, gedung perkuliahan dan kantor administrasi jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU sudah ramai dikunjungi mahasiswa, baik yang akan mengikuti perkuliahan tatap muka di kelas, menghadiri praktik laboratorium atau *microteaching*, melakukan bimbingan skripsi dengan dosen pembimbing, mengikuti ujian komprehensif, ujian *munaqasah*, dan lain-lain.

Secara umum, sesuai dengan buku Panduan Akademik IAIN Sumatera Utara, maka proses pembelajaran mahasiswa dilakukan melalui: (1) kegiatan akademik terjadwal, (2) kegiatan akademik terstruktur, dan (3) kegiatan akademik mandiri.⁷ Kegiatan akademik terjadwal ialah aktivitas pembelajaran terjadwal yang dilaksanakan dosen-mahasiswa yang umumnya berbentuk perkuliahan tatap muka di kelas. Adapun kegiatan akademik terstruktur adalah seluruh aktivitas pembelajaran di bawah bimbingan dosen yang

⁷ Lihat Buku Panduan Akademik, *op. cit.*, hlm. 158.

dilaksanakan mahasiswa di luar kelas, seperti menyelesaikan makalah, mengerjakan soal, meringkas atau melaporkan buku, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan akademik mandiri adalah seluruh aktivitas pembelajaran yang dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami bahan atau materi perkuliahan tatap muka atau mempersiapkan bahan bagi kegiatan akademik terstruktur, seperti mensurvei atau membaca literatur.

Dalam tataran praktikal, kegiatan akademik terjadwal umumnya dilakukan melalui pemberian materi kuliah atau ceramah, diskusi atau seminar kelas, membaca teks, dan praktik atau mendemostrasikan suatu proses dan keterampilan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap sejumlah Rancangan Kegiatan Pembelajaran (RKP) yang disusun para dosen PAI dan pengamatan intensif yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa praktis seluruh proses pembelajaran pada jurusan PAI dilakukan melalui kuliah tatap muka di dalam kelas. Kegiatan tatap muka tersebut lebih banyak dilakukan

dengan berfokus pada dua metode utama, yaitu: (1) kuliah atau ceramah, dan (2) diskusi atau seminar kelas. Pada umumnya, metode ceramah digunakan dosen dalam memberi kuliah pada mahasiswa yang masih berada pada semester I dan III, sedangkan untuk mahasiswa yang sudah berada pada semester V sampai VII digunakan metode diskusi atau seminar kelas. Demikianpun, terdapat juga kasus di mana dosen yang mengajar pada semester I menggunakan metode diskusi kelas; begitu juga, masih didapati pula dosen yang mengajar pada semester V dan VII yang menggunakan metode ceramah atau kuliah.⁸

Berdasar pengamatan yang dilakukan terhadap praktik pembelajaran yang ditampilkan para dosen PAI yang menggunakan metode ceramah atau kuliah, diketahui bahwa dosen mengambil peran sebagai sentra pemberi informasi kepada para mahasiswa berkaitan dengan topik perkuliahan yang sedang diajarkannya.

⁸ Pemeriksaan terhadap RKBM dilakukan atas bantuan sekretaris jurusan PAI dari tanggal 14-16 September 2006. Adapun pengamatan intensif terhadap perkuliahan kelas peneliti lakukan sepanjang September sampai Oktober 2006.

Sedangkan berdasar pengamatan intensif yang dilakukan terhadap praktik pembelajaran yang menggunakan diskusi atau seminar kelas, dapat diketahui bahwa para dosen umumnya mengambil peran sebagai fasilitator, pengamat, klarifikator, dan pengontrol pelaksanaan diskusi. Jika diskusi menyimpang dari topik perkuliahan, maka dosen segera mengingatkan moderator untuk meluruskan kembali topik diskusi. Demikian juga, jika waktu yang digunakan melebihi batas yang telah ditentukan, maka dosen segera meminta moderator untuk segera mengakhiri pelaksanaan diskusi kelas. Pelaksanaan diskusi umumnya menelaah konsep-konsep teoritik tentang materi perkuliahan dari berbagai aspeknya sesuai dengan silabus perkuliahan.

Mencermati paparan di atas, maka secara umum dapat dikemukakan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung pada jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU umumnya dilakukan dengan pendekatan *cognitive-theoretical* yang menekankan aktivitas pembelajaran pada kegiatan yang berfokus pada aktivitas membaca, kuliah atau ceramah, dan diskusi atau tanya jawab. Kecuali praktikum yang memang menuntut penguasaan kete-

rampilan tertentu, maka semua aktivitas pembelajaran umumnya ditekankan pada upaya memberikan pemahaman dan bekal teoritis kepada mahasiswa agar mereka menguasai konsep-konsep kunci dari setiap topik perkuliahan yang dipelajari.

BAB V

PROSES PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI CALON GURU PAI

A. Pengembangan Kompetensi Pedagogik

Secara umum, pengembangan kompetensi pedagogik diarahkan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa calon guru PAI agar mereka memiliki kapasitas dalam mengembangkan proses pembelajaran peserta didik sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu kependidikan. Karena itu, sebagaimana dikemukakan ketua jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU, pengembangan kompetensi pedagogik ini dilakukan melalui berbagai aspek terkait, seperti muatan kurikulum, proses pembelajaran, praktik pengalaman lapangan (PPL), dan evaluasi pembelajaran mahasiswa calon guru.¹

Dalam aspek kurikulum, penataan kurikulum ke arah pengembangan kompetensi pedagogik mahasiswa calon guru terus dilakukan, terutama sejak awal tahun 2000. Menurut pihak jurusan, hal itu dilakukan untuk

menindaklanjuti penilaian sejumlah kalangan, terutama laporan para guru madrasah dan dosen pembimbing praktik lapangan mahasiswa, bahwa kemampuan pedagogik mahasiswa jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU masih perlu ditingkatkan. Dalam konteks ini, sekretaris jurusan PAI mengemukakan:

Beberapa tahun belakangan ini kita selalu mengevaluasi secara lebih cermat hasil-hasil PPL mahasiswa jurusan PAI ke madrasah. Memang pak, ... rata-rata nilai PPL mahasiswa kita semuanya memuaskan. Tetapi, dalam beberapa kunjungan kami ke lokasi PPL, kami juga menanyakan secara langsung kepada sejumlah guru pamong, kepala madrasah, dan dosen pembimbing praktikum perihal kemampuan mahasiswa PAI dalam melaksanakan praktik mengajar. Dari beberapa wawancara yang kami lakukan, kami mendapatkan informasi bahwa kemampuan sebahagian besar mahasiswa kita dalam mengelola dan melaksanakan pembelajaran masih perlu ditingkatkan. Aspek-aspek yang perlu ditingkatkan itu meliputi keterampilan membuka pelajaran, menyajikan materi pelajaran, mengajukan dan mendistribusikan pertanyaan kepada peserta didik, menggunakan waktu, dan menyusun item untuk evaluasi sesuai materi dan alokasi waktu yang tersedia.²

² Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2006 bertempat di ruang ketua jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN SU pukul 11.00 WIB

¹ Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2006 bertempat di ruang ketua jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN SU pukul 10.00-12.00 WIB

Menurut ketua dan sekretaris jurusan PAI, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka pengembangan kompetensi calon guru PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU dilakukan dengan merujuk pada isi undang-undang tersebut. Secara eksplisit, pasal 39 ayat 2 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa tugas pendidik adalah merencanakan dan mengelola proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, bahkan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.³ Karenanya, dalam konteks kompetensi pedagogik, jurusan PAI senantiasa mengedepankan pemberian bekal teoritik dan latihan praktis kepada mahasiswa calon guru PAI agar mereka memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan dan mengelola pembelajaran peserta didik. Dalam konteks ini, setiap dosen pengampu mata kuliah kependidikan disarankan agar mensosialisasikan Undang-Undang tentang Sisdiknas kepada mahasiswa melalui aktivitas pembelajaran yang mereka lakukan.

Selanjutnya, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen,

³ Lihat kembali Bab XI pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

atas kebijakan pimpinan Fakultas Tarbiyah IAIN SU, maka pengembangan kompetensi pedagogik mahasiswa calon guru PAI diarahkan pada upaya mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola pembelajaran peserta didik sesuai dengan penjelasan isi undang-undang dimaksud.⁴ Karena itu, dalam konteks kurikulum, melalui koordinasi dengan Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) IAIN SU dan pimpinan fakultas Tarbiyah, jurusan PAI melakukan pengkajian ulang terhadap komposisi kurikulum jurusan PAI dan berupaya menyempurnakannya agar bisa merespon tuntutan Undang-Undang tersebut. Hal itu sudah dilakukan sejak Desember 2005 dengan melibatkan seluruh dosen Fakultas Tarbiyah melalui Lokakarya Peningkatan Mutu Pembelajaran. Begitupun, menurut ketua jurusan PAI, sampai saat penelitian ini dilakukan, belum tampak tindak lanjut apalagi implikasi konkrit dari lokakarya yang telah dilakukan. Ketika ketua jurusan PAI peneliti wawancara, didapati informasi bahwa mekanisme pengembangan kurikulum jurusan PAI dilakukan sepenuhnya oleh pimpinan Fakultas di bawah koordinasi Pembantu Rektor I dan Unit Peningkatan

⁴ Lihat kembali penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Mutu Akademik (UPMA) IAIN SU.⁵ Meski demikian, bila ditilik dari komposisi kurikulum PAI yang digunakan saat ini, maka kelompok mata kuliah yang dapat disebut sebagai komponen yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi pedagogik mahasiswa calon guru adalah sebagai berikut:

Tabel 6 : Mata Kuliah Pengembangan Kompetensi Pedagogik

No	Kode	Mata Kuliah	K
01.	PAI	Ilmu Pendidikan	4
02.	PAI	Administrasi Pendidikan	4
03.	PAI	Manajemen Organisasi	2
04.	PAI	Psikologi Pendidikan	2
05.	PAI	Materi PAI	2
06.	PAI	Perencanaan Pengajaran Agama Islam	4
07.	PAI	Strategi Pengajaran Agama Islam	4
08.	PAI	Teknik Evaluasi Pengajaran Agama Islam	4
09.	PAI	Media Pengajaran	4
10.	PAI	Psikologi Belajar	2
11.	PAI	PPL I (<i>micro teaching</i>)	4
12.	PAI	PPL II (praktik lapangan)	4
13.	PAI	Statistik Pendidikan	4
14.	PAI	Bimbingan Konseling	2
15.	PAI	Pengembangan Sistem Evaluasi PAI	4
16.	PAI	Pendidikan Prasekolah	2
17.	PAI	Pendidikan Luar Sekolah	2
18.	PAI	Pengembangan Kurikulum PAI	2
Jumlah			56

⁵ Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Nopember 2006 bertempat di ruang ketua jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU pukul 09.00 Wib.

Dalam konteks pembelajaran, sejak tahun 2001, proses pembelajaran mahasiswa mulai diarahkan pada pembelajaran aktif (*active learning*) yang mengedepankan aktivitas dan kreativitas mahasiswa calon guru. Dalam konteks ini, melalui Lokakarya Peningkata Mutu Pembelajaran Fakultas Tarbiyah IAIN SU yang melibatkan seluruh pejabat birokrasi fakultas dan jurusan, dosen, dan mahasiswa, dekan memberlakukan kebijakan penerapan pembelajaran aktif yang berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa sesuai dengan semangat, prinsip, dan tuntutan pembelajaran dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Lokakarya yang diselenggarakan pada tahun 2005 tersebut sekaligus merupakan sarana sosialisasi dan pelatihan pembelajaran aktif dan KBK kepada seluruh dosen.

Usaha merubah pola pembelajaran konvensional yang lebih berpusat pada dosen ke arah pembelajaran aktif kemudian dilakukan jurusan dengan mengirim sejumlah dosen PAI untuk mengikuti pelatihan *active learning*, baik yang diselenggarakan oleh IAIN SU dengan institusi lain, maupun yang diselenggarakan sendiri oleh fakultas Tarbiyah IAIN SU. Dalam pelatihan tersebut, sejumlah dosen PAI telah dikirim untuk mengikuti *training* pembelajaran aktif dan Kurikulum Berbasis

Kompetensi (KBK). Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari sekretaris jurusan PAI, sejak tahun 2004 sampai 2006, telah dikirim sejumlah dosen PAI untuk mengikuti pelatihan pembelajaran aktif dan KBK. Pada tahun 2004, jurusan PAI mengirim sepuluh orang dosen untuk mengikuti pelatihan metodologi pembelajaran aktif yang diselenggarakan di Mess Perum Kereta Api Medan oleh UPMA IAIN SU bekerjasama dengan *Center for Training Staff and Development (CTSD)* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2005, jurusan PAI mengikutsertakan dua orang dosennya untuk mengikuti *Trainer for Trainer (TOT)* pembelajaran aktif yang diselenggarakan CTSD di Yogyakarta. Masih pada tahun 2005, jurusan PAI juga mengirim salah seorang dosennya untuk mengikuti pelatihan tingkat nasional pembelajaran KBK di IAIN Palembang. Selanjutnya, sejak tahun 2005 dilakukan sejumlah *workshop* dan pelatihan berkala kepada para dosen PAI tentang KBK dan pembelajaran aktif. *Workshop* dan pelatihan tersebut terutama dikhususkan bagi para dosen pengampu mata kuliah kependidikan dan dosen yang akan menjadi pembimbing praktikum mahasiswa, baik praktikum *micro teaching* maupun praktik pengalaman lapangan di berbagai madrasah atau sekolah. Hal ini dimaksudkan

agar ilmu dan keterampilan yang diperoleh dari sejumlah *workshop* dan pelatihan tersebut dapat diimplementasikan dan ditransfer secara langsung oleh dosen kepada mahasiswa calon guru PAI.

Secara umum, *workshop* dan pelatihan dosen dilakukan jurusan PAI sebagai upaya konkret merespon berbagai perkembangan yang terjadi dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Ketika Departemen Pendidikan Nasional mulai memberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai penyempurnaan dari KBK, maka untuk merespon hal itu jurusan PAI menyelenggarakan *workshop* KTSP bagi para dosennya. Kemudian untuk mengembangkan kompetensi pedagogik mahasiswa calon guru PAI agar mereka mengenal dan mampu mengimplementasikan KTSP dalam membelajarkan siswa kelas 1 - 3 SD/MI, maka latihan mempraktikkan pembelajaran tematik mulai dilakukan di dalam kelas lewat mata kuliah tertentu dan praktik *micro teaching* di laboratorium.

Menurut Pembantu Dekan I dan ketua serta sekretaris jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU, melalui *workshop* dan pelatihan-pelatihan tersebut diharapkan para dosen memiliki kemampuan dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang bertumpu pada

pengembangan aktivitas dan kreativitas mahasiswa. Pada satu sisi, dosen diharapkan dapat memerankan diri sebagai *great motivator*, fasilitator, dan klarifikator pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa calon guru. Kemudian pada sisi lain, mahasiswa calon guru PAI diberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan pedagogisnya. Untuk menjamin terlaksananya pembelajaran seperti itu, maka sejak awal tahun 2006, jurusan PAI menata kegiatan akademik terjadwal dengan aktivitas:

1. penyajian informasi teoritik berkaitan topik perkuliahan. Aktivitas ini dibagi ke dalam: (a) pembukaan kuliah dengan memberi penguatan di bidang akhlak (b) informasi tentang materi, tujuan, dan target pembelajaran, (c) penyajian materi melalui ceramah dan diskusi atau seminar, (d) kesimpulan dan klarifikasi oleh dosen, dan (e) informasi tentang relasi materi dengan materi berikutnya dan tugas-tugas yang harus dilakukan mahasiswa paa pembelajaran berikutnya.
2. melatih sikap atau suatu keterampilan tertentu yang relevan dengan topik perkuliahan. Dalam mata kuliah yang berkaitan dengan proses pembelajaran, latihan tersebut diarahkan pada mendemonstrasikan

keterampilan praktis melaksanakan pembelajaran dan sikap-sikap yang idealnya ditampilkan guru.

Dalam satu kali kegiatan akademik terjadwal, dari 50 menit alokasi waktu yang disediakan untuk setiap 1 SKS mata kuliah harus dilaksanakan dosen dalam dua bentuk kegiatan di atas. Rincian waktu pelaksanaan kegiatan akademik terjadwal tersebut diserahkan kepada dosen untuk mengaturnya dengan mempertimbangkan beban SKS mata kuliah yang mereka ampu.

Untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan akademik terjadwal sebagaimana di atas, maka langkah awal yang ditempuh jurusan PAI adalah mewajibkan seluruh dosen pengampu mata kuliah untuk menyerahkan disain atau rancangan pembelajarannya kepada jurusan setiap awal semester. Bagi dosen yang mengalami kesulitan membuat disain pembelajaran mata kuliah yang diampunya, jurusan PAI memfasilitasi mereka dengan contoh-contoh disain pembelajaran lengkap dengan format dan alat penilaiannya. Sedangkan pengawasan berkelanjutan dilakukan pihak jurusan melalui pengamatan dan masukan dari piket serta laporan mahasiswa melalui

public hearing yang dilakukan minimal sekali dalam satu semester.⁶

Meskipun pihak jurusan dan fakultas telah melakukan serangkaian upaya di atas, namun berdasarkan pemeriksaan di lapangan ditemukan bahwa masih belum semua dosen PAI yang menyerahkan disain atau rancangan kegiatan pembelajarannya ke jurusan. Selain itu, berdasarkan pengamatan terhadap sejumlah proses pembelajaran yang dilakukan para dosen, peneliti menemukan bahwa masih banyak dosen yang belum mempraktikkan pembelajaran aktif sebagaimana diintruksikan pihak jurusan. Sepertinya, sebagaimana dinyatakan Covalleskie, meskipun *workshop* dan berbagai kursus *in-service training* telah dilaksanakan, namun tidak dapat disangkal bahwa kenyataan yang ditemui pada sekolah-sekolah masih banyak saja guru-guru yang tetap mengacu pada prinsip *chalk and talk*. Praktik-

⁶ *Public hearing* adalah pertemuan antara jurusan PAI dengan perwakilan mahasiswa secara representatif yang dihadiri oleh pimpinan fakultas, para dosen, dan organisasi intra kampus tingkat fakultas dan jurusan. Pada pertemuan ini dibicarakan berbagai hal yang berkenaan dengan perkuliahan dan pelayanan administrasi kepada seluruh mahasiswa PAI. Selama ini *public hearing* baru dilakukan sekali dalam satu semester dan semuanya dilakukan pada awal semester.

praktik seperti ini tetap akan ada dan tetap akan menjadi pengecualian.⁷

Masih dalam upaya pengembangan kompetensi pedagogik mahasiswa calon guru, pembelajaran pada jurusan PAI juga dilakukan lewat kegiatan akademik terstruktur, seperti observasi lapangan, praktikum laboratorium, dan praktik pengalaman lapangan di madrasah dan sekolah. Observasi lapangan dilakukan mahasiswa di luar kegiatan akademik terjadwal dengan mengunjungi sejumlah madrasah atau sekolah untuk mengamati secara langsung bagaimana guru melaksanakan proses pembelajaran. Hasil-hasil pengamatan dicatat dan didiskusikan dalam kelompok pengamatan untuk selanjutnya dilaporkan dan didiskusikan dengan sesama mahasiswa dan dosen pembimbing observasi lapangan.

Adapun *micro teaching* merupakan praktik latihan mengajar terbatas di dalam kelas dan laboratorium jurusan PAI di bawah bimbingan dosen. Latihan difokuskan pada mendemonstrasikan satu persatu keterampilan dasar mengajar yang terdiri dari:

⁷ Lihat Jhon F. Covalleskie 'Educational System and Resistance to Reform: The Limits Policy' dalam *Education Policy Analysis Archives*, Volume 2, Number 4, 10 February 1994.

1. Keterampilan membuka pembelajaran dengan melatih: (a) cara menarik perhatian peserta didik, (b) memulai pelajaran, (c) memberikan acuan, dan (d) membuat kaitan, baik melalui apersepsi maupun pengetahuan baru berkaitan materi yang akan dipelajari.
2. Keterampilan menjelaskan materi pembelajaran yang meliputi aktivitas: (a) merencanakan, dan (b) melaksanakan atau menyajikan materi pembelajaran.
3. Keterampilan bertanya tingkat dasar yang meliputi: (a) kejelasan dan keringkasan pertanyaan, (b) pemberian acuan pertanyaan, (c) memfokuskan pertanyaan, (d) memindahkan pertanyaan, (e) mendistribusikan pertanyaan, (f) memberikan waktu kepada peserta didik untuk berpikir, dan (g) memberikan tuntunan bagi siswa yang berkesulitan menjawab pertanyaan, dan (h) memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap jawaban yang benar.
4. Keterampilan memberikan penguatan kepada peserta didik, baik penguatan personal maupun kelompok, yang mencakup: (a) penguatan verbal, dan (b) penguatan non-verbal.

5. Keterampilan memberikan dorongan, baik dorongan yang bersifat verbal maupun non-verbal, agar peserta didik termotivasi untuk terus membelajarkan diri.
6. Keterampilan memberikan variasi stimulus yang mencakup bagaimana sebaiknya: (a) gerakan guru, (b) memberi isyarat, (c) intonasi suara, (d) gaya interaksi, (e) kontak pandang, (f) pemusatan perhatian peserta didik, dan (g) pengalihan penggunaan indera.
7. Keterampilan memimpin diskusi kelompok yang mencakup keterampilan dalam: (a) memusatkan perhatian peserta didik, (b) memperjelas masalah, (c) menganalisis pendapat atau pandangan peserta didik, (d) meregulasi peserta didik untuk urun pendapat, dan (e) menyimpulkan dan menutup diskusi.
8. Keterampilan mengajar pada kelompok kecil. Secara teoritik, kemampuan yang dikembangkan dalam aspek ini meliputi: (a) membentuk kelompok, (b) merencanakan tugas kelompok, (c) pengaturan tempat, ruangan, alat, dan sumber belajar, (d) melaksanakan skenario atau langkah-langkah pembelajaran, dan (e) menutup pembelajaran. Kemudian secara praktikal, kompetensi pedagogis yang dikembangkan dalam aspek ini meliputi: (a) keterampilan dalam melakukan pendekatan terhadap peserta didik,

(b) keterampilan mengorganisir peserta didik, (c) keterampilan membimbing dan memudahkan pembelajaran, dan (d) keterampilan melaksanakan pembelajaran.

9. Keterampilan mengelola kelas dengan melatih mahasiswa calon guru agar kompeten dalam: (a) menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran agar tetap nyaman, aman, menyenangkan, dan mencapai hasil yang optimal, dan (b) teknik dan pendekatan untuk mengembalikan kondisi pebelajar yang mulai jenuh atau belum mencapai hasil pembelajaran yang optimal.

10. Keterampilan menutup pembelajaran, yakni mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan rangkuman atau kesimpulan menyeluruh terhadap materi pembelajaran, mengevaluasi pencapaian guru dan peserta didik, dan mendorong peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran berikutnya.

Dalam praktiknya, jumlah pertemuan dalam *micro teaching* sebanyak 28 sampai 32 pertemuan yang dibagi ke dalam: (a) pembelajaran kelas sebanyak 14 kali pertemuan untuk memberikan bekal teoritik dan praktik lima

menit tentang sepuluh keterampilan dasar mengajar, dan (b) 14 sampai 18 kali pertemuan di laboratorium *micro teaching* untuk berlatih mempraktikkan sepuluh keterampilan dasar mengajar tersebut. Dalam hal ini, seorang mahasiswa diberi kesempatan dua kali untuk tampil mempraktikkan keterampilannya. Karena itu, dalam satu kelompok PPL *micro teaching*, jumlah mahasiswa bimbingan seorang dosen hanya berkisar antara 10-15 orang.

Selanjutnya, pengembangan kompetensi pedagogik mahasiswa calon guru PAI juga dilakukan melalui kegiatan praktik mengajar atau biasa disebut praktik pengalaman lapangan (PPL) di madrasah atau sekolah. Menurut ketua jurusan PAI, PPL ini dirancang untuk melatih kemampuan mahasiswa calon guru dalam menguasai kompetensi pedagogik yang utuh dan terintegrasi sehingga mereka siap dan mampu melaksanakan tugas-tugas keguruan dan kependidikan secara mandiri. Karena itu, sasaran PPL ini juga adalah pembinaan dan pengembangan kompetensi profesional calon guru PAI.⁸

Dalam tataran praktis, pengembangan kompetensi pedagogik mahasiswa calon guru PAI melalui PPL

⁸ Wawancara dengan ketua jurusan PAI, *op. cit.*

dilakukan selama 8 minggu atau dua bulan penuh. Selama itu, di bawah bimbingan dosen pembimbing lapangan (DPL) dan guru pamong madrasah atau sekolah, mahasiswa melakukan kegiatan: (a) orientasi lapangan selama satu minggu, (b) pengenalan dan pelaksanaan kegiatan administrasi madrasah atau sekolah selama dua minggu. Aktivitas yang dilakukan mahasiswa dalam hal ini terdiri dari pengenalan dan pelaksanaan administrasi sekolah, guru kelas, perpustakaan, bimbingan konseling, dan membantu kepala madrasah atau sekolah dalam memberdayakan komite sekolah, (c) merancang disain pembelajaran kelas di bawah bimbingan guru pamong dan DPL selama satu minggu, (d) praktik mengajar di kelas untuk mendemonstrasikan 10 keterampilan dasar mengajar yang telah dilatihkan dalam *micro teaching* di bawah bimbingan guru pamong selama tiga minggu, dan (e) ujian praktik mengajar yang langsung dinilai oleh guru pamong dan dosen penilai yang ditunjuk jurusan PAI.

Dalam mempraktikkan keterampilan dasar mengajar di madrasah atau sekolah, setiap mahasiswa praktikan minimal harus tampil mengajar di depan kelas sebanyak 12 x 90 menit sebelum akhirnya mengikuti ujian PPL.

Dalam konteks evaluasi pembelajaran, sejak awal tahun 2006 jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU telah memberlakukan sistem evaluasi yang menggabungkan secara integral evaluasi proses dan evaluasi hasil belajar mahasiswa. Evaluasi proses berkaitan dengan upaya menilai kompetensi pedagogik mahasiswa calon guru PAI melalui interaksi edukatif yang terjadi sepanjang berlangsungnya pembelajaran. Kemudian, evaluasi hasil berkaitan dengan penilaian terhadap kemampuan mahasiswa calon guru PAI dalam menguasai seluruh teori dan materi perkuliahan yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik guru.

B. Pengembangan Kompetensi Kepribadian

Kepribadian merupakan sebuah konstruk tentang kekhasan atau keunikan diri individu dibanding individu lainnya, baik dalam hal pola pikir maupun cara bertindak yang dilakukan secara berulang dan konsisten. Dalam konteks guru, kepribadian adalah ciri-ciri khas yang membedakan seseorang yang berprofesi sebagai guru dengan profesi lainnya, baik dalam cara berpikir maupun bertindak atau berperilaku.

Berkaitan dengan pendidikan mahasiswa calon guru PAI, untuk membentuk kepribadian mereka dapat

dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui penataan kurikulum pendidikan yang bermuatan mata kuliah landasan dan pengembangan kepribadian, menciptakan proses pembelajaran yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya kepribadian guru, melatih model kepribadian guru melalui kegiatan praktikum, dan mengevaluasi kesesuaian atau konsistensi perkataan, sikap, dan perilaku mahasiswa calon guru melalui evaluasi hasil sesuai tolok ukur kepribadian yang idealnya harus dimiliki seorang guru PAI.

Melalui penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dalam konteks kurikulum, usaha pengembangan kompetensi kepribadian mahasiswa calon guru yang dilakukan jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU sangat bergantung pada upaya yang dilakukan pimpinan fakultas, khususnya di bawah koordinator Pembantu Dekan I. Dalam konteks ini, ketua jurusan PAI mengatakan:

... penataan seluruh mata kuliah untuk diajarkan kepada mahasiswa jurusan PAI guna kepentingan pengembangan seluruh kompetensinya, tidak hanya kompetensi kepribadian tentunya, sangat bergantung kepada kebijakan pimpinan fakultas. Selama ini, kebijakan yang menyangkut tentang hal itu sepenuhnya berada di tangan dekan dan belum ada otonomi jurusan atau program studi untuk mengaturnya. Jadi, kita hanya mengikuti sajalah ... Begitupun, hemat saya, jika kita

cermati kurikulum jurusan PAI, baik mata kuliah komponen institut maupun jurusan sebenarnya banyak yang bermuatan pengembangan kepribadian mahasiswa calon guru PAI, seperti Pancasila, Civic Education, Kewirausahaan, Akhlak Tasauif, Ilmu Pendidikan Islam, Profesi Keguruan, dan lain-lain.⁹

Namun, informasi yang diperoleh dari sekretaris jurusan PAI menyatakan bahwa pimpinan fakultas melalui Pembantu Dekan I pernah meminta jurusan PAI untuk menyusun komposisi mata kuliah program studi. Namun, sampai sejauh ini, realisasi dari usulan jurusan tersebut belum tampak dan masih menunggu tindak lanjut dari pimpinan fakultas dan UPMA IAIN SU.

Hemat peneliti, bila dilihat secara cermat komposisi kurikulum jurusan PAI, maka dapat dikemukakan bahwa kelompok mata kuliah yang dapat dikelompokkan ke dalam landasan dan pengembangan kepribadian mahasiswa calon guru PAI adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

⁹ Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2006 bertempat di ruang ketua jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN SU pukul 10.00-12.00 WIB

Tabel 7: Mata Kuliah Landasan & Pengembangan Kepribadian

No	Kode	Mata Kuliah	K
01.	INS	Tauhid	2
02.	INS	Akhlak Tasauf	2
03.	INS	Ulumul Qur'an	2
04.	INS	Ulumul Hadis	2
05.	INS	Pancasila	2
06.	INS	Bahasa Indonesia	2
07.	INS	Bahasa Arab	6
08.	INS	Bahasa Inggris	6
09.	INS	IAD, IBD, ISD	2
10.	INS	Kewirausahaan	2
11.	PAI	Filsafat Pendidikan	2
12.	PAI	Filsafat Pendidikan Islam	2
13.	INS	Sejarah Peradaban Islam	2
14.	PAI	Kepemimpinan Pendidikan	2
15.	PAI	Psikologi Agama	2
16.	PAI	Profesi Keguruan	4
17.	PAI	Tafsir	6
18.	PAI	Hadits	6
Jumlah			54

Dalam konteks pembelajaran, proses pembentukan dan pengembangan kompetensi kepribadian mahasiswa calon guru PAI dilakukan jurusan dengan mengedepankan implementasi Keputusan Rektor IAIN Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Mahasiswa dan Keputusan Rektor IAIN Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2004 tentang Etika Akademik. Untuk

melengkapi keputusan itu, pimpinan fakultas juga membuat aturan khusus tentang etika berbusana bagi mahasiswa calon guru PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU. Implementasi seluruh regulasi tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak jurusan PAI yang dikoordinasikan secara intensif dengan seluruh dosen. Menurut ketua jurusan PAI, sampai sejauh ini, regulasi tersebut telah menjadi instrumen yang efektif dalam membentuk dan mengembangkan kepribadian mahasiswa calon guru PAI. Menurut beliau, semua itu juga tidak terlepas dari komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari para dosen dalam membentuk watak dan kepribadian mahasiswa calon guru melalui pembelajaran yang mereka dilakukan. Dalam kesempatan wawancara dengan peneliti, ketua jurusan PAI menyatakan:

Hemat saya, dalam hal kepribadian, mahasiswa Fakultas Tarbiyah, khususnya PAI boleh dibilang yang terbaik dari mahasiswa IAIN SU. Lihatlah cara mereka berpakaian, bertutur kata, bergaul dan berperilaku, semuanya masih tetap dalam koridor ajaran agama. Dalam hal berpakaian, tidak ada mahasiswi jurusan PAI yang tampak bentuk auratnya. Begitu juga mahasiswa, tidak ada di antara mereka yang menggunakan celana jeans yang koyak-koyak atau baju kaus, baik dalam mengikuti perkuliahan kelas maupun ketika berada di lingkungan kampus. Begitu juga, tidak ada mahasiswa kita yang rambutnya gondrong, apalagi tidak rapi. Umumnya, sikap mahasiswa kita sopan terhadap dosen

dan antar sesama mereka. Hemat saya, sepertinya sudah tertanam kesadaran di kalangan mahasiswa PAI bahwa mereka adalah calon guru agama sehingga mereka harus menyesuaikan penampilan, tutur kata, sikap dan perilaku sesuai dengan kepribadian seorang guru atau pendidik Muslim ...¹⁰

Dalam konteks praktikum, pengembangan kompetensi kepribadian mahasiswa calon guru PAI diupayakan jurusan melalui praktikum ibadah yang dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan. Satu kali pertemuan berlangsung selama 90 menit. Materi yang dilatihkan mencakup membaca dan menghafal ayat-ayat al-Qur'an, latihan menjadi imam shalat *fardlu* dan *khatib* shalat Jum'at, wirid Yasin, dan menghafal doa-doa pilihan untuk acara pada majelis-majelis tertentu. Melalui praktikum ibadah ini diharapkan tumbuh dan berkembang kepribadian religius yang mencintai agama dan gemar mengamalkannya.

Berkaitan dengan kompetensi kepribadian ini, dalam konteks evaluasi pembelajaran, baik jurusan maupun dosen pengampu mata kuliah senantiasa menekankan kepada mahasiswa bahwa akumulasi dan penguasaan pengetahuan belum memiliki arti apa-apa bila tidak disertai dengan sikap dan kepribadian yang

¹⁰ Ibid.

sesuai dengan pengetahuan itu. Karenanya, selalin senantiasa mendorong mahasiswa untuk menampilkan perilaku terpuji, baik sebagai seorang Muslim maupun calon pendidik atau guru PAI, nilai dan tingkat kelulusan seorang mahasiswa calon guru PAI juga ditentukan oleh perilaku atau sikap mental yang ditampilkannya dalam keseluruhan *setting* pembelajaran.

C. Pengembangan Kompetensi Sosial

Sebagai calon guru, mahasiswa PAI Fakultas Tarbiyah dipersyaratkan memiliki kecakapan atau kemampuan dalam membangun hubungan baik dengan peserta didik, rekan seprofesi, orangtua, masyarakat, dan seluruh *stakeholder* pendidikan. Karena itu, pengembangan kompetensi sosial merupakan salah satu aspek yang sangat dipentingkan dalam proses pendidikan mahasiswa calon guru PAI.

Dari dimensi kurikulum, pengembangan kompetensi sosial ini dilakukan dengan menata kegiatan PPL dan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) mahasiswa. Di samping mengembangkan kompetensi keilmuan dan profesional, mahasiswa juga berlatih mengembangkan kompetensi sosialnya. Melalui PPL, mahasiswa dilatih

membiasakan diri dalam membangun hubungan baik dan kerjasama dengan komunitas madrasah, dari mulai guru, kepala madrasah, pegawai, peserta didik, dan sesama mahasiswa PPL. Dengan demikian, mahasiswa calon guru PAI akan mengetahui secara langsung bagaimana kehidupan di madrasah atau sekolah, sehingga mereka punya kesempatan yang luas untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan dunia yang bakal digelutinya kelak.

Latihan untuk mengembangkan kompetensi sosial yang lebih luas dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Kukerta mahasiswa di masyarakat yang berlangsung selama dua bulan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa calon guru PAI tidak hanya dilatih untuk mendekatkan dan menyesuaikan diri dengan masyarakat, tetapi juga dituntut agar mampu berkreasi, menggerakkan masyarakat untuk memberdayakan diri dan lingkungannya, dan mengidentifikasi sekaligus berupaya memecahkan berbagai problema sosial, keagamaan, dan pendidikan yang dihadapi masyarakat.¹¹

Menurut ketua jurusan PAI, melalui Kukerta mahasiswa dilatih untuk mengembangkan kompetensi

¹¹ Bdk. *Buku Panduan Program Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Pengalaman Lapangan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara* (Medan: Fakultas Tarbiyah IAIN SU, 2006), hlm. 1.

sosialnya. Sesuai dengan tujuan Kukerta, kompetensi sosial ini dapat diamati melalui sifat hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat. Secara psikhis, kompetensi ini dapat diketahui dengan kriteria seberapa jauh mahasiswa telah memenuhi norma-norma yang berlaku dalam sistem kemasyarakatan dan kependidikan secara aktual.¹² Dalam praktiknya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa selama Kukerta meliputi praktik mengajar di madrasah dan sekolah, praktik mengajar di luar sekolah, melaksanakan administrasi madrasah atau sekolah, mengembangkan pendidikan agama, mengembangkan kegiatan olahraga dan kesenian, berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Selain melalui PPL dan Kukerta, upaya pihak jurusan untuk mengembangkan kompetensi sosial mahasiswa calon guru PAI juga dilakukan melalui kegiatan akademik terjadwal dan akademik terstruktur. Dalam kesempatan wawancara dengan peneliti, ketua jurusan PAI mengatakan:

¹² Lihat *ibid.*, hlm. 4.

Untuk mengembangkan kompetensi sosial mahasiswa PAI, di luar PPL dan Kuliah Kerja Nyata ada dua kegiatan utama yang diupayakan jurusan, yaitu melalui kegiatan akademik terjadwal dan terstruktur. Dalam kegiatan akademik terjadwal, pelaksanaan pembelajaran dengan seminar atau diskusi kelas selain diarahkan untuk mendalami topik perkuliahan juga dimaksudkan untuk mengembangkan sikap-sikap sosial yang baik antar sesama mahasiswa dan dengan dosen. Sedangkan melalui kegiatan akademik terstruktur, jurusan menyarankan agar dosen menugaskan mahasiswa untuk melakukan aktivitas inkuiri lapangan di masyarakat dalam rangka melihat dari dekat kesesuaian atau relevansi antara materi perkuliahan yang dipelajari di kampus dengan kondisi objektif masyarakat yang sesungguhnya. Melalui inkuiri tersebut diharapkan mahasiswa berlatih bersosialisasi dengan masyarakat luas.¹³

Kompetensi sosial mahasiswa calon guru PAI juga diharapkan berkembang melalui pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan sebagai bagian integral dari kegiatan kokurikuler. Selama mengikuti program strata satu, setiap mahasiswa calon guru PAI wajib melaksanakan kegiatan kokurikuler minimal sebanyak 16 Satuan Kredit Kegiatan (SKK). Jumlah SKK tersebut

¹³ Wawancara dengan ketua jurusan PAI, *op. cit.*

harus ditempuh mahasiswa minimal setara dengan bobot 2 SKS setiap semester.¹⁴

Meskipun tidak diberi bobot SKS, namun kegiatan ini turut menentukan atau menjadi persyaratan bisa tidaknya seorang mahasiswa calon guru mengikuti ujian komprehensif. Di bawah koordinasi jurusan dan Pembantu Dekan III, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan mahasiswa setiap libur semester. Sejauh ini, kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan mahasiswa calon guru ke berbagai desa di beberapa daerah tingkat dua propinsi Sumatera Utara. Aktivitas yang dilakukan sangat beragam, mulai dari aktivitas keagamaan, pendidikan Islam formal dan non-formal, perekonomian masyarakat desa, sosial-budaya, dan sebagainya. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan juga beragam dari mulai ceramah agama, mengajar di madrasah, sekolah, dan majelis ta'lim, membentuk dan memberdayakan organisasi remaja mesjid, menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan, melakukan gotong-royong, menghidupkan seni budaya Islam, membentuk sentra-sentra kerajinan rumah tangga, membuat dan memperbaiki sarana dan prasarana desa, dan lain-lain. Dalam

¹⁴ IAIN Sumatera Utara, *Buku Panduan Akademik IAIN Sumatera Utara Tahun Akademik 2005/2006* (Medan: IAIN Sumatera Utara, 2006), hlm. 177.

melaksanakan berbagai aktivitas tersebut, mahasiswa memperoleh kesempatan yang luas untuk melakukan interaksi sosial di masyarakat. Kesempatan melakukan pengabdian masyarakat setiap semester ini sangat mendukung pencapaian dan pengembangan kompetensi sosial mahasiswa calon guru PAI.

D. Pengembangan Kompetensi Profesional

Sesuai dengan visi jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU: *menjadi jurusan unggul yang terkemuka dalam bidang pengkajian, pengembangan, dan penerapan ilmu-ilmu pendidikan agama Islam yang menghasilkan sarjana Muslim yang memiliki keahlian dalam melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) secara profesional pada tingkat nasional dan regional*¹⁵, maka upaya pembinaan dan pengembangan kompetensi profesional mahasiswa calon guru PAI menempati posisi penting dalam seluruh program dan proses pembelajaran.

Menurut ketua jurusan PAI, pembinaan dan pengembangan kompetensi profesional mahasiswa PAI

¹⁵ Lihat *ibid.*, hlm. 74. Lihat juga Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN SU, *Borang Akreditasi Prodi PAI Jenjang SI* (Medan: Fakultas Tarbiyah IAIN SU, 2006), hlm. 1.

diarahkan pada tiga hal, yaitu: (1) penguasaan teoritik tentang tugas dan tanggung jawab profesi seorang guru PAI, (2) melatih keterampilan praktis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran peserta didik, dan (3) pembentukan etika profesi sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan etika profesi keguruan.¹⁶

Pihak jurusan menyadari bahwa pembentukan profesionalitas seorang guru PAI tidaklah mudah, sebab membutuhkan waktu yang panjang dan proses yang berkelanjutan. Karena itu, fokus utama pengembangan kompetensi profesional calon guru PAI yang dilakukan adalah meletakkan dasar-dasar profesionalitas dan menanamkan sikap untuk senantiasa bersedia mengembangkan kemampuan profesional kepada seluruh mahasiswa PAI, meskipun mereka telah selesai studi di jurusan PAI, bahkan setelah menjadi guru kelak.

Secara kelembagaan, upaya ke arah pengembangan kompetensi profesional mahasiswa calon guru PAI diawali dari penyiapan kurikulum pendidikan yang bermuatan matakuliah-matakuliah yang mendukung pencapaian kompetensi profesional. Dalam konteks ini,

¹⁶ Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2006 bertempat di ruang ketua jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN SU pukul 10.00-12.00 WIB.

menurut ketua dan sekretaris jurusan PAI, seluruh komponen mata kuliah jurusan dirancang dan diarahkan untuk mengembangkan kompetensi profesional mahasiswa calon guru PAI. Karenanya, seluruh mata kuliah tersebut wajib dikontrak dan dipelajari mahasiswa sebagai *basic competecies* untuk menjadi guru PAI yang profesional, seperti: (1) Ilmu Pendidikan Islam, (2) Profesi Keguruan, (3) Psikologi Pendidikan, (4) Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (5) Perencanaan Pengajaran Agama Islam, (6) Materi PAI, (7) Metode dan Strategi Pembelajaran PAI, (8) Sumber dan Media Pembelajaran PAI (9) Tehnik Evaluasi Pembelajaran Agama Islam, (10) Statistik Pendidikan, (11) Kepemimpinan Pendidikan, (12) Bimbingan Konseling, (13) Pengembangan Kurikulum PAI, (14) Penelitian Pendidikan, dan (15) Pengembangan Sistem Evaluasi PAI. Melalui seluruh mata kuliah ini mahasiswa calon guru PAI diberi bekal teoritik tentang profesionalisme dan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk mencapainya.

Dalam konteksnya dengan pembelajaran, proses perkuliahan seluruh mata kuliah di atas tetap ditekankan pada penguasaan aspek teoritik dan sekaligus praktik tentang pendidikan dan berbagai variabel yang

melingkupinya. Karenanya, pembelajaran mata kuliah tersebut tidak hanya dilakukan melalui tatap muka di ruang kelas, tetapi juga kerja-kerja mandiri dan kelompok yang diarahkan pada penguasaan konsep dan latihan mengaplikasikan teori-teori ilmu kependidikan Islam, baik dalam menyusun disain atau rancangan pembelajaran, merancang strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran, serta alat, media dan sumber materi pembelajaran PAI.

Praktik mengajar terbatas di labratorium atau *micro teaching* merupakan media bagi melatih dan sekaligus mengevaluasi kompetensi profesional mahasiswa calon guru PAI. Sejumlah keterampilan dasar dalam mengajar, dari mulai membuka, melaksanakan, mengevaluasi sampai menutup pembelajaran merupakan keterampilan dasar profesional yang dilatihkan dalam setiap praktik mengajar terbatas. Dalam pelaksanaannya, sebelum tampil mempraktikkan keterampilan dasar dalam mengajar tersebut, setiap mahasiswa calon guru PAI terlebih dahulu dibimbing dan difasilitasi dosen dalam merancang disain pembelajaran yang akan mereka praktikkan. Proses mempraktikkan keterampilan dasar profesi tersebut direkam dengan *videorecorder* dan diputar kembali setelah praktikan selesai mengajar.

Rekaman tersebut kemudian diputar kembali untuk melihat sisi-sisi kekuatan dan kelebihan seorang praktikan serta mendapatkan masukan dari sesama rekan praktikan maupun dosen pembimbing pengajaran mikro. Berdasarkan diskusi dan masukan tersebut, seorang praktikan diharapkan lebih baik atau berupaya memenuhi prinsip-prinsip profesionalitas dalam praktik mengajar selanjutnya.

Dalam konteks evaluasi pembelajaran, jurusan PAI telah merancang seperangkat indikator untuk menilai profesionalitas mahasiswa calon guru PAI dalam melaksanakan PPL di madrasah atau sekolah. Namun, sebagaimana pengakuan sekretaris jurusan PAI, indikator tersebut masih akan disempurnakan agar lebih terukur dan mudah dipahami serta dilaksanakan, baik oleh mahasiswa calon guru sebagai praktikan, maupun guru pamong dan dosen pembimbing lapangan sebagai penilai.

E. Diskusi Hasil Penelitian

Uraian di atas telah memaparkan upaya-upaya yang dilakukan Fakultas Tarbiyah IAIN SU dalam membentuk dan mengembangkan kompetensi calon guru PAI dalam rangka menyahuti implementasi

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Secara umum, berbagai upaya yang dilakukan tersebut tampak tidak terlepas dari seluruh program dan proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh jurusan PAI.

Dari dimensi kurikulum, penelitian ini menemukan bahwa konstruksi dan penataan kurikulum jurusan PAI sangat bergantung pada kebijakan dan upaya: (1) pimpinan IAIN di bawah kordinasi Pembantu Rektor I, (2) Unit Peningkatan Mutu Akademik IAIN SU berkoordinasi dengan Pembantu Rektor I, (3) pimpinan Fakultas Tarbiyah di bawah kordinasi Pembantu Dekan I, dan (4) inisiatif jurusan PAI. Sayangnya, peneliti tidak menemukan adanya garis koordinasi yang jelas antara semua unsur atau elemen di atas dalam penataan dan pengembangan kurikulum jurusan PAI. Dalam konteks ini, ketua jurusan PAI bahkan mengatakan:

... kita selalu dibuat bingung, diminta buat usulan, kita buat. Tapi, setelah usulan itu dibuat, kita tidak tahu bagaimana tindak lanjutnya. Ditanya kepada PD I katanya ke UPMA, ditanya UPMA katanya ke PR I. Sementara itu, kita tidak punya akses langsung ke PR I, sebab harus melalui PDI ... Sebagai contoh, kita pernah kebingungan soal mata kuliah Logika Saintifik sebab belum ada deskripsi dan sinopsisnya. Kita minta ke PD I katanya ke UPMA, sementara kita minta ke UPMA

katanya belum ada ... Kita tunggu buku Panduan Akademik yang baru, toh ternyata disana juga tidak ada. Akhirnya mata kuliah itu tidak jadi kita ajarkan kepada mahasiswa ...¹⁷

Bila dilihat dari komposisinya, tampak bahwa struktur kurikulum jurusan PAI tidak berbeda dengan jurusan lain yang ada di Fakultas Tarbiyah, bahkan seluruh fakultas yang ada di lingkungan IAIN SU, yang terbagi kepada: (1) komponen institut, dan (2) komponen program studi. Secara kelembagaan, komponen institut adalah seluruh mata kuliah dasar umum yang dulunya disebut MKDU. Mata kuliah ini diprogramkan untuk mengembangkan wawasan dan karakteristik yang mencirikan seseorang sebagai mahasiswa IAIN. Sementara itu, mata kuliah prodi adalah seluruh mata kuliah yang memberikan: (a) wawasan dan teori tentang dasar-dasar kependidikan Islam, (b) kepribadian pendidik Muslim, dan (c) keterampilan praktis untuk mengelola pembelajaran peserta didik. Dari sisi ini, tampak bahwa kurikulum jurusan PAI tidak hanya bernuansa, tetapi berisikan matakuliah-matakuliah yang merupakan *basic knowlege* bagi pembentukan dan pengembangan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional mahasiswa calon guru PAI.

¹⁷ Wawancara, *ibid*.

Begitupun, hemat peneliti, karena struktur kurikulum hanya terbagi dua, maka kejelasan tentang hubungan fungsional dan keterkaitan integral antara kompetensi dan karakteristik mahasiswa dalam satu jurusan tertentu, fakultas tertentu, dan institut secara keseluruhan masih kabur atau tidak tampak jelas. Karena itu, idealnya seluruh mata kuliah ditata kembali berdasarkan komponen jurusan, fakultas, dan institut. Hal ini sangat penting, terutama bila dikaitkan dengan rencana konversi IAIN Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri. Sebagaimana dikembangkan dalam kebanyakan universitas eks IKIP, dalam konteks UIN, seorang mahasiswa seyogyanya bisa kuliah pada Fakultas Tarbiyah dengan mengambil sekaligus dua spesialisasi yang berbeda, yaitu ilmu murni (non kependidikan) dan ilmu kependidikan (profesi guru dan tenaga kependidikan). Seorang mahasiswa Tadris IPA misalnya, ia bisa mengambil IPA sebagai ilmu murni atau IPA sebagai ilmu pendidikan (pendidikan IPA). Setelah kuliah selama delapan semester, seorang mahasiswa Tadris non kependidikan akan mendapat gelar akademik sesuai bidang ilmu yang dipelajarinya. Namun setelah itu, ia bisa melanjutkan kuliah untuk mengambil proram kependidikan selama dua semester

untuk mendapatkan akta mengajar atau akta kependidikan tanpa harus mengontrak kembali seluruh mata kuliah institut dan fakultas, tetapi cukup mengontrak komponen mata kuliah jurusan (*consecutive curriculum*).

Selanjutnya, untuk kepentingan pembentukan dan pengembangan kompetensi mahasiswa calon guru PAI sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, maka kurikulum jurusan PAI perlu dikonstruksi berdasarkan komponen kompetensi tersebut. Hal itu dimaksudkan agar semua dosen dan juga mahasiswa memahami kedudukan dan fungsi mata kuliah yang mereka ampu dalam konteks pembentukan dan pengembangan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional mahasiswa calon guru PAI. Dengan demikian, seluruh pembelajaran mata kuliah yang dilakukan dosen akan berorientasi dan fokus pada upaya pembentukan dan pengembangan kompetensi mahasiswa calon guru PAI. Artinya, masing-masing dosen memahami arti penting mata kuliah yang diampunya dalam membentuk dan mengembangkan kompetensi keguruan. Hal ini penting, terutama bagi dosen-dosen pengampu mata kuliah seperti Ulumul Qur'an, Ulumul Hadits, Tafsir, Hadits, Ilmu Tauhid, Akhlak Tasauf, Fiqh, Sejarah Peradaban Islam, Filsafat

Umum, Filsafat Ilmu, IAD, IBD, dan ISD, Komputer, dan Kewirausahaan. Selama ini, ada dugaan kuat bahwa mereka tidak mengetahui kedudukan dan hubungan fungsional mata kuliah tersebut dengan pembentukan dan pengembangan kompetensi keguruan mahasiswa PAI. Hal ini dikarenakan para dosen pengampu matakuliah-matakuliah tersebut umumnya berlatar belakang pendidikan S1, S2, dan S3 non kependidikan yang belum memiliki pengetahuan memadai tentang relasi antara mata kuliah yang diampunya dengan pembentukan dan pengembangan kompetensi mahasiswa calon guru PAI. Dalam kesempatan wawancara dengan peneliti, sekretaris jurusan PAI bahkan mengatakan:

belum ada itu pak, ... menurut saya walaupun ada, baru sedikit dosen yang bisa memahami bahwa mata kuliah yang diampunya memiliki hubungan yang erat, katakanlah, dengan pengembangan kompetensi profesional atau kompetensi kepribadian mahasiswa calon guru. Berdasarkan pengamatan saya, jangan kan dosen non kependidikan, dosen yang berlatar belakang kependidikan saja pun belum tentu semua yang memahami hal itu. Umumnya, para dosen hanya memahami kedudukan mata kuliah yang diampunya dari segi disiplin ilmu mata kuliah itu sendiri.¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan ibu Nurmawati tanggal 7 Oktober 2006 bertempat di ruang sekretaris jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN SU pukul 09.00 WIB.

Mencermati hal tersebut, maka struktur kurikulum jurusan PAI perlu ditata kembali agar para dosen dan juga mahasiswa memahami dengan jelas kedudukan dan relasi seluruh mata kuliah dengan kompetensi keguruan yang hendak dikembangkan. Dalam konteks ini, Fakultas Tarbiyah dan jurusan PAI bisa menata kurikulum berdasarkan komponen kompetensi sebagai berikut: (1) matakuliah landasan dan pengembangan wawasan keilmuan dan kependidikan Islam, (2) mata kuliah landasan dan pengembangan kepribadian pendidik Muslim, (3) matakuliah landasan dan pengembangan keterampilan sosialisasi dan berkehidupan bermasyarakat, dan (4) matakuliah landasan dan pengembangan keterampilan unjuk kerja dan profesionalitas. Dengan demikian, struktur dan proporsi mata kuliah dalam kurikulum PAI bisa digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2: Struktur dan proporsi mata kuliah dalam kurikulum jurusan PAI

Komponen Kompe- tensi MK	Mata Kuliah Komponen Institut (INS)	Mata Kuliah Komponen Fakultas (TAR)	Mata Kuliah Komponen Jurusan (PAI)
Mata Kuliah Landasan dan Pengembangan Wawasan Kependidikan Islam			
Mata Kuliah Landasan dan Pengembangan Kepribadian Pendidik Muslim			
Mata Kuliah Landasan dan Pengembangan Keterampilan Sosialisasi atau Berkehidupan Bermasyarakat			
Mata Kuliah Landasan dan Pengembangan Keterampilan Unjuk Kerja dan Profesionalitas			
Bobot	40 SKS	40 SKS	70 SKS

Dikonstruksi berdasarkan SK Mendiknas Nomor 232/U/2000

Dari dimensi pembelajaran, melalui penelitian ini ditemukan bahwa pola pembelajaran yang banyak

dikembangkan dosen PAI dominan bercorak *cognitive-theoretical*. Berdasarkan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan para dosen, peneliti melihat tekanan lebih banyak diberikan pada upaya transformasi teori ilmu-ilmu keislaman dan kependidikan. Dimensi praktik dan afektif atau nilai dari suatu mata kuliah nyaris tidak tampak dalam suatu *setting* pembelajaran. Padahal, kompetensi yang dikehendaki agar dimiliki mahasiswa calon guru PAI mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Dalam konteks pengembangan kompetensi mahasiswa calon guru PAI, maka pola pembelajaran yang idealnya dikembangkan jurusan PAI adalah suatu proses penciptaan situasi dan kondisi yang betul-betul kondusif bagi mahasiswa untuk mencapai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Untuk itu, pelaksanaan pembelajaran hendaknya memperhatikan keseimbangan antara proses: (1) pemberian bekal teoritik-akademik, (2) melatih keterampilan praktik disertai balikan (*feedback*) dari seluruh kompetensi keguruan yang akan dikembangkan, (3) penghayatan untuk mencapai dan mengembangkan kompetensi nilai dan norma, dan (4) pembiasaan serta keteladanan untuk mengembangkan watak, sikap, dan kepribadian

mahasiswa calon guru PAI. Untuk merealisasikan hal itu, maka ketersediaan dan kelayakan kelas, ruang praktik atau laboratorium, perpustakaan, sarana dan fasilitas pembelajaran lainnya perlu diperhatikan dan harus sesuai dengan standar minimal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005.¹⁹

Dalam konteks praktikum, sejak mahasiswa calon guru PAI berada pada semester satu sampai delapan, idealnya mereka sudah harus dibiasakan dengan praktikum yang berkesinambungan untuk mengembangkan seluruh kompetensi keguruan yang seharusnya mereka miliki. Hal ini mempertimbangan bahwa kompetensi keguruan, khususnya kepribadian dan profesionalitas, proses pembentukan dan pengembangannya tidak bisa dilakukan dalam sekejap, tetapi memerlukan waktu yang panjang dan harus berkelanjutan. Dalam konteks ini, praktikum yang dilaksanakan pada setiap semester bisa menjadi instrumen efektif untuk membentuk kompetensi mahasiswa calon guru PAI secara berkelanjutan.

Berdasar temuan lapangan, peneliti mendapati bahwa praktikum yang diselenggarakan jurusan PAI

¹⁹ Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini lihat Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

belum memperlihatkan proses keberlanjutan, bahkan keterkaitan integral dan fungsional antara satu kegiatan praktikum dengan praktikum berikutnya. Seorang dosen pembimbing praktikum berinisial RAH mengatakan:

... jangankan mahasiswa PAI, dosennya sendiri pun menurut saya masih bingung apa dan bagaimana keterkaitan fungsional antara praktikum bahasa, praktikum Iqra' al-Qur'an, praktikum komputer, dan praktikum ibadah, dengan pembentukan kompetensi keguruan mahasiswa PAI. Selama ini, semua praktikum itu hanya dipahami urgensinya untuk kepentingan mahasiswa kelak ketika mengabdikan di masyarakat.²⁰

Kemudian, seorang dosen pembimbing praktikum lainnya yang berinisial FJ mengatakan:

Menurut saya, pemahaman tentang hubungan fungsional dan integral antara satu praktikum dengan praktikum berikutnya harus dimulai dari pemahaman tentang hubungan fungsional dan integral antara matakuliah kependidikan Islam dengan matakuliah lainnya. Selama ini, berdasar pengamatan saya, dosen dan mahasiswa tidak memahami hal itu. Apalagi dosen-dosen non kependidikan yang diikutsertakan membimbing praktikum mahasiswa hanya dengan tujuan asas pemerataan ...²¹

²⁰ Wawancara pada tanggal 2 Nopember 2006 bertempat di ruang Pembantu Dekan I Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara.

²¹ *Ibid.*

Mencermati hal itu, untuk kepentingan pembentukan dan pengembangan kompetensi keguruan mahasiswa, jurusan PAI harus menata *sequence* praktikum berdasarkan jenis, tingkatan, hubungan fungsional keilmuan, dan kontinuitasnya untuk pencapaian kompetensi keguruan mahasiswa. *Sequence* tersebut harus disosialisasikan kepada seluruh dosen dan mahasiswa. Kemudian, jurusan PAI juga harus menyusun peta akademik dosen berdasarkan: (a) jenjang pendidikan, (b) latar pendidikan, apakah kependidikan dan non kependidikan, (c) spesialisasi atau keahlian masing-masing dosen, (d) pelatihan kependidikan yang pernah diikuti, dan (e) lama mengajar dan pengalaman membimbing praktikum mahasiswa. Bagi jurusan PAI, peta akademik ini sangat diperlukan untuk menempatkan secara profesional seorang dosen dalam pelaksanaan praktikum mahasiswa PAI. Sedangkan bagi Fakultas Tarbiyah dan IAIN SU, peta akademik dosen ini diperlukan sebagai dasar kebijakan dalam rekrutmen dosen dan pemberian izin dosen untuk melanjutkan studi akademis ke jenjang pascasarjana atau pendidikan spesialisasi tertentu.

Dalam konteks evaluasi, penelitian ini menemukan bahwa sudah ada upaya jurusan PAI menyelenggarakan asesmen mahasiswa yang didasarkan pada penilaian

proses dan penilaian hasil belajar secara integral. Begitu pun, sebagaimana diakui beberapa orang dosen PAI, jurusan belum memberikan panduan praktis tentang teknis penilaian proses agar bisa dipedomani dosen. Seorang dosen PAI yang berinisial NEL mengatakan:

Seingat saya, dalam Lokakarya Peningkatan Proses Pembelajaran yang diselenggarakan pada Desember 2005, ketua dan sekretaris jurusan PAI berjanji memfasilitasi dosen dengan format penilaian proses untuk mengevaluasi pembelajaran mahasiswa. Tapi, sampai sekarang contoh format itu tidak pernah ada ... saya sudah beberapa kali menanyakannya ke jurusan, tapi karena selalu mendapat jawaban belum digandakan, akhirnya saya membuat sendiri indikator penilaian berdasarkan sikap yang ditampilkan mahasiswa dalam pembelajaran ...²²

Ungkapan senada diakui beberapa orang dosen yang mengajar pada jurusan PAI, seperti AAR, RST, VW, STH, dan RAH.²³ Karena itu, para dosen akhirnya membuat alat ukurnya asing-masing untuk menyahuti keinginan jurusan PAI melakukan evaluasi proses disamping evaluasi hasil pembelajaran.

Hemat peneliti, bila evaluasi terhadap kinerja mahasiswa dilakukan dengan evaluasi proses disamping

evaluasi hasil, maka jurusan PAI harus membuat pedoman pelaksanaan dan instrumen penilaian proses agar dosen dan mahasiswa mengetahui kejelasan tentang aspek-aspek dan tata cara penilaian. Aspek yang dinilai idealnya mencakup seluruh butir kompetensi keguruan yang harus dimiliki mahasiswa calon guru PAI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Sedangkan tata cara penilaian idealnya dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan instrumen yang terukur. Bentuk instrumen bisa merupakan variasi antara: (a) ujian tertulis untuk menilai penguasaan konsep kompetensi akademik-pedagogik, (b) portofolio untuk menilai ketercapaian kompetensi sosial dan kepribadian, (c) skala sikap untuk menilai keterampilan unjuk kerja profesional, baik dengan bantuan assesor internal, khususnya dosen pembimbing lapangan, maupun assesor eksternal, seperti guru pamong yang berasal dari madrasah atau sekolah dimana mahasiswa berpraktik mendemonstrasikan sepuluh keterampilan dasar dalam mengajar.

²² Ibid.

²³ Ibid.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 mensyaratkan agar semua guru memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kehadiran Undang-Undang tersebut meniscayakan agar setiap guru, termasuk guru PAI, menguasai keempat kompetensi tersebut untuk memenuhi kelayakan dan kepatutannya sebagai guru. Untuk itu, sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Agama (LPTKA) Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara sebagai institusi formal yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program penyiapan tenaga guru PAI harus merespon secara positif kehadiran dan tuntutan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 berkaitan dengan kompetensi keguruan.

Penelitian ini menemukan bahwa proses penyiapan guru PAI yang dilakukan Fakultas Tarbiyah IAIN SU melalui jurusan PAI telah berusaha merespon secara positif kehadiran Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 lewat upaya pembentukan dan pengembangan kompetensi mahasiswa calon guru PAI.

Secara khusus, penelitian ini menemukan bahwa seluruh upaya pembentukan dan pengembangan kompetensi mahasiswa calon guru PAI, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, dilakukan pihak jurusan melalui: (a) proses penataan dan penyempurnaan kurikulum, (b) penataan proses pembelajaran melalui kegiatan akademik, terjadwal, terstruktur, dan mandiri, (c) penataan program dan pelaksanaan praktikum mengajar terbatas (*micro teaching*) dan praktik pengalaman lapangan (PPL) dengan melatihkan sepuluh keterampilan dasar mengajar, dan (d) mengembangkan evaluasi pembelajaran dengan mengintegrasikan penilaian proses dan hasil pembelajaran untuk menilai ketercapaian kompetensi mahasiswa calon guru PAI. Melalui penelitian ini juga ditemukan bahwa aspek-spek kompetensi yang dikembangkan mencakup sekaligus dimensi teoritik dan praktikal dari empat kompetensi keguruan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005.

B. Rekomendasi

Proses pembentukan dan pengembangan kompetensi seorang mahasiswa calon guru, termasuk guru PAI, adalah sebuah proses kontinum untuk menghantarkan

seseorang agar betul-betul kompeten dalam melaksanakan tugas profesi keguruan atau kependidikannya. Karena itu, sebagai LPTKA yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan calon guru PAI, Fakultas Tarbiyah IAIN SU harus memiliki disain program pengembangan kompetensi yang jelas, terukur, kontekstual, dan berkelanjutan. Untuk itu, semua instrumen yang dibutuhkan bagi implementasi disain pengembangan kompetensi harus dijamin ketersediannya dalam ukuran yang layak dan memadai. Hal ini dimaksudkan agar disain yang telah dirancang, implementasinya tidak terhambat oleh alasan-alasan yang bersifat klasik, terutama menyangkut dukungan finansial dan sarana-fasilitas.

Secara teoritik dan praktis, upaya memproduksi calon guru-guru PAI yang kompeten di bidangnya tidaklah mudah. Untuk itu, semua pihak dan institusi terkait, terutama *stakeholder* pendidikan Islam harus memberikan dukungan konkrit, dari mulai penyediaan dan bantuan tenaga ahli, penyediaan dana atau *fund rising* secara berkelanjutan, sampai pada pengadaan sarana dan fasilitas untuk menjamin kontinuitas implementasi disain pengembangan kompetensi mahasiswa calon guru PAI sehingga benar-benar terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. edisi keempat (Oxford: Oxford University Press, 1994).

Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: PT Al-Maarif, 1989).

Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992).

Arief Furqan, *Memetakan Persoalan Perguruan Tinggi Agama Islam: Visi, Misi, dan Program Ditpertaits Departemen Agama RI* (Jakarta: Ditpertaits Ditjenbinbagais Departemen Agama RI, 2004).

Dedi Supriadi dan Fasli Jalal, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2002).

Departemen Pendidikan Nasional, *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005).

Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Kegiatan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan Tahun 2003* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan, 2003).

Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional, *Standar Kompetensi Guru Pemula Sekolah Lanjutan Pertama/ Sekolah Lanjutan Atas* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, 2004).

Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional, *Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI Program Pendidikan D-II PGSD* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketegaan Perguruan Tinggi, 2003).

Fakultas Tarbiyah IAIN SU, *Buku Panduan Program Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Pengalaman Lapangan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara* (Medan: Fakultas Tarbiyah IAIN SU, 2006).

<http://www.dikmenum.depdiknas.go.id/silabus/php>

James H. McMillan dan Sally Schumacher, *Research in Education: A Conceptual Introduction* (New York: Longman, 2001).

Jhon F. Covalleskie 'Educational System and Resistance to Reform: The Limits Policy' dalam *Education Policy Analysis Archives*, Volume 2, Number 4, 10 February 1994.

Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1988).

M. U. Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

Mattehew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Edisi Indonesia terj. Rohidi, Tjetjep Rohendi (Jakarta: UI Press, 1992).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang *Standar Nasional Pendidikan* (Jakarta: CV Eka Jaya, 2005).

Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994).

S.J. Taylor dan R. Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods*. second edition. (New York: Willey, 1984)

Sharan B. Merriam, *Case Study Research in Education: A Qualitative Approach* (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1988).

Tim Penyusun Buku Profil IAIN SU, *Profil IAIN Sumatera Utara 2005* (Medan: IAIN Sumatera Utara, 2005).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Bandung: Nuansa Aulia, 2006).

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 20.

World Bank, *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery* (East Asia and Pacific Regional Office: Education Sector Unit, 1998).

World Bank Education in Indonesia From Colonial Days
 (East Asia and Pacific Regional Office Education Sector Unit,
 1998).

James H. McMillan dan Sally Schmeidler, *Research in
 Education: A Conceptual Introduction* (New York: Longman, 1990).

John F. Czerwinski, 'Educational System and Resources
 in Poland: The Limits Policy' dalam *Education Policy Studies*
 Volume 1, Number 4, 10 February 1994.

John M. Pabon dan Hasan Shadiq, *Keterampilan
 Pendidikan* (Jakarta, 1993).

M. H. Daman, *Metode Cara Profesional Pendidikan*, Jakarta
 (Pustaka, 2004).

Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Qualitative
 Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Newbury Park, CA: Sage
 Publications, 1992).

Penelitian Penelitian RI Nomor 15 Tahun 2003, *Penelitian
 Pendidikan* (Jakarta: CV Eka Jaya, 2003).

Penelitian, *Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Eka Jaya, 2003).

R. Taylor dan R. Bogdan, *Introduction to Qualitative
 Research* (New York: Wiley, 1998).

Robert H. Merriam, *Case Study Research in Education*
 (San Francisco: Jossey-Bass, 1998).

**KECENDERUNGAN ORIENTASI FILIHAN
SANTRI TERHADAP ORGANISASI DAN POLITIK
PADA PEMILU 2014 DI SUMATERA UTARA**

Oleh:

**SYUKUR KHOLIL
SULIDAR
FAHRUL RIZAL**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN
TINGGI ISLAM
2014**

**KECENDERUNGAN ORIENTASI PILIHAN
SANTRI TERHADAP ORGANISASI DAN POLITIK
PADA PEMILU 2014 DI SUMATERA UTARA**

Oleh:

**SYUKUR KHOLIL
SULIDAR
FAHRUL RIZAL**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN
TINGGI ISLAM
2014**

KATA PENGANTAR

Puji dan sukur kami kepada Allah SWT, sholawat dan salaman atas Rasulullah. Semua karena cinta Allah dan RasulNya semua aktivitas dapat terlaksana termasuk penyelesaian penelitian yang berwujud Mengajar Dengan hati (Program *Capacity Building* Konsep pembelajaran dengan Hati Bagi Guru-guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Tanjung Pura, Langkat).

Proses pelaksanaan penelitian ini merupakan kegiatan yang didukung oleh Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan Penelitian *Participatory Action Research* (PAR) yang dilakukan untuk pemberdayaan sekolah-sekolah madrasah.

Penyelesaian penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam membantu terlaksananya penelitian ini hingga akhir penyusunan laporan. Ucapan terimakasih kepada kepala sekolah MAN 1 Tanjung Pura beserta guru-guru dan para siswa sebagai *target beneficiary*, guru-guru madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah se-Kecamatan Tanjung Pura yang turut berpartisipasi aktif dalam rangkaian penelitian dan pendampingan yang dilakukan. Ucapan terimakasih juga tertuju kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian ini, tanpa kami dapat menyebutkannya satu persatu.

Peneliti menyadari dan yakin bahwa penelitian ini bukanlah sebuah karya yang sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan penelitian ini, sehingga memberi manfaat kepada para pembaca dan kontribusi bagi masyarakat secara umum.

Medan, 20 November 2014
Ketua Peneliti,

Syukur Kholil

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pembatasan Istilah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II: KAJIAN TEORETIS	
A. Pendekatan Dalam Memahami Perilaku Memilih	
1. Pendekatan komunikasi	11
2. Pendekatan sosiologis	13
3. Pendekatan psikologis	14
4. Pendekatan rasional	16
B. Perilaku Memilih Pada Masa Orde Baru dan Reformasi	23
C. Gambaran Umum Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Sumatera Utara	
1. Nahdlatul Ulama (NU)	35
2. Muhammadiyah	46
3. Alwashliyah	54
4. Organisasi Sosial Keagamaan Lainnya	59
D. Gambaran Umum Organisasi Politik di Sumatera Utara	
1. Keadaan Organisasi Partai Politik	60
2. Karakteristik Organisasi Partai Politik	64

3. Orientasi Organisasi Partai Politik	75
E. Gambaran Umum Pondok Pesantren di Sumatera Utara	
1. Pengertian Pesantren	82
2. Pola Umum Pendidikan Pesantren	84
3. Unsur-unsur Pesantren	88

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	99
B. Populasi dan Sampel Penelitian	99
C. Sumber Data	100
D. Instrumen Pengumpul Data	100
E. Teknik Analisis Data	100

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Yang Dijadikan Sebagai Sampel Penelitian	
1. Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Langkat-Binjai	100
2. Pondok Pesantren Ar-Raudatul Hasanah	108
3. Pondok Pesantren Musthatawiyah Purba Bau Mandailing	130
4. Pondok Pesantren Daar Al- Uluum Kisaran	137
B. Profil Responden Penelitian	147
C. Kecenderungan Orientasi Pilihan Santri Terhadap Organisasi Sosial Keagamaan	151
D. Kecenderungan Orientasi Pilihan Santri Terhadap	

Politik Pada Pemilu 2014	156
E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Orientasi Pilihan Santri	168
F. Pembahasan Hasil Penelitian	170

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	176
B. Saran-saran	178

DAFTAR BACAAN LAMPIRAN

Provinsi Sumatera Utara, pada tahun ajaran 2009/2013 jumlah siswa/siswi yang sedang belajar di tingkat Ibtidaiyah sampai Aliyah di Sumatera Utara (SU) adalah 320.617 orang, dengan rincian Ibtidaiyah 99.261 orang, Tsanawiyah 160.491 orang dan Aliyah 60.865 orang. (Data Kearsifan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010).

Kemudian terdapat ratusan Sarana Pendidikan Islam di Sumatera Utara seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Sarana Pendidikan Islam di Sumatera Utara

No	Nama Sarana Pendidikan	Jumlah Unit
1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)	175
2	Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS)	552
3	Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)	50
4	(MTsN)	818

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Santri adalah generasi muda yang merupakan satu kekuatan besar bagi syiar Islam khususnya di Sumatera Utara. Mereka yang sedang menuntut ilmu di **Pondok Pesantren** mulai dari tingkat Ibtidaiyah sampai tingkat Aliyah diberi julukan **santri**. Berdasarkan Data Statistik Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Utara, pada tahun ajaran 2009/2010 jumlah siswa/siswi yang sedang belajar di tingkat Ibtidaiyah sampai Aliyah di Sumatera Utara (SU) adalah 320.617 orang, dengan perincian Ibtidaiyah 99.261 orang, Tsanawiyah 160.491 orang dan Aliyah 60. 865 orang (Data Keagamaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010).

Kemudian terdapat ratusan Sarana Pendidikan Islam di Sumatera Utara seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Sarana Pendidikan Islam di Sumatera Utara

No	Nama Sarana Pendidikan	Jumlah Unit
1	Madarasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)	129
2	Madarasah Ibtidaiyah Swasta (MIS)	552
3	Madarasah Tsanawiyah Negeri	59
4	(MTsN)	818

5	Madrasah Tsanawiyah Swasta	41
6	(MTsS)	371
7	Madrasah Aliyah Negeri (MAN)	2.481
8	Madrasah Aliyah Swasta (MAS)	1.289
9	Madrasah Diniyah Awaliyah	217
10	(MDA)	37
	Raudatul Atfal (RA)	
	Pondok Pesantren (Ponpes)	
	Pondok Pesantren Salafiyah	

Sumber: Data Keagamaan Kantor Wilayah Kemenag SU Tahun 2010.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di antara sarana Pendidikan Islam tersebut terdapat 217 unit Pondok Pesantren dan 37 unit Pondok Pesantren Salafiyah. Pondok Pesantren itu tersebar di berbagai wilayah di Sumatera Utara, dan sebahagian sudah amat populer sampai ke luar wilayah Sumatera Utara, serta mempunyai ribuan santri. Pondok Pesantren yang termasuk besar itu di antaranya adalah Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru di Kabupaten Mandailing Natal

(Madina), Pondok Pesantren Syekh Muhammad Dahlan Aek Hayuara Sibuhuan di Kabupaten Padanglawas, Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah di Medan. Pondok Pesantren Syekh Muhammad Dahlan misalnya mengasuh 2.025 santri (Kholil, 2010: 62-75).

Dengan demikian puluhan ribu generasi muda Islam menuntut ilmu di Pondok Pesantren. Mereka menjadi kekuatan besar untuk kemajuan Islam di masa depan. Karena itu perlu dipelajari kecenderungan-kecenderungan mereka dalam berbagai aspeknya, termasuk di antaranya kecenderungan dalam memilih organisasi sosial keagamaan dan kecenderungan politiknya, termasuk kecenderungan politik menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang bagi santri yang sudah berhak memilih, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan pilihan mereka terhadap organisasi sosial keagamaan dan politik tersebut.

Masalah kecenderungan pilihan santri terhadap organisasi sosial keagamaan dan politik serta faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut dipandang amat menarik untuk diteliti, sebab pendidikan Pondok Pesantren mempunyai keunikan

tersendiri dibanding pendidikan Islam lainnya di luar Pondok Pesantren. Keunikan itu meliputi kurikulum yang muatan agamanya cukup besar, tradisi mengasramakan santri di lingkungan Pondok Pesantren, pengaruh guru dan senioran yang begitu besar, sistem komunikasi yang begitu akrab dan lancar, jadwal kegiatan yang padat di pesantren, pakaian dan sebagainya. Semua itu dipandang dapat mempengaruhi kecenderungan santri dalam menentukan pilihannya.

Dari segi basis organisasi sosial keagamaan, sebahagian besar Pondok Pesantren walaupun tidak menyatakannya secara eksplisit, mempunyai kecenderungan kepada salah satu organisasi sosial keagamaan yang besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al-Washliyah, Al-Ittihadiyah dan sebagainya. Apakah kecenderungan Pondok Pesantren ini juga dapat mempengaruhi kecenderungan pilihan santri terhadap organisasi sosial keagamaan? Demikian juga kecenderungan pilihan dalam politik, sering pimpinan Pondok Pesantren terlibat langsung sebagai calon atau pendukung calon Kepala Daerah atau calon anggota DPR. Contoh kasusnya adalah Drs. H. Syafaruddin

Hasibuan, MA, selaku salah seorang pimpinan di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Dahlan Aek Hayuara Sibuhuan, pernah menjadi salah satu calon Bupati Padanglawas pada tahun 2009 yang lalu.

Keadaan itu kemungkinan dapat mempengaruhi kecenderungan santri dalam memilih organisasi sosial keagamaan dan politik di Sumatera Utara. Karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Kecenderungan Orientasi Pilihan Santri Terhadap Organisasi dan Politik Pada Pemilu 2014 di Sumatera Utara.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah sebagaimana yang diungkapkan dalam pembahasan sebelumnya, maka secara umum masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kecenderungan orientasi pilihan santri terhadap organisasi dan politik pada Pemilu 2014 di Sumatera Utara ?

Secara khusus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kecenderungan orientasi pilihan santri terhadap organisasi sosial keagamaan di Sumatera Utara ?

2. Bagaimanakah kecenderungan orientasi pilihan santri terhadap politik pada Pemilu 2014 ?
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan orientasi pilihan santri terhadap organisasi dan politik pada Pemilu 2014 di Sumatera Utara?

C. Pembatasan Masalah

Santri dalam penelitian ini dibatasi pada mereka yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren pada tingkat Aliyah yang berusia di atas 16 tahun. Dengan pertimbangan undang-undang Pemilu telah membatasi usia pemilih minimal 17 tahun. Diperkirakan santri pada tingkat Aliyah sebahagian sudah mencapai 17 tahun.

Organisasi yang dimaksudkan dalam peneitian ini ialah organisasi sosial keagamaan yang menurut Data Keagamaan Kanwil Kemenag SU Tahun 2010 ada sekitar **88 Ormas Islam** yang terdaftar di Provinsi Sumatera.

Kecenderungan pilihan politik dalam penelitian ini maknanya ialah kecenderungan memilih calon Presiden pada

Pemilu 2014, calon Kepala Daerah, calon DPR dan kecenderungan memilih partai politik.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum ialah untuk menganalisis kecenderungan orientasi pilihan santri terhadap organisasi dan politik pada Pemilu 2014 di Sumatera Utara ?

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Kecenderungan orientasi pilihan santri terhadap organisasi sosial keagamaan di Sumatera Utara.
2. Kecenderungan orientasi pilihan santri terhadap politik pada Pemilu 2014
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan orientasi pilihan santri terhadap organisasi dan politik pada Pemilu 2014 di Sumatera Utara.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang kecenderungan orientasi pilihan santri terhadap organisasi dan politik pada Pemilu 2014 di Sumatera Utara, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya pembinaan santri ke depan.

Penelitian ini juga bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu-ilmu sosial.

F. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan kajian teoretis yang berisikan Pendekatan Dalam Memahami Perilaku Memilih; Pendekatan komunikasi, Pendekatan sosiologis, Pendekatan psikologis, Pendekatan rasional. Perilaku Memilih Pada Masa Orde Baru dan Reformasi; Organisasi Partai Politik (OPP) pilihan pemilih, Karakteristik pemilih masing-masing OPP, Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik pemilih, Aspirasi politik pemilih. Gambaran Umum Organisasi

Sosial Kemasyarakatan di Sumatera Utara; Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Alwashliyah, Lain-lain. Gambaran Umum Organisasi Politik di Sumatera Utara; Keadaan OPP, Karakteristik OPP, Orientasi OPP. Gambaran Umum Pondok Pesantren di Sumatera Utara; Sejarah ringkas, Keadaan guru dan santri, Kurikulum dan Sarana pembelajaran.

Bab III terkait dengan metodologi penelitian yang berisikan Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Sumber Data, Instrumen Pengumpul Data, Teknik Analisis Data dan Uji Coba Instrumen penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi Gambaran Umum Pondok Pesantren Yang Dijadikan Sebagai Sampel Penelitian; Sejarah ringkas, Keadaan guru dan santri, Kurikulum, Sarana pembelajaran. Profil Responden Penelitian: Jenis kelamin, Usia, Semestre, Rangking, Suku dan pekerjaan orangtua. Kecenderungan Orientasi Pilihan Santri Terhadap Organisasi Sosial Keagamaan; Rasa simpati terhadap ormas tertentu, Ormas yang jadi pilihan, Pertimbangan dalam memilih ormas, Unsur yang menarik pada ormas yang dipilih,

Manfaat yang diperoleh memilih ormas tertentu, Kepuasan yang diperoleh memilih ormas tertentu. Kecenderungan Orientasi Pilihan Santri Terhadap Politik Pada Pemilu 2014; Rasa simpati terhadap OPP tertentu, Rasa simpati terhadap calon DPRD/DPD, Gubernur dan presiden tertentu. Kriteria OPP yang akan dipilih; Kriteria calon DPRD/DPD; gubernur dan presiden yang akan dipilih, OPP yang jadi pilihan, Calon DPRD/DPD, gubernur dan presiden yang jadi pilihan, Hal-hal yang menarik pada OPP yang dipilih, Hal-hal yang menarik pada calon yang dipilih, Manfaat yang diperoleh memilih OPP tertentu, Manfaat yang diperoleh memilih calon DPRD/DPD, gubernur dan presiden tertentu, Kepuasan yang diperoleh memilih OPP tertentu, Kepuasan yang diperoleh memilih calon DPRD/DPD, gubernur dan presiden tertentu. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Orientasi Pilihan Santri; Komunikasi interpersonal, Komunikasi kelompok, Komunikasi massa, Komunikasi organisasi, Faktor selain komunikasi dan Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V kesimpulan dan saran-saran yang berisikan Kesimpulan dan saran-saran.

BAB II KAJIAN TEORETIS

A. Pendekatan Dalam Memahami Perilaku Memilih

1. Pendekatan Komunikasi

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan pendekatan komunikasi, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian komunikasi. Menurut Harold Laswell, sebagaimana dikutip oleh Deddy Mulyana, komunikasi adalah proses pengoperan lambing-lambang, ide, gagasan, perasaan, dan pikiran kepada orang lain dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, siapa, mengatakan apa, dengan saluran/media apa, kepada siapa, dan pengaruhnya bagaimana (Dedy Mulyana, 2005: 62). Setiap unsur komunikasi ini memiliki peranan yang saling mendukung, sehingga dengan sendirinya proses komunikasi tersebut tercipta sebagai suatu sistem. Untuk menciptakan komunikasi yang efektif, pesan komunikasi harus jelas dan dimengerti oleh komunikan.

Dengan demikian, komunikasi melibatkan sejumlah orang, di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Jadi, yang terlibat dalam komunikasi itu adalah manusia. Karena itu, komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah komunikasi manusia atau dalam bahasa asing *human communication*, yang sering kali pula disebut komunikasi social atau *social communication*.

Komunikasi manusia sebagai singkatan dari komunikasi antarmanusia dinamakan komunikasi sosial atau komunikasi kemasyarakatan karena hanya pada manusia-manusia yang bermasyarakat terjadinya komunikasi (Amroeni Drajat, 2008: 61).

Jadi, yang dimaksud dari pendekatan komunikasi di sini adalah bagaimana melihat unsur-unsur komunikasi santri dalam hal kecenderungan memilih organisasi atau partai politik pada Pemilu 2014. Dilihat dari sisi ini, maka dapat ditelaah bagaimana santri berhubungan dengan lingkungan di mana ia belajar dan bertempat tinggal serta berinteraksi dengan siapa saja. Tentu saja, santri berinteraksi lebih sering di lingkungan pesantren tempat dia menimba ilmu, namun sebelum di pesantren mereka juga berasal dari beragam keluarga. Keluargalah lingkungan yang pertama kali dia berinteraksi secara intensif. Maka, pengaruh keluarga sudah barang tentu menentukan perilaku santri. Misalnya, jika santri berasal dari keluarga atau orangtuanya dalam lingkungan NU, maka perilaku dan tradisi NU-lah yang akan membawa perilakunya, demikian pula jika ortunya dari lingkungan Muhammadiyah, demikian seterusnya. Sebab, interaksi mereka dalam keluarga demikian intensif, sehingga komunikasi yang sering dilakukan dan dengan orang yang sangat dekat dan dihormati akan berpengaruh terhadap perilakunya. Termasuklah dalam hal ini dalam kecenderungannya dalam memilih sesuatu,

yakni memilih partai politik atau memilih pemimpin, seperti gubernur atau presiden.

2. Pendekatan Sosiologis

Maksud dari pendekatan sosiologis dalam hal memilih, menurut Muhammad Asfar, menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang. Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan dan sebagainya) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur keluarga dan sebagainya) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan organisasi atau politik (Muhammad Asfar, 2006: 138).

Boleh dikatakan bahwa pendekatan sosiologis dengan karakteristik sosial dan kelompok sosialnya hingga kini masih cukup signifikan untuk melihat perilaku pemilih. Hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Gerald Pomper dalam memerinci pengaruh pengelompokan social dalam studi *voting behavior* ke dalam dua variable, yaitu variabel predisposisi sosial-ekonomi keluarga pemilih dan predisposisi sosial ekonomi pemilih. Lebih lanjut menurutnya, predisposisi sosial ekonomi pemilih dan keluarga pemilih memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Preferensi-preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik ayah atau preferensi politik ibu akan

berpengaruh pada preferensi politik anak (Muhammad Asfar, 2006: 138).

Pendekatan sosiologis termasuk dalam melihat latar belakang kesukuan. Di Sumatera Utara masyarakatnya terdiri dari beberapa suku, di antaranya suku Jawa, Melayu, Padang, Batak (termasuk di dalamnya, Karo, Nias, Mandailing, Toba), Aceh, Cina, India dan Arab. Dengan demikian, tentu semua latar belakang sosiologis memiliki kemungkinan memiliki pengaruh dalam memberikan pilihannya terhadap organisasi atau partai ataupun pemimpin daerah.

3. Pendekatan Psikologis

Woodworth dan Marquis mendefinisikan psikologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas individu dari sejak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia dalam hubungannya dengan alam lingkungannya. Adapun sasaran psikologi adalah aktivitas rohani yang pada hakikatnya menimbulkan aktivitas jasmani itu (Robert, 1977: 7).

Menurut aliran filosofis seperti Plato dan Aristoteles, psikologi pada dasarnya dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya. Filsafat memang senantiasa menitikberatkan pembahasannya pada masalah hakikat segala sesuatu serta bagaimana sebab-sebabnya, termasuk juga masalah kejiwaan manusia. Itulah sebabnya terdapat aliran yang

disebut "Psikologi Filosofis" yang pernah timbul pada zaman Yunani dan Romawi. Adapun definisi yang diterapkan oleh aliran Behaviorisme menyatakan bahwa psikologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau meneliti tentang tingkah laku manusia atau binatang sebagaimana yang nampak secara lahiriah (Robert, 1986: 71).

Dengan mengemukakan beberapa contoh definisi psikologi tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pokok dalam psikologi ialah memahami seluk beluk kehidupan rohani yang merupakan kekuatan penggerak dalam segala aktivitas hidup lahiriyah dalam alam lingkungan. Perbedaan tentang definisi di atas menggambarkan tentang sudut pandang para ahli masing-masing dalam kajian atas perbahasan berkenaan dengan kehidupan kejiwaan. Walaupun perbedaan itu terjadi, namun satu sama lain merupakan penyempurna pada ilmu pengetahuan yang disebut "psikologi". Oleh karena itu, "jiwa" dapat dipelajari dari berbagai aspeknya dengan sistem pendekatan atau metodenya masing-masing yang berbeda pula.

Pendekatan psikologis yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana memahami latar belakang kejiwaan dari seorang santri dalam hal kecenderungannya memilih organisasi atau partai politik dalam Pemilu 2014. Dengan pendekatan psikologis, akan dapat

dilihat bagaimana latar belakang santri secara kejiwaan dalam memilih organisasi atau partai politik.

4. Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional dapat dipahami jika dalam suatu kelompok yang secara psikologis mempunyai persamaan karakteristik, namun di dalamnya terdapat variasi perilaku dalam hal memilih sesuatu (seperti, organisasi, partai politik dan sebagainya). Kasus tersebut tentunya perlu ditelaah secara komprehensif. Setidaknya ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan seseorang. Dalam kasus memilih partai politik atau kandidat legislative, dapat dikatakan bahwa para pemilih tidak hanya pasif tetapi juga aktif, tidak hanya terikat dengan karakteristik sosiologis, tetapi juga bebas bertindak. Faktor situasional tersebut antara lain isu-isu politik ataupun kandidat yang dicalonkan. Maka, isu-isu politik menjadi pertimbangan yang penting. Berdasarkan ini, para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Maknanya, dapat disimpulkan bahwa para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Inilah yang disebut dengan pendekatan rasional dalam memilih sesuatu, yang dalam hal ini memilih organisasi, partai politik atau kandidat legislatif.

Menurut Muhammad Asfar, penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku memilih oleh ilmuwan politik pada dasarnya diadaptasi dari ilmu Ekonomi. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik). Jika secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional, yakni menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam politik pun masyarakat akan dapat bertindak secara rasional, yaitu memberikan suara pilihannya (dalam partai politik) yang dianggap mendatangkan keuntungan dan kemaslahatan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian atau kemudharatan yang sekecil-kecilnya (Muhammad Asfar, 2006: 144-145).

Lebih lanjut, Muhammad Asfar, berkesimpulan bahwa diasumsikan para pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan. Begitu juga mampu menilai kandidat yang ditampilkan. Penilaian rasional terhadap isu politik atau kandidat ini bisa didasarkan pada jabatan, informasi, pribadi yang populer karena prestasi di bidang masing-masing, seperti seni, olahraga, film, organisasi, politik dan sebagainya (Ibid).

Pada saat agama mempengaruhi kehidupan seseorang, di saat yang sama corak pemikiran dan pemahaman keagamaan seseorang akan pula berimplikasi terhadap kehidupannya. Dalam perkembangannya, yang kemudian ikut membentuk sikap dan

perilaku seseorang, adalah corak dan pemahaman keagamaan. Politik, sebagai bagian dari perilaku manusia, adalah di antara bagian yang terkena konsekuensinya. Corak pemikiran dan pemahaman keagamaan seseorang dalam batas tertentu mempengaruhi perilaku politiknya. Signifikansi corak pemikiran dan pemahaman keagamaan terlihat antara lain dalam afiliasi dan saluran politik seseorang.

Adanya hubungan yang demikian kuat antara manusia dan agama, menyebabkan manusia disebut sebagai homo religius. Menurut Mircea Eliade, homo religius adalah tipe manusia yang hidup dalam suatu alam yang sakral, penuh dengan nilai-nilai religius dan dapat menikmati sakralitas yang ada dan tampak pada alam semesta. Pengalaman dan penghayatan akan yang suci atau realitas mutlak (ultimate reality) selanjutnya mempengaruhi, membentuk dan ikut menentukan corak serta cara hidupnya (Sastrapratedja, 1982: 38). Termasuk dalam hal ini memilih suatu komunitas lingkungannya atau memilih lainnya, misalnya berdimensi politik.

Studi yang dilakukan Afan Gaffar dengan judul *Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegomonic Party System*, mempermasalahkan mengapa seseorang secara konsisten memilih partai politik tertentu, meskipun salah satu partai lain, yaitu Golkar (partai pemerintah) melakukan intimidasi dan

menekan rakyat untuk memilihnya. Dalam studinya, Gaffar menggunakan pendekatan sosio-religius dari teorinya Geertz mengenai tiga varian agama di Indonesia, yaitu santri, abangan, dan priyayi sebagai variabel penjelas utama. Namun dalam hal ini Gaffar lebih menekankan pada varian abangan dan santri (Afan Gaffar, 1992: 4).

Dalam kesimpulannya dikatakan bahwa terdapat cara pandang dan orientasi politik yang berbeda antara komunitas abangan dan komunitas santri. Perbedaan ini menurutnya dapat dijelaskan dengan melihat pada proses sosialisasi politik di kalangan orang-orang desa. Dari analisis tersebut seseorang dapat melihat adanya kecenderungan yang berbeda. Kaum santri cenderung menggunakan lembaga-lembaga Islam, sementara kaum abangan lebih suka menggunakan sarana-sarana sekuler. Namun demikian, yang menonjol dalam proses sosialisasi politik itu adalah orang tua, terutama bapak. Kebanyakan dari responden menyatakan bahwa orang tua merupakan lembaga yang sangat penting dalam membentuk sikap dan perilaku mereka (Afan Gaffar, 1992: 189).

Secara historis penciptaan suatu identitas bersama sebagian didasarkan pada identitas agama. Sampai abad kesembilan belas, orang belum membuat pembedaan yang tegas antara yang spiritual dan sekuler, antara yang suci dan yang fana (profane). Pada umumnya, nilai-nilai sakral memberikan rasa solidaritas sosial

yang kuat. Dengan adanya komunitas-komunitas etnis yang relatif homogen dan munculnya negara-bangsa yang sekuler, dasar-dasar yang bercorak sakral belum juga hilang (Charles F. Andrain, 1992: 92).

J. Kristiadi melakukan studi yang sama tentang perilaku pemilih dengan judul Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia: Studi Kasus Tentang Perilaku Pemilih di Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Pada Pemilihan Umum 1971-1978. Studi yang dilakukan J. Kristiadi secara khusus ingin mencari penjelasan tentang pilihan (preferensi) politik seseorang dalam suasana kehidupan politik yang didominasi oleh Golkar. Permasalahan yang dikemukakannya adalah upaya untuk menemukan variabel-variabel yang mempengaruhi seseorang dalam mendukung dan kemudian memilih partai politik tertentu. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari variabel-variabel tersebut terhadap perilaku pemilih di kota dan desa (J. Kristiadi, 1996: 74).

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil studi J. Kristiadi adalah, sekalipun terjadi perubahan sosial yang cukup cepat selama kurang lebih dua dasawarsa tersebut, interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia masih paternalistik, terutama antara anggota dan pimpinan masyarakat. Pimpinan masyarakat, baik formal maupun informal, diperlakukan sebagai tokoh panutan. Di antara

tokoh-tokoh panutan itu, birokrat merupakan tokoh panutan yang memiliki pengaruh paling besar. Di kota figur panutan dari kalangan birokrasi adalah pegawai negeri, dan dari kalangan agama adalah mubaligh dan guru ngaji. Sementara itu di desa adalah pamong desa, dan dari kalangan agama adalah kyai (Ibid: 87).

Studi yang lebih khusus tentang perilaku pemilih dilakukan oleh M. Ridha Taqwa dengan judul Perilaku Politik Umat Islam: Kasus di Lekkong, Enrekang, 1971-1992. Dikatakan lebih khusus karena Ridha menjadikan umat Islam sebagai subyek pokoknya. Ridha melihat umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia yang memiliki sistem bertindak dan sistem hubungan sosial yang tersusun dalam istitusi syariah yang bersumberkan pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Karena itu umat Islam dalam menentukan sikap dan tindakannya selalu dikaitkan dengan ajaran Islam. Sementara itu Lekkong, yang masuk ke dalam wilayah kabupaten Enrekang, sebagai diketahui juga dikenal sebagai perkampungan Islam. Sebutan ini muncul tidak saja karena masyarakatnya dikenal fanatik, melainkan juga salah satunya karena Lekkong merupakan basis PPP (M. Ridha Taqwa, 1996: 36).

Permasalahan yang dikemukakan Ridha dalam studinya antara lain adalah mengapa terjadi perubahan perilaku memilih umat Islam pada tahun 1987 dan 1992, di mana Golkar meraih

kemenangan, sementara PPP makin turun. Apakah perubahan perilaku memilih ini disebabkan karena fanatisme keagamaan yang mulai surut, atau umat Islam makin mampu melihat realitas sosial dengan menghubungkannya dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakini?

Penelitian yang dilakukan Ridha menunjukkan telah terjadinya polarisasi dan perubahan perilaku memilih secara drastis dalam lima kali pemilu. Pada mulanya umat Islam merupakan pendukung utama partai Islam, tetapi kemudian secara bertahap afiliasi mereka beralih kepada partai lain yang tidak berlabel Islam. Golkar sebagai partai pemerintah semakin banyak mendapat dukungan umat Islam. Perubahan itu menurutnya tidak lepas dari faktor internal dan eksternal. Secara internal kondisi sosial ekonomi umat memang memberi peluang intervensi atau keterlibatan pihak luar. Pada saat yang sama partai Islam tidak mampu memberi jalan keluar bagi permasalahan umat. Secara eksternal, Golkar misalnya, mulai menggunakan lembaga-lembaga keislaman dalam kampanyenya. Maka tidak salah ketika umat Islam berpaling kepada Golkar. Studi Ridha secara umum menyimpulkan bahwa perilaku politik, khususnya perilaku memilih, merupakan fungsi dari sikap dan atau situasi sosial, ekonomi, politik, dan kepentingan umat Islam.

Studi yang lebih khusus dilakukan pula oleh Haidar Nashir dengan judul *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*³³. Permasalahan yang dikemukakan dalam studi Haidar adalah mengenai seberapa jauh kehadiran elit birokrasi dan elit politik mempengaruhi kekuasaan elit dalam kepemimpinan Muhammadiyah yang kemudian mempengaruhi polarisasi sikap politik dalam Muhammadiyah? Dan pola perilaku politik elit Muhammadiyah yang seperti apakah yang dominan dalam kenyataan sosiologis di lingkungan Muhammadiyah dan faktor-faktor apa pula yang mempengaruhinya? Kesimpulan yang diperoleh dari studi yang dilakukan Haidar menunjukkan bahwa elit Muhammadiyah di Pekajangan yang menduduki posisi formal dalam organisasi pada umumnya menunjukkan pola perilaku yang moderat dengan kecenderungan akomodasionis. Di luar pola akomodatif dijumpai pula sebagian kecil kecenderungan perilaku politik yang pragmatis dan idealis dengan tetap berada dalam semangat moderat. Tidak nampak di kalangan elit Muhammadiyah ini kecenderungan perilaku politik yang radikal dengan pola konfrontasi dan revolusioner (Ibid: 34).

B. Perilaku Memilih Pada Masa Orde Baru dan Reformasi

1. Organisasi Partai Politik (OPP) pilihan pemilih

Pemilu pertama sekali dilakukan di Indonesia pada tahun 1955 yang diikuti oleh 28 OPP. Secara umum OPP pada tahun ini berbasis agama dan nasional serta komunis. OPP yang berbasis agama diantaranya Masyumi, NU, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Persatuan Tarbiyah Islam (dari basis Islam). Ada juga yang berbasis agama Kristen, seperti Partai Katholik dan Parkindo. Sedangkan parta berbasis nasional diantaranya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Rakyat Indoneisa (PRI), Partai Demokrasi Rakyat (PDR) dan Partai Rakyat Nasional (PRN). (Asfar, 2006: 67).

Lahirnya keempat partai besar itu merupakan representasi idiologi yang dianut oleh bangsa Indonesia pada saat itu. PNI mewakili idiologi nasionalis. Masyumi dan NU mewakili idiologi Islam, sedangkan PKI mewakili idiologi komunis. Sedangkan partai yang mewakili idiologi Kristen (Partai Katholik dan Parkindo) tidak mendapatkan suara yang signifikan. Adapun partai-partai yang lain, perolehan suaranya tidak mencapai 2%.

Pemilu Masa Orde Baru

Pemilu yang diikuti oleh 37.875.299 orang itu kemudian melahirkan empat parta besar dengan perolehan suara sebagai berikut :

Hasil Pemilu 1955

No	Partai	Suara (orang	Persentasi(%)
----	--------	--------------	---------------

1	PNI	8.434.653	22,32
2	Masyumi	7.903.886	20,92
3	NU	6.955.141	18,41
4	PKI	6.176.914	16,36
5	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,86
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.325	2,66
7	Partai Katholik	770.740	2,04
	Lain-lain		
	Jumlah	37.875.299	100

Sumber: Biro Humas KPU : Pemilu Indonesia Dalam Angka dan fakta (Jakarta: KPU, 2000: 18).

Pemilu selanjutnya terjadi pada masa kepresidenan Soeharto, yaitu pada tahun 1971. Pada saat itu pemilu diikuti oleh tidak kurang dari 10 OPP dan dihadiri oleh 54.696.387 pemilih. Perolehan suara pada pemilu yang pertama sekali dilakukan pada masa orde baru itu sebagai berikut :

No	Partai	Suara (orang)	Persentasi(%)
1	Golkar	34348613	62,82
2	NU	1021650	18,68
3	Parmusi (Reingkarnasi Masyumi)	3930746	6,93
4	PNI	3793266	5,38
5	PSII	1308297	2,39
6	Parkindo	733359	1,34
7	Katholik	603740	1,10
8	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	381309	0,69

9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	338403	0,61
10	MURBA	48126	0,08
	Jumlah	37.875.299	100

Sumber: Biro Humas KPU : Pemilu Indonesia Dalam Angka dan fakta (Jakarta: KPU, 2000: 52).

Pada pemilu yang diadakan pada tanggal 3 Juli 1971 ini, Golkar adalah pendatang baru yang merupakan partai yang dibangun oleh Soeharto. Banyak faktor yang menyebabkan keberhasilan Golkar menjadi pemenang pemilu. Diantaranya adalah karena kedudukan pendiri partai sebagai presiden. Faktor lainnya adalah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1969 (Permen 12) yang membuat setiap PNS dan keluarganya tidak memiliki pilihan lain kecuali Golkar. Strategi ini sebenarnya pernah diterapkan oleh PNI pada pemilu 1955.

Masyumi sebagai pemenang ke dua pada pemilu tahun 1955, merubah namanya menjadi Parmusi karena berbagai macam faktor politik, diantaranya dituduh terlibat dalam pemberontakan DI/TII. Sedangkan PKI tidak lagi menjadi OPP pada tahun 1971 karena telah dibubarkan berkaitan pemberotakannya yang dilakukan pada tahun 1965.

Pada perjalanan OPP selanjutnya di tanggal 10 Januari 1973, lima partai yang berhaluan nasionalis dan Kristen (PNI, IPKI, Murba, Parkindo dan Katholik) melebur menjadi satu dengan

nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sedangkan partai berhaluan Islam (Parmusi, NU, PSII dan Perti) bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dari sejak itu sampai tahun 1997, pemilu di Indonesia hanya diikuti oleh 3 OPP, yaitu Golkar (partai penguasa) PPP dan PDI.

Selama masa orde baru, Golkar terus menjadi pemenang di dalam pemilu dengan perolehan suara antara 60-an dan 70-an% suara. Sedangkan PPP sejak terbentuk sampai berakhir masa orde baru perolehannya antara 16% sampai 29%. PDI kisaran suara yang diperoleh antara 3% sampai 11% saja. Suara terendah dari PDI (3%) diperoleh pada pemilu 1997, dimana sebelumnya terjadi konflik yang cukup hebat di tubuh PDI. Konflik itu kemudian melahirkan PDI pimpinan Suryadi (OPP yang diakui pemerintah Orde Baru) dan PDI pimpinan Megawati, yang kemudian menjadi nama PDI-P.

Pemilu Pasca Orde Baru

Setelah runtuhnya pemerintahan orde baru yang ditandai runtuhnya kekuasaan Soeharto, pemilu kembali diikuti oleh puluhan OPP.

Pemilu 1999 adalah pemilu pertama yang diikuti oleh lebih dari 3 partai sejak masa orde baru. Euforia pemilu sangat terlihat dengan banyaknya jumlah peserta pemilu. Tercatat pada tahun itu Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yang berhak mengikuti pemilu mencapai 48 partai.

Pada pemilu ini diberikan kebebasan sebebasnya bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Bagi para pegawai negeri atau karyawan perkebunan tidak ada lagi paksaan atau penekanan untuk memilih partai tertentu. Pada sisi yang lain pemilu ini juga memberi peluang bagi OPP mana saja menjadi pemenang pada pemilu, yang sebelumnya pada masa orde baru pemenang pemilu sudah pasti Golkar sebagai partai penguasa. Adapun partai lain (PPP dan PDI) hanya sebatas pelengkap persyaratan untuk dikatakan sebagai negara demokratis.

Hasil Pemilu 1999

No	Partai	Suara (orang)	Persentase(%)
1	PDIP	35689073	33,74
2	GOLKAR	23741749	22,44
3	PKB	13336982	12,61
4	PPP	11329905	10,71
5	PAN	7528956	7,12
6	PBB	2049708	1,94
7	PK	1436565	1,36
	Lain-lain		
		105.786.661	

(Sumber: Asfar, 2006: 129).

PDIP sebagai pemenang pemilu pada tahun 1999 adalah PDI pimpinan Megawati Soekarno Putri. PDI pimpinan Suryadi sendiri pada pemilu ini menduduki urutan 12 dengan perolehan suara 345.720. PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) sebagai pemenang ke tiga adalah partai yang kelahirannya dibidani oleh

Nahdatul Ulama (NU). Partai berbasiskan warga NU yang lain juga ada, yaitu Partai Nahdatul Ummah (PNU). Namun peroleh suaranya tidak signifikan, hanya 679179 suara. PKB dinilai sebagai representasi warga NU, karena PKB didirikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai cucu dari KH. Hasyim Asyhari sebagai pendiri NU.

PBB (Partai Bintang Bulan) karena perolehan suaranya tidak mencapai 2% dari jumlah pemilih, maka tidak secara otomatis dapat menjadi peserta pemilu selanjutnya. Partai ini harus mengulang kembali mendaftar seperti peserta baru dengan harus mengganti namanya. Kemudian Partai Bintang Bulan pada pemilu 2004 merubah namanya menjadi Partai Bulan Bintang dengan singkatan tetap PBB. Demikian juga dengan Partai Keadilan, pada pemilu 2004 merubah namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jadi kedua partai ini meski menjadi partai baru pada pemilu 2004, namun dengan basis massa yang tidak jauh berbeda.

Pada pemilu 2004, peserta pemilu menurun menjadi 24 parta dengan terjadi perubahan peroleh suara yang signifikan. Adapun peroleh suaranya sebagai berikut:

Hasil perolehan suara pada pemilu tahun 2004

No	Partai	Suara (orang)	Persentasi(%)
1	GOLKAR	24480757	21,58
2	PDIP	21026629	18,53
3	PKB	11989564	10,57

4	PPP	9248764	8,15
5	PD	8455225	7,45
6	PK/PKS	8325020	7,34
7	PAN	7303324	6,44
8	PBB	2970487	2,62
9	PBR	2764998	2,44
10	PDS	2414254	2,13
11	PKPB	2399290	2,11
	Dan lain-lain		
		113462414	

(Sumber: Asfar, 2006: 127).

Pada sisi lain 13 partai lainnya perolehan suaranya tidak mencapai 2%. Hal yang demikian lebih jelasnya dapat dilihat dalam keterangan berikut:

Tahun 2009, 22 partai

No	Partai	Suara (orang)	Persentasi(%)
1	PD		20,29
2	GOLKAR		14,85
3	PDIP		14,07
4	PKS		7,78
5	PAN		6,04
6	PPP		5,27
7	PKB		5,18
8	Gerindra		4,18
9	Hanura		3,49

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik pemilih

Banyak faktor pemilih menjatuhkan pilihannya pada OPP. Diantara pertimbangan-pertimbangan itu adalah program partai, ketokohan, pengaruh orang tua, agama dan lainnya. Dari hasil penelitian Muhammad Asfar yang dilakukan terhadap para pemilih di Jawa Timur dengan responden sebanyak 700 orang, tergambar faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan pilihan OPP. Datanya sebagai berikut :

No	Pertimbangan	Arah Pertimbangan (dalam persen)		
		Sgt dipertimb.	Dipertimbangkan	Tdk. Dipert
	Program partai	34,7	58,4	3,9
	Tokoh	34	54,1	11,7
	Orang tua	12	40,3	47,4
	Agama	25,6	43,3	31
	Kseimbangan. poltk	18,4	56,1	25,3
	Kseimbangan.aspirasi	32,3	58	9,5
	Jurkam	18,1	52	29,7
	Fatwa ulama	22,1	42,1	35,8

(Sumber: Asfar, 2006: 127).

Terlihat bahwa hampir semua pemilih memperhatikan program parta sebagai pertimbangan. Hanya ada 3,9% saja dari responden yang tidak memperhatikan program-program partai. Faktor ke dua adalah keseimbangan aspirasi. Hal ini dapat dilihat

bahwa pemilih yang tidak memperhatikan keseimbangan aspirasi hanya 9,5% saja. Data-data ini memberikan gambaran bahwa ternyata ikatan sosiologis dan agama kurang menjadi pertimbangan bagi pemilih. Para pemilih lebih mendasarkan pada pertimbangan rasional.

Faktor tokoh meski tidak begitu kuat, tetapi juga menjadi pertimbangan pemilih. Setidaknya ada 88% responden yang menjadikan tokoh di partai menjadi pertimbangan memilih partai itu. Faktor ini pula yang mampu mengangkat jumlah pemilih dari Partai Demokrat (PD) sengan tokohnya Susilo Bambang Yodoyono dan dan PDIP dengan tokoh Megawati.

Sedangkan pertimbangan orang tua terlihat paling sedikit yang menjadikannya sebagai bahan pertimbangan. Hal ini berarti di dalam satu keluarga besar kemungkinan pilihan mereka berbeda-beda terhadap OPP. Hal ini berarti juga tidak ada yang bisa menjamin bahwa pilihan orang lain sesuai dengan pilihannya. Karena orang tuanya saja sebagai orang yang paling dekat tidak bisa menjamin apa pilihan anaknya, apalagi orang lain.

3. Aspirasi politik pemilih

Berdasarkan hasil peneitian di atas, masing-masing OPP jika ingin mendulang suara yang banyak, maka harus memberikan perhatian pada program partai dan aspirasi politik konstituen. Aspirasi politik itu seringkali diwujudkan dengan bentuk memilih

OPP yang dinilai dapat memperjuangkan aspirasi politiknya. Prilaku politik ini selalu disebut dengan istilah *prospective voters* (calon pemberi suara) (Helmut, 1996:776).

Untuk mengetahui aspirasi politik seseorang, dapat dilihat dari penilaian pemilih terhadap objek tuntutan politik, apakah sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, atau masih perlu ditangani dengan serius.

Penelitian Muhammad Asfar terhadap pemilih di Jawa Timur menunjukkan data-data tentang persoalan-persoalan yang sudah dan belum ditangani oleh pemerintah sebagai berikut :

No	Persoalan	Penanganan Pemerintah (dalam persen)	
		Sudah	Belum perlu ditangani
1	Kolusi/korupsi	23,0	76,3
2	Kesenjangan sosial	26,3	73,4
3	Pengangguran	28,9	71,0
4	Monopoli	31,7	67,9
5	Keadilan	35,9	64,0
6	HAM	37,9	61,9
7	Dokrasi	41,3	58,3
8	Pertahanan	42,0	57,9
9	Kriminalitas	45,3	54,4
0	Konglomerasi	45,9	53,6
1	Utang luar negeri	36,9	63,0
2	Kemiskinan	47,9	52,0
3	Kenakalan remaja	48,0	51,7
4	Harga pupuk	55,4	44,3
5	Tarif angkutan	55,7	44,3

6	Pembangunan desa	57,0	42,6
7	Tata niaga	52,1	47,4
8	Stabilitas ekonomi	65,0	34,7
9	Pendidikan	66,9	33,0
0	Pangan	67,7	32,0
1	Kependudukan	67,9	31,7
2	Keagamaan	72,7	27,1

(Asfar, 2006: 182)

Data penelitian di atas memberikan informasi bahwa bidang-bidang yang belum ditangan dengan baik oleh pemerintah adalah kolusi dan korupsi. Hanya ada 23% yang merasa puas dengan apa yang telah dilakukan pemerintah. Sedangkan 76,3% pemilih menyebutkan masalah kolusi dan korupsi belum ditangani dengan baik.

Peringkat ke dua adalah kesenjangan sosial. Setidaknya ada 73,4% pemilih menilai pemerintah belum serius menangani masalah kesenjangan sosial.

Oleh karena itu isu-isu pemberantasan kolusi dan korupsi serta kesenjangan sosial akan menjadi jualan yang menarik bagi pemilih. Partai-partai yang telah menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dan berupaya mengentaskan kesenjangan sosial, akan banyak diminati oleh pemilih.

Demikian sebaliknya, isu-isu tentang pembangunan kehidupan keagamaan dan masalah kependudukan adalah isu-isu yang kurang menarik bagi para pemilih. Hal ini karena pemilih

menilai sektir agama dan kependudukan telah diselesaikan dengan baik oleh pemerintah sebelumnya.

C. Gambaran Umum Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Sumatera Utara

1. Nahdlatul Ulama (NU)

a. Latar Belakang Lahirnya NU

Di dalam tulisannya Hemlan Elhany yang berjudul: "Karakteristik Dakwah NU dan Muhammadiyah Dalam Pengembangan Masyarakat Islam Lampung" sebagaimana yang ditulis pada *Jurnal TAPIS* Vol. 7 No. 01 Januari (2007: 38) dikemukakan bahwa pengertian Nahdlatul Ulama yang semula hanya sebagai "kebangkitan ulama-ulama" dengan ditandai banyaknya pesantren yang dikembangkan sebagai wadahnya, semakin diperluas menjadi perkumpulan umat Islam secara umum, dan pengikutnya diarahkan untuk mengikuti pola beribadah menurut yang telah digariskan oleh lembaga tersebut. NU yang diartikan sebagai kebangkitan ulama-ulama juga tidak terlepas dari peran beberapa ulama yang membidani kelahirannya pada tanggal 31 Januari 1926, yaitu selain Syekh Hasyim Asy'ari sendiri juga ada ulama lain dari Jawa Timur (yang berarti tempat awal berdirinya lembaga ini adalah di Surabaya) yakni K. H. Wahab Hasbullah dan Bisri Sansuri (Zada & Sjadzili (ed.), 2010: 4).

Sebagaimana dikenal dalam Islam bahwa ulama merupakan “pengganti” (pewaris) para Nabi dalam mengawal keagamaan umat, maka oleh karena itu pulalah perkumpulan ini (NU) lebih menitikberatkan ajarannya pada pemahaman keagamaan yang mengharapkan beribadah sesuai dengan paham *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* (yang disingkat dengan *aswaja*).

Di Indonesia, istilah ‘ulama’ atau alim ‘ulama’ yang semula dimasukkan sebagai bentuk jamak, berubah pengertiannya menjadi bentuk tunggal. Pengertian ‘ulama’ juga menjadi lebih sempit, karena diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan ilmu keagamaan dalam bidang fikih. Di Indonesia, ‘ulama’ identik dengan *fqaha*. Bahkan dalam pengertian awam sehari-hari, ‘ulama’ adalah *fqaha* dalam bidang ibadah saja. Betapapun semakin sempitnya pengertian ‘ulama’ dari dahulu sampai sekarang, namun ciri khasnya tetap tidak bisa dilepaskan, yakni ilmu pengetahuan yang dimilikinya itu diajarkan dalam rangka *khasyah* (adanya rasa takut atau tunduk) kepada Allah Swt (Makhfuz, tt.: 220). Oleh karena itu, seorang ‘ulama’ harus orang Islam. Seseorang yang baru memiliki ilmu keagamaan (keislaman) seperti para ahli ketimuran (orientalis) tidak dikatakan ‘ulama’ (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Vol. 5, 1994: 121).

Dijelaskan di dalam *Qanun Asasi Li Jami'ati Nahdlatul Ulama*, K. H. Hasyim Asy'ari sangat prihatin terhadap munculnya

gerakan keagamaan yang mengatasnamakan puritanisme Islam dengan menyerukan kembali kepada Alquran, padahal menurutnya justru mereka menyebarkan bid'ah di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hal itulah dalam doktrin NU disebutkan bahwa lembaga ini berpegang teguh pada ajaran salah satu dari empat mazhab fikih (Maryadi & Aly (ed.), 2000: 24).

Jika diruntut ke belakang, sebenarnya kelahiran NU bermula dari bukan saja dilatari hanya kepentingan sosial keagamaan saja, namun juga sangat dekat dengan keprihatinan terhadap politik ketika itu. Oleh karena itu, embrio organisasi ini sudah ada sejak pada tahun 1914, di mana berdirinya organisasi Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan, Nahdlatul Tujjar maupun Komite Hijaz. Kesemuanya merupakan bentuk reaksi terhadap situasi, kondisi dan perkembangan politik maupun sosial keagamaan ketika itu (Harun, 1995: 58).

b. Peran Sosial Keagamaan NU

Untuk memainkan peranannya di tengah-tengah kehidupan sosial dan keagamaan, NU tentu lebih konsern terhadap program yang berorientasi ke arah tersebut. Di atas telah dikemukakan dalam bidang keagamaan NU menitikberatkan ajarannya pada pemahaman keagamaan yang mengharapkan beribadah sesuai dengan paham *ahl al-sunnah wa al-jama'ah (aswaja)*. Dapat digambarkan bahwa K. H. Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU

meyakini perlunya kembali pada ajaran *Al-Salaf al-Shalih*; yang tergabung dalam apa yang disebut dengan *Al-Sawad Al-A'dham*, yaitu mereka yang konsisten memegang kebenaran (*Ahli al-Haq*) adalah mereka yang menjadi pengikut Imam Mazhab yang Empat (*Al-Madzahib al-Arba'ah*). Oleh karena itu perlulah mengikuti salah satu Mazhab yang Empat, sebab dengan mengikuti satu mazhab tertentu akan lebih dapat terfokus pada satu nilai kebenaran yang hakiki, lebih dapat memahami secara mendalam dan akan lebih memudahkan dalam mengimplementasikan amalan. Dengan menentukan pada satu pilihan mazhab inilah berarti ia telah pula melakukan jalan yang juga ditempuh oleh *Al-Salaafuna al Shaalih* (Risalah Aswaja Syeikh Hasyim Asy'ari, dalam <http://pcnucilacap.com/risalah-aswaja-syeikh-hasyim-asyari-bagian-3/>).

Paham keagamaan di atas tentu tidak terlepas dari peran tokoh pendirinya, K. H. Hasyim Asy'ari yang mendapat pengalaman dan pendidikan di Jazirah Arab, Mekah. Oleh karena itu, paham keagamaan *al-salaaf al-shaalih* menjadi bagian penting dari ajarannya. Berdasarkan hal itu pula beliau dianggap sebagai sosok penyeimbang (transisi) antara paham tradisional dan modern yang berkembang saat itu. Tentang hal ini dapat dikutip tulisan yang dieditori Charles Kurzman (2002: 365) sebagai berikut:

Asy'ari was transitional figure between tradisionalism and modernism in Muslim religious thought. He held tightly to the importance of the traditional Muslim schools of law, starting that they held the vital truth about Islamic doctrine. At the same time, he left room for new interpretation by scholars who were appropriately trained and who stayed within traditional bounds. He introduced new teaching methods in his schools and encouraged his son and his favorite students to undertake further experimentation in subject matter and styles of teaching. He attempted to seek reconciliation with modernist, but was usually rebuffed by them; at the same time he apparently convinced many in the Muslim community at large of his sincerity.

Di sisi lain kehadiran NU dalam bidang-bidang kemasyarakatan menjadi sangat penting, sebab ternyata gonjang-ganjing politik yang terjadi di tubuh NU mengundang pertanyaan serius mengenai eksistensinya sebagai *civil society*. Banyak orang yang meragukan peran tersebut apabila organisasi ini terseret ke arus politik praktis (Zada & Sjadzili (ed.), 2010: 38). Oleh karena itu, arus keinginan untuk kembali ke *Khittah* NU tahun 1926 demikian gencarnya didengungkan. Kenyataan itu telah terjawab sudah saat Muktamar ke-27 di Situbondo pada tanggal 12 Desember 1984.

Di dalam *Khitthah Nahdlatul Ulama* sebagai hasil Keputusan Muktamar Ke-27 NU di Situbondo, 12 Desember 1984, poin 6 tentang "Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan Nahdlatul Ulama" disebutkan:

Sejak berdirinya, Nahdlatul Ulama memilih beberapa bidang utama kegiatannya sebagai ikhtiar mewujudkan cita-cita dan tujuan berdirinya, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan.

Ikhtiar-ikhtiar tersebut adalah :

1. Peningkatan silaturahmi (komunikasi) inter-relasi antar Ulama. *(dalam statoeten Nahdlatuol Oelama 1926 disebutkan: mengadakan perhoeboengan diantara oelama-oelama jang bermadzhab).*
2. Peningkatan kegiatan di bidang keilmuan / pengkajian / pendidikan. *(dalam statoeten Nahdlatuol Oelama 1926 disebutkan: memeriksa kitab-kitab sebelomnya dipakai oentoek mengadjar, soepaja diketahoei apakah itoe daripada kitab-kitab ahli soennah wal djamaah ataoe kitab-kitab ahli bid'ah; memperbanjak madrasah-madrasah jang berdasar agama Islam).*
3. Peningkatan kegiatan penyiaran Islam, pembangunan sarana-sarana peribadatan dan pelayanan sosial. *(dalam statoeten Nahdlatuol Oelama 1926 diseboetkan: Menjiarkan agama Islam dengan djalan apa sadja jang halal, memperhatikan hal-hal yang berhoeboengan dengan masdjid-masdjid, soeraoe-soeraoe dan pondokpondok,*

begitu djuga dengan hal ihwalnya anak-anak jatim dan orang-orang jang fakir miskin).

4. Peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah. *(dalam statoeten Nahdlatol Oelama 1926 diseboetkan: mendirikan badan-badan oentoek masyarakat, terutama dengan memadjoekan oeroesan pertanian, pemiagaan dan peroesahaan jang tiada dilarang oleh sjara' agama Islam).*

Kegiatan-kegiatan yang dipilih oleh Nahdlatul Ulama pada awal berdiri dan khidmahnya menunjukkan pandangan dasar yang peka terhadap pentingnya terus-menerus dibina hubungan dan komunikasi antar para Ulama sebagai pemimpin masyarakat serta adanya keperihatinan atas nasib manusia yang terjerat oleh keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Sejak semula Nahdlatul Ulama melihat masalah ini sebagai bidang garapan yang harus dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan nyata.

Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan mendasari kegiatan Nahdlatul Ulama dari masa ke masa dengan tujuan untuk melakukan perbaikan, perubahan dan pembaharuan masyarakat, terutama dengan mendorong swadaya masyarakat sendiri.

Nahdlatul Ulama sejak semula meyakini bahwa persatuan dan kesatuan para Ulama dan pengikutnya, masalah pendidikan, dakwah Islamiyah, kegiatan sosial serta perekonomian adalah

masalah yang tidak bisa dipisahkan untuk mengubah masyarakat yang terbelakang, menjadi sejahtera dan berakhlak mulia.

Pilihan kegiatan Nahdlatul Ulama tersebut sekaligus menumbuhkan partisipatif terhadap setiap usaha yang bertujuan membawa masyarakat kepada kehidupan yang maslahat.

Setiap kegiatan Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan manusia dipandang sebagai perwujudan amal ibadah yang didasarkan pada faham keagamaan yang dianut (Kembali ke *Khittah* NU sebagai Hasil Keputusan Mukhtar Ke-27 NU di Situbondo, 12 Desember 1984, poin 6, dalam <http://pcnucilacap.com/khittah-nahdlatul-ulama-nu>).

Setelah kembali ke *Khittah* NU 1926 yang dicetuskan pada tanggal 12 Desember 1984 sebagaimana di atas ternyata NU patut diacungi jempol dalam hal peranannya di bidang sosial kemasyarakatan. Mengenai hal ini Agus Muhammad dalam tulisannya "Masa Depan NU Sebagai Civil Society" menyebutkan:

Diakui atau tidak, NU pernah memainkan fungsi-fungsi *civil society* yang mengesankan terutama setelah kembali ke *Khittah* 1926 dalam momentum Mukhtar ke-27 di Situbondo tahun 1984 yang menobatkan Gus Dur sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU.

Di bawah kepemimpinan Gus Dur, NU menjadi organisasi yang betul-betul melepaskan diri dari negara dan menempatkan diri

sebagai instrumen penting *civil society*. Ini tentu tidak lepas dari fenomena *booming* sarjana pada dekade 1980-an yang melahirkan generasi baru NU, yakni generasi yang matang di bawah represi Orde Baru sekaligus menjadi penyokong utama gerakan kultural yang dimotori Gus Dur (Zada & Sjadzili (ed.), 2010: 39).

c. Peran Politik NU

Reaksi terhadap situasi, kondisi dan perkembangan politik maupun sosial keagamaan yang diperankan oleh pendiri-pendiri NU dengan cikalnya organisasi Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan, Nahdlatul Tujjar dan Komite Hijaz tersebut bukan saja di dalam negeri (Indonesia) saja tetapi juga di dunia Islam secara umum. Oleh karena itu, lembaga ini demikian cepatnya dikenal, baik di Indonesia maupun luar negeri, khususnya negara-negara Arab. Di dalam negeri sendiri, kelahiran NU merupakan reaksi terhadap berkembangnya Muhammadiyah dan Sarekat Islam. Sedangkan di luar negeri paling tidak dapat dilihat sebagai reaksi terhadap dua hal, *pertama*, tepatnya pada Februari 1945 M, Pemerintahan Kemal Pasya di Turki menghapus jabatan Khalifah. *Kedua*, kekalahan penguasa Makkah, Syarif Husain oleh Abdul Aziz bin Sa'ud yang berpaham Wahabi, sekte puritan yang paling dogmatis dalam Islam (Bruinessen, 1999: 26).

Pada awalnya, kendati kelahiran NU dilatari dengan aspek politik, terutama politik luar negeri, tetapi bukan untuk tujuan

politik kekuasaan, melainkan politik (keagamaan) kerakyatan. Sebab yang dijalankan adalah melindungi praktek dan pemikiran keagamaan yang dekat dengan tradisi lokal. Inilah tindakan politik tertinggi NU yang disebut dengan tindakan politik kerakyatan. Sedangkan politik kenegaraan belum muncul sebab pada tahun kelahirannya (1926) perbincangan hangat tentang negara belum ada (Zada & Sjadzili (ed.), 2010: 4). Politik kenegaraan NU baru muncul pada saat mendukung Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk tidak mencantumkan Piagam Jakarta di dalam UUD 1945 sebagai dasar negara. Keterlibatan NU dalam politik praktis berlanjut hingga ke tahun 1950-an, di mana organisasi ini menjadi organisasi penyangga Masyumi. Bahkan bukan hanya dukungan secara organisatoris tetapi juga tokoh-tokoh NU terlibat langsung dalam perebutan kekuasaan baik untuk jabatan dalam tubuh partai maupun di luar partai yakni eksekutif. Puncak politik praktis NU adalah ketika menjadi partai politik (1952) setelah partai Masyumi pecah. Politik kekuasaan masa ini akhirnya harus berbuntut dengan perpecahan. Akan tetapi memang NU sekalipun sudah kembali ke *Khittah* 1926 yang menyatakan:

Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga, setiap warga Nahdlatul Ulama adalah warga negara yang mempunyai hak-hak politiknya harus dilakukan secara

bertanggung jawab sehingga dengan demikian dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hukum dan mampu mengembangkan mekanisme musyawarah dan mufakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama (*Khittah Nahdlatul Ulama* ini merupakan Hasil Keputusan Mukhtamar Ke-27 NU di Situbondo, 12 Desember 1984, poin 8 tentang Nahdlatul Ulama dan Kehidupan Berbangsa).

Namun bukan berarti warga NU tidak terlibat dalam politik praktis, sebab amanat *Khittah* NU hanyalah secara organisatoris ketidakterlibatannya dengan partai politik manapun. Sementara orang-orang NU tentu tidak boleh dipasung hak-hak politiknya. Oleh karena itulah ketika Presiden Suharto menetapkan tiga partai politik yang berhak ikut serta dalam pemilu semasa Orde Baru (yaitu PPP, Golkar dan PDI), maka NU menjadi penyumbang suara—jika tidak pendukung—utama PPP. Di samping itu juga ketika K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi calon presiden tahun 1999 dan pencalonan K. H. Hasyim Muzadi oleh PDI-P untuk wakil presiden pada pemilu presiden 5 Juli 2004, tentulah didukung oleh mayoritas orang-orang NU (Zada & Sjadzili (ed.), 2010: 6).

Dengan demikian, pasca-Khittah 1926 dalam tubuh NU pada prinsipnya secara organisatoris tidak lagi berafiliasi dengan partai politik tertentu, akan tetapi pengurus maupun anggota NU tetap banyak yang berkiprah di dunia politik praktis. Harus diakui

secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kegagalannya dalam bidang politik kerakyatan sebagaimana yang melatari lahirnya organisasi ini pada tahun 1926. Bahkan dengan keterlibatan orang-orang NU di kancah politik praktis menjadi penyebab rawannya perpecahan dan nuansa konflik di tubuh organisasi.

2. Muhammadiyah

a. Latar Belakang Kelahiran Muhammadiyah

Lahirnya pemikiran modern di awal abad ke dua puluh tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial, politik dan keagamaan yang umumnya dihadapi umat Islam saat itu. Kyai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh pertama kali yang mencoba memenuhi tuntutan itu dengan meletakkan dasar-dasar pemikiran Muhammadiyah. Beliau putra ketiga Kyai Haji Abu Bakar, salah seorang khatib di Masjid Kesultanan Yogyakarta. Dilahirkan pada tahun 1258 H/1868 M di daerah Kauman, salah satu di antara dua daerah lainnya, Karangjajen dan Kotagede, yang dikatakan sebagai daerah yang mempunyai jiwa keislaman yang kuat hingga saat ini (Lubis, 1993: 2).

Pendidikan Dahlan tampaknya mengikuti pola pendidikan tradisional yang diawali dengan mempelajari Alquran, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari kitab-kitab fikih, *nahwu*, tafsir dan

sebagainya di lembaga pendidikan yang terdapat di Yogyakarta. Kegiatan dalam organisasi telah dimulainya sebelum ia mendirikan Muhammadiyah. Banyak organisasi yang dimasukinya baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat keagamaan.

Kyai Haji Ahmad Dahlan sebagai tokoh pendiri gerakan Muhammadiyah memang memberikan keteladanan dalam hal dan perhatian terhadap pelaksanaan amal di tengah kehidupan sehari-hari. Penulis barat, seperti Benda menulis tentang kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan yaitu: "pekerjaan dakwah yang teratur membawakan syiar Islam yang sudah di persegar ke daerah-daerah pedesaan, organisasi-organisasi pemuda dan wanita, klinik-klinik dan rumah-rumah wakaf dan sekolah-sekolah yang semuanya menunjukkan sejauhmana Muhammadiyah secara berhasil telah mengambil alih metode-metode barat" (Vongrenebaun, 1983: 329).

b. Peran Sosial Keagamaan Muhammadiyah

Usaha keras yang dirintis Ahmad Dahlan akhirnya berbuah juga. Muhammadiyah menjadi pelopor organisasi sosial kemasyarakatan yang berbasiskan agama, mempunyai corak pembaruan yang dinamis. Karena itu, persyarikatan Muhammadiyah itu, awalnya, lebih diminati oleh orang-orang perkotaan dan yang berpendidikan.

Tapi, seiring dengan meluasnya lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh Muhammadiyah, sampai pelosok-pelosok, Ormas Islam yang didirikan oleh Ahmad Dahlan itu kini tidak hanya dikenal sebagai organisasi milik orang perkotaan saja. **Dikhotomi kota dan desa tak lagi relevan buat Muhammadiyah**, kini. Sebelas tahun setelah Muhammadiyah berdiri, tepatnya pada 23 Februari 1923, Ahmad Dahlan meninggal dunia, juga di Kauman, Yogyakarta, tempat dimana ia pernah dilahirkan pada tahun 1868.

Pada tahun 1911 Kyai Haji Ahmad Dahlan juga aktif dalam berbagai kegiatan Syarikat Islam, bahkan beliau dan Kyai Haji Mas Mansur diangkat sebagai penasihat Syarikat Islam. Dan beliau juga mendirikan sekolah Muhammadiyah, dalam sekolah tersebut dimasukkan pula beberapa pelajaran yang lazim diajarkan di sekolah-sekolah Belanda, seperti: ilmu bumi, ilmu hayat dan sebagainya. Dengan murid tidak begitu banyak jadilah sekolah Muhammadiyah sebagai tempat persemaian bibit-bibit pembaharuan dalam Islam di Indonesia di kemudian hari (Fathoni, 1990: 29-30).

Dalam pembahasan tentang sosial keagamaan yang dilakoni Muhammadiyah sesuai dengan konsep yang ditawarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan didasarkan pada surat Al-Ma'un ayat 1-4, yakni: *"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang*

yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat”.

Berdasarkan ayat tersebut, maka peran sosial keagamaan Muhammadiyah dalam bentuk praktik amal nyata yang fenomenal adalah dengan mendirikan rumah-rumah yatim dan menampung orang-orang miskin. Pendirian rumah-rumah yang menampung anak-anak yatim dan orang-orang miskin, terjadi di jaman penjajahan. Akibat kolonialisme yang menjerat ekonomi rakyat, kemiskinan merajalela. Ketika jaman Jepang, tahun 1942-1945, kondisi rakyat Indonesia semakin parah. Ini antara lain nampak dengan adanya institusi romusja, yang merupakan lembaga pekerja paksa untuk usaha perang Jepang di Indonesia. Akibat *romusja* ini, dimana banyak yang meninggal dunia, anak-anak menjadi yatim, jumlah janda terus bertambah, kemiskinan semakin melilit. Inilah yang mendorong Muhammadiyah akhirnya mendirikan “Penolong Kesengsaraan Oemoem” di Panarukan, Jawa Timur.

Gagasan dan pelajaran tentang Surat Al-Ma’un, merupakan contoh lain yang paling monumental dari pembaruan yang berorientasi pada amal sosialkesejahteraan. Langkah monumental ini dalam wacana Islam kontemporer disebut dengan “teologi transformatif”, karena Islam tidak sekadar menjadi seperangkat ajaran ritual-ibadah dan “hablum min Allah” (hubungan dengan

Allah) semata, tetapi justru peduli dan terlibat dalam memecahkan masalah-masalah konkret yang dihadapi manusia. Inilah "teologi amal" yang tipikal (khas) dari Kyai Dahlan dan awal kehadiran Muhammadiyah, sebagai bentuk dari gagasan dan amal pembaruan lainnya di negeri ini Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 23 Februari 1923 di Kauman Yogyakarta, sesudah menderita sakit beberapa waktu lamanya. Hingga akhir hayatnya, semangat serta dinamikanya dalam membangun umat sangat berapi-api, sehingga ia melupakan akhir hayatnya. Jasa yang besar di berbagai bidang diakui oleh pemerintah ketika Presiden Sukarno dalam Surat Keputusan No. 675 Tahun 1961 tanggal 27 Desember, menetapkan Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional. Dasar-dasar penetapan itu ialah:

- 1) Kyai Haji Ahmad Dahlan menyadarkan umat Indonesia bahwa mereka adalah bangsa yang terjajah yang masih harus belajar dan berbuat.
- 2) Kyai Haji Ahmad Dahlan melalui organisasi Muhammadiyah yang didirikannya memberikan ajaran Islam yang murni, yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam.

- 3) Muhammadiyah telah memelopori usaha sosial dan pendidikan yang diperlukan bagi kemajuan bangsa, dengan ajaran Islam.
- 4) Muhammadiyah melalui organisasi wanitanya Aisyiah telah memelopori kebangunan wanita Indonesia yang mengecap pendidikan yang setingkat dengan pria (Kusumo, t.t.: 65).

Dalam perkembangan lebih lanjut Muhammadiyah juga mendirikan balai kesehatan masyarakat atau rumah sakit-rumah sakit. Lembaga ini didirikan, selain untuk memberi perawatan pada masyarakat umum, bahkan yang miskin digratiskan, juga untuk memberi penyuluhan, betapa pentingnya arti sehat. Berbagai bentuk penyuluhan diselenggarakan, agar masyarakat bisa hidup secara sehat, sebagaimana diajarkan oleh Muhammad Saw. Bila umat sehat, mereka akan jadi produktif yang manfaatnya untuk keluarga, umat dan negara. Amal nyata Muhammadiyah yang dikomandoi oleh Ahmad Dahlan, tak pernah lepas dari tiga unsur di atas: rumah yatim dan fakir miskin, rumah sakit, dan lembaga pendidikan. Dan itu terus dilakukan oleh generasi-generasi penerus Muhammadiyah, sampai kini.

Muhammadiyah menjadi pelopor organisasi sosial kemasyarakatan yang berbasiskan agama, mempunyai corak pembaruan yang dinamis. Karena itu, Muhammadiyah awalnya, lebih diminati oleh orang-orang perkotaan dan yang berpendidikan.

Tapi, seiring dengan meluasnya lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh Muhammadiyah, sampai pelosok-pelosok, Ormas Islam yang didirikan oleh Ahmad Dahlan itu kini tidak hanya dikenal sebagai organisasi milik orang perkotaan saja. Dikhotomi kota dan desa tak lagi relevan buat Muhammadiyah, kini. Sebelas tahun setelah Muhammadiyah berdiri, tepatnya pada 23 Februari 1923, Ahmad Dahlan meninggal dunia, juga di Kauman, Yogyakarta, tempat dimana ia dilahirkan pada tahun 1868.

Pembaruan Islam dalam bidang sosial keagamaan ini dalam wacana Islam kontemporer disebut dengan "teologi transformatif", karena Islam tidak sekadar menjadi seperangkat ajaran ritual-ibadah dan "hablum min Allah" (hubungan dengan Allah) semata, tetapi justru peduli dan terlibat dalam memecahkan masalah-masalah konkret yang dihadapi manusia. Inilah "teologi amal" yang tipikal (khas) dari Kyai Dahlan dan awal kehadiran Muhammadiyah, sebagai bentuk dari gagasan dan amal pembaruan lainnya di negeri ini. Kyai Dahlan juga peduli dalam memblok umat Islam agar tidak menjadi korban misi Zending Kristen, tetapi dengan cara yang cerdas dan elegan. Kyai mengajak diskusi dan debat secara langsung dan terbuka dengan sejumlah pendeta di sekitar Yogyakarta. Dengan pemahaman adanya kemiripan selain perbedaan antara Alquran sebagai Kitab Suci umat Islam dengan kitab-kitab suci sebelumnya, Kyai Dahlan menganjurkan atau

mendorong "umat Islam untuk mengkaji semua agama secara rasional untuk menemukan kebenaran yang inheren dalam ajaran-ajarannya", sehingga Kyai pendiri Muhammadiyah ini misalnya beranggapan bahwa diskusi-diskusi tentang Kristen boleh dilakukan di masjid (Jainuri, 2002: 78).

c. Peran Politik Muhammadiyah

Dalam bidang politik, Muhammadiyah banyak mengambil peran, terutama yang berkaitan dengan politik pendidikan dan sistem administrasi.

Pada zaman kolonial Belanda, sistem pendidikan masih bersifat kelompok-kelompok pengajian, tetapi Muhammadiyah begitu berani menerapkan sistem klasikal, di mana sistem pendidikan "klasik" direformasi menjadi lebih "modern". Faisal Ismail (2003: 3) menulis:

Muhammadiyah sebagai mana kita ketahui, tidak sedikit organisasi ini dalam membangun bangsa ini, mulai dari masalah keagamaan, sosial dan Pendidikan. Satu contoh dalam dunia pendidikan, Muhammadiyah melakukan terobosan baru dalam yang berani dengan mengambil dan mengadopsi sistem pendidikan modern Barat (Belanda), walaupun inti dan substansi pendidikannya tetap berdasarkan Islam. Sistem administrasi, seperti tata persuratan, yang kita pakai sekarang ini adalah juga diambil alih oleh sistem administrasi Belanda yang telah kita adaptasikan dengan kondisi kita.

Padahal pada saat itu mayoritas umat Islam di Indonesia seperti kaum Nahdhiyin masih melarang sistem pendidikan penjajah (Belanda).

Tentu saja peran politik Muhammadiyah sangat beragam. Tidak terkecuali dalam bidang pemerintahan (eksekutif maupun legislatif). Kendati secara organisatoris Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi dalam banyak kesempatan tokoh-tokoh Muhammadiyah banyak berkiprah di eksekutif maupun legislatif. Sederet kader Muhammadiyah yang terlibat dalam politik, seperti Dr. H. A. Yahya Muhaimin (Mendiknas pada era Presiden Gus Dur), Prof. H. A. Malik Fajar (Wakil Ketua PP Muhammadiyah menjadi Mendiknas pada era Presiden Megawati), bahkan Prof. Dr. H.M. Amien Rais (mantan Ketua PP Muhammadiyah terpilih sebagai Ketua MPR-RI dan maju sebagai Capres berpasangan dengan Siswono Yudhohusodo kendati akhirnya tidak terpilih) (Suara Muhammadiyah, Edisi 15 Tahun 2004). Selain itu, sejumlah tokoh Muhammadiyah lainnya tersebar dalam berbagai lapangan politik di tanah air.

3. Al Jam'iyatul Washliyah

a. Latar Belakang Lahirnya Al Washliyah

Al Washliyah yang merupakan nama singkat dari suatu perkumpulan yang diberi nama Al Jam'iyatul Washliyah (dalam ejaan lama dituliskan dengan Al Djamijatul Washlijah) (Pengurus

Besar Al Djamijatul Washlijah, 1956) merupakan organisasi Islam yang lahir pada 30 November 1930 dan bertepatan 9 Rajab 1349 H di kota Medan, Sumatera Utara. Organisasi ini lahir ketika bangsa Indonesia masih dalam penjajahan Hindia Belanda (Nederlandsh Indie). Sehingga para pendiri Al Washliyah ketika itu turut berperang melawan penjajah Belanda. Bahkan di antara tokoh Al Washliyah ada yang ditangkap Belanda dan dijebloskan ke penjara hingga menjadi syahid demi mempertahankan agama dan negara.

Tujuan utama berdirinya organisasi Al Washliyah ketika itu sebagai sarana pemersatu umat yang berpecah belah dan berbeda pandangan. Perselisihan tersebut merupakan bagian dari strategi Belanda untuk terus berkuasa di bumi Indonesia, kemudian Organisasi Al Washliyah menggalang persatuan ummat untuk melawan penjajahan Belanda di muka bumi Indonesia, hingga diraihnya kemerdekaan Republik Indonesia (<http://www.al-washliyah.com/about/sejarah>; Lihat pula Lubis, 2008: 4).

Politik memecah-belah yang diperankan oleh penjajah Belanda bahkan sudah merambah kepada ruang keberagaman masyarakat, dengan memperuncing perbedaan pandangan dalam bidang ibadah, sehingga muncullah yang dikenal dengan istilah kaum tua dan kaum muda. Perselisihan di kalangan umat Islam di Sumatera Utara (dulu Sumatera Timur) khususnya kota Medan pada masa itu mendorong para pelajar yang menimba ilmu di

Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) Medan berupaya untuk mempersatukan kembali umat yang terpecah belah. Upaya mempersatukan umat Islam terus dilakukan dan akhirnya dibentuklah organisasi Al Jam'iyatul Washliyah sebagai sarana pemersatu sesuai dengan namanya "Perkumpulan yang menghubungkan". Maksudnya adalah menghubungkan manusia dengan Allah Swt. dan menghubungkan manusia dengan manusia (sesama umat Islam) (Lubis, 2008: 6).

b. Peran Sosial Keagamaan Al Washliyah

M. Arsjad Th. Lubis dalam judul tulisannya: "Pendirian Al Djamijatul Washlijah" menyebutkan bahwa lapangan perjuangan Al Washliyah terdiri dari lapangan politik dan lapangan pembangunan dan pembinaan. Dalam lapangan politik tentu tidak bisa dilepaskan dengan peran tokoh-tokoh Al Washliyah yang ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang dikatakannya sebagai berikut:

Dalam memperjuangkan tjita2, kedua2 lapangan itu harus diisi umat Islam. Kedua2nja bertalian rapat dan masing2 harus mendapat perhatian jang istimewa. Kenyataan jang nampak dalam masjarakat kita dewasa ini adalah hasil dari perdjjuangan umat Islam pada masa jang lalu dalam lapangan politik dan pembangunan. Djika dalam berbagai hal kita merasakan keketjewaan maka semuanya adalah sebagai akibat dari kelemahan dan ketidak perseimbangan jang terdjadi dalam tjara perdjjuangan kita pada waktu2 jang lalu (Pengurus Besar Al Djamijatul Washlijah, 1956: 18).

Harus diakui bahwa sejak awal berdirinya saja, Al Washliyah telah memperlihatkan perannya dalam bidang sosial keagamaan. Bahkan kelahirannya dibidani oleh alumni-alumni dari pesantren yang disebut sebagai Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Dalam perkembangan selanjutnya hingga kini perguruan-perguruan keagamaan yang diberi nama Perguruan Al Washliyah tidaklah begitu sulit di temukan, terutama di Sumatera Utara, atau khususnya di Kota Medan.

Kaitannya dengan tuntunan beribadah bagi setiap Muslim, Al Washliyah telah menetapkan faham fikihnya pada mazhab Syafi'i. Kendati demikian, pemahaman mazhab bagi Al Washliyah bukan berarti sebagai upaya memecah belah umat. Penyebutan mazhab ini hanyalah pertanggungjawaban dalam hal fikih saja. Oleh karena itu M. Arsjad Th. Lubis justru menyebutkan: "Kebebasan mengemukakan faham dan pendapat perlu mendapat tempat dalam masyarakat karena sangat penting artinya untuk kemadjuan pengetahuan dalam kalangan umat Islam sendiri" (Pengurus Besar Al Djamijatul Washlijah, 1956: 19).

Tentu saja peran sosial keagamaan Al Washliyah sangat banyak, yang lain misalnya seperti pendirian panti asuhan untuk

menampung anak-anak yatim yang kurang mampu, klinik kesehatan, dan sebagainya.

c. Peran Politik Al Washliyah

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa lapangan perjuangan Al Washliyah salah satunya adalah lapangan politik. Hal tersebut selain telah dilakoni pada masa penjajahan Belanda (perjuangan kemerdekaan) berlanjut hingga pada masa pemerintahan Sukarno terutama dalam hal kaitannya dengan adanya partai politik Masyumi. Al Washliyah ketika itu bergabung dengan Partai Politik Islam Masyumi (Pengurus Besar Al Djamiatul Washlijah, 1956: 19).

Harus diakui bahwa Al Washliyah sejak kelahirannya bukanlah salah satu dari partai politik di tanah air, tidak juga *underbow* dari salah satu partai politik. Akan tetapi dalam sejarah perkembangannya banyak tokoh Al Washliyah yang berhasil masuk ke dunia politik, di antaranya Aziddin, SE yang sempat melanglang buana hingga ke DPR Pusat dan Abdul Halim Harahap yang sempat menjadi salah seorang wakil dari Sumatera Utara sebagai anggota DPD di Jakarta.

Kalau untuk tingkat Kabupaten/Kota dan Sumatera Utara sebagai basis kelahiran Al Washliyah tentu sudah sangat sulit menginventarisnya berapa orang yang sudah terjun ke kancah

politik praktis. Kenyataan ini menunjukkan bahwa peran politik Al Washliyah dalam dunia politik tidak bisa diremehkan begitu saja.

Mengenai peran politik Al Washliyah ini sejalan dengan tulisan Muslim Nasution yang mengatakan:

Al Washliyah sejak awal memang bukan partai politik, tetapi dalam banyak hal Al Washliyah sangat konsen dengan soal-soal politik. Dalam masa pemilu 1955 dan Majelis Konstituante, Al Washliyah yang bergabung dalam Partai Masyumi sampai dibubarkan oleh Soekarno, menjadi indikasi dinamika perpolitikan Al Washliyah, atau paling tidak perpolitikan orang-orang Al Washliyah di tanah air ini (Lubis, 2008: 28).

4. Organisasi Sosial Keagamaan Lainnya

Organisasi sosial keagamaan di tanah air sangat beragam, selain yang sudah disebutkan di atas dikenal pula organisasi lainnya seperti Persis, Al-Ittihadiyah, Matla'ul Anwar, DDI, MUI, dan sebagainya.

D. Gambaran Umum Organisasi Politik di Sumatera Utara

1. Keadaan Organisasi Partai Politik

Membicarakan tentang Sumatera Utara sama halnya dengan membahas tentang Indonesia, sebab Sumatera Utara dapat dikatakan sebagai miniaturnya Indonesia, karena penduduk atau masyarakatnya sangat beragam ditinjau dari berbagai aspek, seperti sosial, budaya, agama, maupun politik. Keberagaman masyarakat

merupakan suatu keniscayaan dan sebagai sebuah kekayaan yang dimiliki oleh Sumatera Utara.

Sebagaimana halnya organisasi baik politik maupun non politik yang terdapat di Indonesia, di Sumatera Utara juga terdapat berbagai organisasi, ada organisasi yang bersifat kepemudaan, remaja mesjid, sosial kemasyarakatan, maupun organisasi politik. Khusus mengenai organisasi politik atau partai politik diantaranya Partai Golkar (PG), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan lain-lain. Keberadaan berbagai partai politik telah memberi warna bagi perkembangan demokrasi di Sumatera Utara.

Salah satu hal yang sangat menonjol dari perkembangan politik Indonesia adalah munculnya partai-partai. Fenomena ini selalu dikaitkan dengan pandangan bahwa kenyataan tersebut merupakan bagian yang tak dipisahkan dari reformasi dan bahkan dianggap sebagai bagian utama dari kehidupan yang demokratis. Dalam situasi normal, pandangan seperti bersifat *taken for granted*. Apakah demikian pula persepsi yang harus muncul di dalam situasi sebaliknya? (Bahtiar Effendy, 1999: 155).

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai

memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider "*Political parties created democracy*". Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, "*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*" Jimly Asshiddiqie, <http://www.gooleuser.com>).

Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Yang paling serius di antaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan 'nafsu birahi' kekuasaannya sendiri. Partai politik hanya berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu '*at the expense of the general will*' atau kepentingan umum.

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan "*checks and balances*". Akan

tetapi jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstrim merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip "*checks and balances*" dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip "*checks and balances*" berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh-berkembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan (Robert Michels, 1984: 23).

Dalam hubungannya dengan kegiatan bernegara, peranan partai politik sebagai media dan wahana tentulah sangat menonjol. Di samping faktor-faktor yang lain seperti pers yang bebas, kelas menengah yang tercerahkan, dan lain sebagainya. Peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika

kegiatan bernegara. Partai politik betapapun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (*values and interests*) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara.

Proses pelebagaan demokrasi itu pada pokoknya sangat ditentukan oleh pelebagaan organisasi partai politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri. Karena itu, menurut Yves Meny and Andrew Knapp (1998: 86), "*A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine*". Suatu sistem politik dengan hanya 1 (satu) partai politik, sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa partai politik sama sekali.

Organisasi partai politik yang berkembang makin melembaga cenderung pula mengalami proses "*depersonalisasi*". Orang dalam maupun orang luar sama-sama menyadari dan memperlakukan organisasi partai politik yang bersangkutan sebagai institusi, dan tidak dicampur-adukkan dengan persoalan personal atau pribadi para individu yang kebetulan menjadi pengurusnya. Banyak organisasi partai politik, meskipun usianya sudah sangat tua, tetapi tidak terbangun suatu tradisi dimana urusan-urusan pribadi pengurusnya sama sekali terpisah dan dipisahkan dari urusan keorganisasian. Dengan demikian, berarti derajat pelebagaan organisasi partai politik tersebut sebagai

institusi masih belum kuat, atau tegasnya belum terlembagakan sebagai organisasi partai politik yang kuat.

Jika hal ini dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia termasuk di Sumatera Utara, banyak sekali organisasi partai politik yang kepengurusannya masih sangat "*personalized*". Organisasi partai politik besar yang berbasis keagamaan, dengan derajat yang berbeda-beda, masih menunjukkan gejala personalisasi yang kuat atau malah sangat kuat.

Jika kita menggunakan parameter "*personalisasi*" ini untuk menilai organisasi partai-partai politik di tanah air kita termasuk juga di Sumatera Utara dewasa ini, tentu banyak sekali organisasi partai politik yang dengan derajat yang berbeda-beda dapat dikatakan belum semuanya melembaga secara "*depersonalized*". Hal ini terlihat seperti partai-partai politik seperti Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan sebagainya. Ada yang diiringi oleh perpecahan, permasalahan yang melanda kader partai seperti korupsi, dan lain sebagainya.

2. Karakteristik Organisasi Partai Politik

Setiap partai memiliki warna masing-masing. Hal ini dapat dilihat mulai dari ideologi yang diusung, agenda utama partai, mekanisme pemilihan kandidat pemimpin. Aspek-aspek ini merupakan potongan kecil dari keseluruhan modal partai yang selanjutnya akan menjadi sumber daya yang menggerakkan sekaligus mengkerangkai setiap langkah.

Partai politik dapat kita artikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, cita-cita dan tujuan yang sama dalam rangka mengurus urusan rakyat. Dengan kata lain, partai politik adalah kelompok yang berdiri di atas sebuah landasan ideologi yang diyakini oleh anggota-anggotanya, dan ingin mewujudkannya di tengah masyarakat.

Dengan adanya partai politik masyarakat bisa memperjuangkan kemashlahatan sesuai dengan apa yang dicita-citakannya bersama. Namun yang terjadi di negeri kita sekarang, walaupun banyak partai politik terutama partai-partai berbasis Islam yang bertebaran, tak kunjung juga Indonesia mengalami perbaikan. Karena perjuangan yang dilakukan seolah-olah nihil atau dengan kata lain tidak nampak. Sebenarnya apa yang salah dengan keberadaan partai-partai politik, termasuk partai politik Islam di negeri kita?

Untuk menjawab pertanyaan diatas, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja karakter yang harusnya dimiliki oleh partai-partai yang ada terutama yang berideologi Islam, diantaranya:

1. Menjadikan Islam sebagai dasar dalam membangun pandangan, pemikiran, dan hukum yang diadopsi dan diperjuangkannya.
2. Kader-kadernya berkepribadian Islam, ikatan yang menyatukan mereka pun bukan kepentingan atau uang melainkan akidah Islam.
3. Memiliki kepemimpinan Islam yang dibangun dengan pemikiran Islam dan ditaati selama tidak menyimpang dari Islam.
4. Memiliki konsepsi (fikrah) yang jelas terkait berbagai hal. Antara lain tentang sistem ekonomi, pemerintahan, sosial, pendidikan, sanksi hukum, dan sistem politik luar negeri Islam. Tentunya semua ini hanya dapat dijalankan dengan metode operasional yang tidak lain adalah pemerintahan yang menerapkan Islam. Inilah yang sekarang harus kita perjuangkan untuk ditegakkan.
5. Mengikuti metode yang jelas dalam perjuangannya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. pertama, dengan melakukan pembinaan dan pengkaderan. Kedua, bergerak dan bergaul bersama dengan masyarakat. Ketiga menegakkan syariah secara total dengan dukungan dan bersama dengan rakyat.

6. Melakukan aktivitas berupa: (a) membangun tubuh partai dengan melakukan pembinaan secara intensif sehingga meyakini ide-ide yang diadopsi partai; (b) membina umat dengan Islam dan pemikiran, ide serta hukum syariah yang diadopsi oleh partai; (c) melakukan perang pemikiran dengan semua ide, pemikiran, aturan yang bertentangan dengan Islam; (d) melakukan koreksi terhadap penguasa yang tidak menerapkan Islam atau menzalimi rakyat; dan (e) perjuangan politik melawan Negara kafir penjajah dan para penguasa yang zalim.

Adapun realita partai politik Islam di negeri kita sekarang, diantaranya: (1) tidak memiliki konsep (fikrah) yang jelas dan tegas dalam memperjuangkan Negara Islam; (2) tidak menjalankan metode yang jelas, perubahan di tengah masyarakat hanya ditempuh dengan membuat undang-undang, koalisi pun dilakukan antara partai Islam dengan partai nasionalis yang anti Islam; (3) ikatan yang terjalin antara kader-kadernya lebih pada ikatan kepentingan, sehingga mudah terjadi perpecahan; (4) perilaku sebagian/pengurus tidak mencerminkan partai Islam sesungguhnya; dll (Najima Fitri, 2009: 1).

Karakter-karakter partai politik biasanya akan tergambar dari visi dan misi partai, seperti partai Golongan Karya mempunyai paradigma baru yang berisi pokok-pokok doktrin, visi, misi, dan platform politik. Di dalam perumusan paradigma baru ini ada

terkandung aspek pembaruan sekaligus kesinambungan. Aspek pembaruan ditunjukkan melalui perubahan struktur atau kelembagaan, dan aspek kesinambungan tampak pada kekukuhan Partai Golkar untuk tetap berideologi Pancasila dan doktrin karya kekaryaan.

Langkah-langkah pembaruan kelembagaan tersebut juga diikuti dengan diwujudkannya prinsip kedaulatan ditangan anggota. Yaitu mekanisme pengambilan setiap keputusan organisasi dilakukan secara lebih terbuka, demokratis, dari bawah (bottom-up), dan dengan pemungutan suara secara langsung. Melalui mekanisme yang demokratis ini maka terbukalah peluang bagi kader-kader untuk memimpin Partai karena memang dalam perspektif demokrasi kesempatan dan peluang perlu disediakan untuk semua, sehingga tidak terjadi pemusatan pandangan pada pesona figur tunggal yang mengarah pada kultus individu.

Implikasi lain dari serangkaian pembaruan tersebut adalah sangat berarti, yakni Partai Golkar menjadi benar-benar mandiri dan mampu mewujudkan tegaknya asas kedaulatan ditangan anggota sebagai salah satu prinsip utama dari Partai yang modern, demokratis, dan mengakar. Partai Golkar bertumpu hanya pada kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan kekuatan di luar dirinya, dan selanjutnya dapat mengambil keputusan-keputusan

organisasional secara independen tanpa campur tangan dari pihak luar atau golongan manapun

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai yang bergerak dibidang Dakwah. Partai Keadilan Sejahtera akan berjuang secara konstitusional, baik dalam lingkup kultural maupun struktural, dengan memaksimalkan peran berpolitiknya demi terwujudnya Masyarakat Madani dalam bingkai NKRI. Caranya, dengan mempercepat realisasi target PK Sejahtera dari “partai kader” menjadi “partai kader berbasis massa yang kokoh”, agar dapat memberdayakan komponen mayoritas bangsa Indonesia, yaitu kalangan perempuan, generasi muda, petani, buruh, nelayan dan pedagang. Melalui musyarakah (partisipasi politik) yang aktif seperti itu akan hadir pemimpin negeri serta wakil rakyat yang betul-betul bersih, peduli dan profesional, sehingga bangsa dan rakyat Indonesia dapat menikmati karunia Allah berwujud NKRI yang maju dan makmur. Partisipasi politik secara sinergis dapat merealisasikan tugas ibadah, fungsi khalifah dan memakmurkan kehidupan, sehingga tampil kekuatan baru untuk membangun Indonesia menjadi negeri yang relijius, sejahtera, aman, adil, berdaulat dan bermartabat.

Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap

terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian dari masyarakat madani perlu dipadukan dalam konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang merealisasikan ikatan ke-Islaman, ikatan kebangsaan dan ikatan kemanusiaan dalam bingkai NKRI.

Perjuangan untuk mewujudkan masyarakat madani, baik secara struktural maupun kultural, sebagai bagian dari dakwah dalam maknanya yang historik, positif dan obyektif bagi umat Islam dalam bingkai NKRI adalah bagian dari upaya merealisasikan tujuan didirikannya PK Sejahtera sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar PK Sejahtera. Masyarakat Madani sebagai warisan Sunnah Nabawiyah adalah komunitas yang hadir melalui perjuangan yang dipimpin langsung Rasulullah Saw dengan bingkai Piagam Madinah. Piagam Madinah diakui oleh para para pakar studi Islam dari kalangan Muslim atau Non-Muslim sebagai konstitusi tertua di dunia yang sangat modern dan menghadirkan fakta historis tentang pengelolaan negara berbasiskan pada prinsip hukum, moral, dan gotong-royong menjaga kedaulatan negara. Piagam itu juga menghormati pluralitas dan merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah, Ukhuwwah Wathaniyyah dan Ukhuwwah Basyariyyah sekaligus.

Partai Amanat Nasional juga mengusung civil society sering diartikan dengan masyarakat Indonesia Baru (MIB) atau

masyarakat Madani. Misi PAN adalah bagaimana memperjuangkan terwujudnya masyarakat Indonesia Baru. Dalam tataran konsep, pada awalnya pengertian civil society dianggap sama dengan negara. Tetapi dalam perkembangannya kemudian mengalami perubahan makna. Adanya pemisahan civil society dan negara inilah salah satu pokok yang melahirkan perbedaan dan perdebatan konseptual.

Tuntutan menciptakan masyarakat yang mandiri dan ruang publik bebas itulah yang menjadi tujuan pokok dari gerakan-gerakan pro demokrasi. Tuntutan ini akan sangat tergantung interaksinya dengan negara. Jika yang dihadapi negara otoriter maka perjuangan dari masyarakat madani akan mengalami represi oleh negara dengan cara membatasi gerak mereka.

Sejak masa Soekarno dan Soeharto, posisi civil society untuk mengembangkan otonominya dalam proses pembangunan politik dan penciptaan masyarakat yang demokratis. Begitu kuatnya pengaruh orde Baru ini sehingga menyebabkan masyarakat semakin melemah dan dependen terhadap state. Situasi yang homogenik ini terjadi di negara-negara otoriter-otoriter seperti Amerika Latin, dimana stabilitas dan ketenangan sosial politik yang dipertahankan oleh negara ternyata dibangun di atas dasar-dasar logika yang secara internal sangat kontradiktif. Yaitu

kemampuan yang besar oleh negara untuk melakukan eksekusi bagi kekuatan-kekuatan di masyarakat.

Hal yang ingin diwujudkan PAN adalah masyarakat madani, yaitu masyarakat yang mengandung kebersamaan antara sesama warga bangsa, baik rakyat maupun penguasa, dimana hubungan yang diciptakan di dalamnya menunjukkan sikap saling menghormati, tolong-menolong, bersahabat, saling menenggang, sopan santun, juga tanpa membedakan kedudukan, agama dan keturunan. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, yang di dalam yakni hak-hak asasi sepenuhnya ditegakkan (Muhaamd Najib, 2000: 109).

Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat), merupakan partai politik yang tergolong baru. Partai politik ini mempunyai karakter tersendiri dalam menjawab kepedulian dan kecintaan yang mendalam terhadap nasib negara dan bangsa, seperti akan merekonstruksi model kepemimpinan masa depan yang lebih memahami hati nurani rakyat, serta memiliki sifat-sifat jujur, tegas, berani, dan berkemampuan serta membangun kekuatan politik yang tidak berorientasi pada kekuasaan, namun dengan spirit ke-Tuhanan guna kemaslahatan/kebaikan (Hanura, dalam [html http://www.hanura.com](http://www.hanura.com)).

Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai yang berazaskan Islam. Misi partai ini adalah terwujudnya masyarakat

yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai ke-Islaman".

Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang ; perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlaqul karimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar; dan mengedepankan pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan;

Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan; penguasaan negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatan keswadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha swasta, badan usaha negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.

PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pembaruan hukum nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman

masyarakat, penguatan institusi dan instrumen penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum.

Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathoniyah), dan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya (Partai Kebangkitan Bangsa, <http://www.dpp-pkb.org>).

Partai ini bercirikan humanisme religius (insaniyah diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan,

serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.

3. Orientasi Organisasi Partai Politik

Kebanyakan setiap organisasi partai politik mempunyai orientasi kedepan dalam upaya mewujudkan visi dan misinya, antara lain:

a. OPP Sebagai Sarana Sosialisasi politik

Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang dilakukan melalui berbagai tahap, dan dilakukan oleh bermacam-macam agens, seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah (mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi), lingkungan pekerjaan, dan tentu saja media massa, seperti radio, TV, surat kabar, majalah, dan juga internet. Proses sosialisasi atau pendidikan politik Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan masyarakat madani (*civil society*). Yaitu suatu

masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat madani merupakan gambaran tingkat partisipasi politik pada takaran yang maksimal. Dalam kaitan ini, sedikitnya ada tiga alasan utama mengapa pendidikan politik dan sosialisasi politik di Indonesia tidak memberi peluang yang cukup untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat (Afan Gaffar, 1999).

Pertama, dalam masyarakat kita anak-anak tidak dididik untuk menjadi insan mandiri. Anak-anak bahkan mengalami alienasi dalam politik keluarga. Sejumlah keputusan penting dalam keluarga, termasuk keputusan tentang nasib si anak, merupakan domain orang dewasa. Anak-anak tidak dilibatkan sama sekali. Keputusan anak untuk memasuki sekolah, atau universitas banyak ditentukan oleh orang tua atau orang dewasa dalam keluarga. Demikian juga keputusan tentang siapa yang menjadi pilihan jodoh si anak. Akibatnya anak akan tetap bergantung kepada orang tua. Tidak hanya setelah selesai pendidikan, bahkan setelah memasuki dunia kerja. Hal ini berbeda sekali di barat. Di sana anak diajarkan untuk mandiri dan terlibat dalam diskusi keluarga menyangkut hal-hal tertentu. Di sana, semakin bertambah umur anak, akan semakin sedikit bergantung kepada orang tuanya. Sementara itu di Indonesia sering tidak

ada hubungan antara bertambah umur anak dengan tingkat ketergantungan kepada orang tua, kecuali anak sudah menjadi "orang" seperti kedua orang tuanya.

Kedua, tingkat politisasi sebagian terbesar masyarakat kita sangat rendah. Di kalangan keluarga miskin, petani, buruh, dan lain sebagainya, tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi, karena mereka lebih terpaku kepada kehidupan ekonomi dari pada memikirkan segala sesuatu yang bermakna politik. Bagi mereka, ikut terlibat dalam wacana politik tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia dan sejenisnya, bukanlah skala prioritas yang penting. Oleh karena itu, tingkat sosialisasi politik warga masyarakat seperti ini baru pada tingkat kongnitif, bukan menyangkut dimensi-dimensi yang bersifat evaluatif. Oleh karena itu, wacana tentang kebijakan pemerintah menyangkut masalah penting bagi masyarakat menjadi tidak penting buat mereka. Karena ada hal lain yang lebih penting, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar.

Ketiga, setiap individu yang berhubungan secara langsung dengan negara tidak mempunyai alternatif lain kecuali mengikuti kehendak negara, termasuk dalam hal pendidikan politik. Jika kita amati, pendidikan politik di Indonesia lebih merupakan sebuah proses penanaman nilai-nilai dan keyakinan yang diyakini oleh penguasa negara. Hal itu terlihat dengan jelas,

bahwa setiap individu wajib mengikuti pendidikan politik melalui program-program yang diciptakan pemerintah. Setiap warga negara secara individual sejak usia dini sudah dicekoki keyakinan yang sebenarnya adalah keyakinan kalangan penguasa. Yaitu mereka harus mengikuti sejak memasuki SLTP, kemudian ketika memasuki SMU, memulai kuliah di PT, memasuki dunia kerja, dan lain sebagainya. Proses pendidikan politik melalui media massa, barangkali, sedikit lebih terbuka dan individu-individu dapat lebih leluasa untuk menentukan pilihannya menyangkut informasi yang mana yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenaran dan ketepatannya.

b. OPP Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) Menyiapkan kader-kader pimpinan politik; (2) Selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan; serta (3) Perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan jabatan politik yang bersifat strategis. Makin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut;

merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.

Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat banyak untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara. Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita-rasa kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat luas. Oleh karena itulah tidaklah berlebihan bilamana dikatakan bahwa rekrutmen politik mengandung implikasi pada pembentukan cara berpikir, bertindak dan berperilaku setiap warga negara yang taat, patuh terhadap hak dan kewajiban, namun penuh dengan suasana demokrasi dan keterbukaan bertanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun bila dikaji secara sekilas sampai dengan saat inipun proses rekrutmen politik belum berjalan secara terbuka, transparan, dan demokratis yang berakibat pemilihan kader menjadi tidak obyektif. Proses penyiapan kader juga terkesan tidak sistematis dan tidak berkesinambungan. Partai politik dalam melakukan pembinaan terhadap kadernya lebih inten hanya pada saat menjelang adanya *event-event*

politik; seperti konggres partai, pemilihan umum, dan sidang MPR. Peran rekrutmen politik masih lebih didominasi oleh kekuatan-kekuatan di luar partai politik.

c. OPP Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Adapun yang dimaksud dengan konflik atau pertentangan mengandung suatu pengertian tingkah laku yang lebih luas dari apa yang biasanya dibayangkan oleh kebanyakan orang. Secara umum kita sering beranggapan bahwa konflik mengandung benih dan didasarkan pada pertentangan yang bersifat kasar dan keras. Namun sesungguhnya, dasar dari konflik adalah berbeda-beda, yang secara sederhana dapat dikenali tiga elemen dasar yang merupakan ciri-ciri dari situasi konflik yaitu: (1) Terdapatnya dua atau lebih unit-unit atau bagian-bagian yang terlibat dalam suatu konflik; (2) Unit-unit tersebut, mempunyai perbedaan-perbedaan yang tajam dalam kebutuhan-kebutuhan, tujuan-tujuan, masalah-masalah, nilai-nilai, sikap-sikap, maupun gagasan-gagasan; dan (3) Terjadi atau terdapat interaksi antara unit-unit atau bagian-bagian yang terlibat dalam sebuah konflik.

Konflik merupakan suatu tingkah laku yang tidak selalu sama atau identik dengan emosi-emosi tertentu yang sering dihubungkan dan/ atau dikaitkan dengannya, seperti rasa kebencian atau permusuhan. Konflik dapat terjadi pada lingkungan yang paling kecil yaitu individu, sampai kepada

lingkungan yang luas yaitu masyarakat. Pada taraf masyarakat, konflik bersumber pada perbedaan diantara nilai-nilai dan norma-norma kelompok dengan nilai-nilai dan norma-norma dimana kelompok tersebut berada. Demikian pula konflik dan bersumber dari perbedaan-perbedaan dalam tujuan, nilai dan norma, serta minat yang disebabkan karena adanya perbedaan pengalaman hidup dan sumber-sumber sosial ekonomis di dalam suatu kebudayaan tertentu dengan yang ada dalam kebudayaan-kebudayaan lain.

Dalam menjalankan peran sebagai pengatur konflik ini, partai-partai politik harus benar-benar mengakar dihati rakyat banyak, peka terhadap bisikan hati nurani masyarakat serta peka terhadap tuntutan kebutuhan rakyat. Dengan munculnya partai-partai baru tentu saja persyaratan mengakar di hati rakyat belum bisa terpenuhi dan bahkan boleh dikatakan masih jauh dari harapan. Sedangkan partai politik yang lama pun belum tentu memiliki akar yang kuat di hati rakyat, mengingat partisipasi politik rakyat masih lebih banyak bersifat semu. Artinya rakyat memiliki partisipasi yang nyata adalah pada saat pelaksanaan pemilihan umum, sementara pada proses pembuatan keputusan politik, dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan politik masih tergolong dalam kategori yang relatif rendah. Meskipun akhir-akhir ini banyak demonstrasi dan kebebasan media massa sangat

luas, batasan terhadap akses informasi makin lunak; namun bila dikaji substansi yang dituntut dan disampaikan masih lebih banyak didasarkan pada rekayasa kelompok politik dan/ atau elit politik tertentu.

E. Gambaran Umum Pondok Pesantren di Sumatera Utara

1. Pengertian Pesantren.

Menurut Zamakhsyari Dhofier bahwa pesantren berasal dari kata “santri” dengan awalan “pe” dan akhiran “an”, yang berarti tempat tinggal santri Zamakhsyari Dhofier, 1984: 18). Sedangkan menurut Soegarda Poerbakawatja bahwa pesantren berasal dari kata “santri” yaitu orang yang belajar agama Islam, dengan demikian pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam (Soegarda Poerbakawatja, 1976: 223). Sementara itu, Manfred Ziamek menyebutkan bahwa asal etimologi dari pesantren adalah “pe-santri-an”, artinya tempat santri. Santri atau murid mendapat pelajaran dari pimpinan pesantren (kyai) dan oleh para guru (ulama atau ustadz). Pelajaran mencakup berbagai bidang tentang pengetahuan Islam (Manfred Ziamek, 1985: 16).

Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk mendalami ilmu agama Islam. Namun dari proses lahirnya pesantren ini para ahli berbeda pendapat.

Menurut M.Amin Haedori dkk bahwa perbedaan pandangan tentang proses lahirnya pesantren tersebut setidaknya dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar yaitu : *Pertama*, kelompok yang berpendapat bahwa pesantren merupakan hasil kreasi sejarah anak bangsa setelah mengalami persentuhan budaya dengan budaya pra-Islam. Pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan Hindu-Budha. Pesantren disamakan dengan *mandala* dan *asrama* dalam khasanah lembaga pendidikan pra-Islam. Pesantren merupakan sekumpulan komunitas independen yang pada awalnya mengisolasi diri di sebuah tempat yang jauh dari pusat perkotaan (pegunungan) (M. Amin Haedori, 2004: 2). Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Nurcholish Madjid bahwa pesantren adalah artefak peradaban Indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan keagamaan bercorak tradisional, unik dan *indigenous*. Sebagai sebuah artefak peradaban, keberadaan pesantren dipastikan memiliki keterkaitan yang kuat dengan sejarah dan budaya yang berkembang pada awal berdirinya Nurcholis Madjid, 1997: 10).

Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa pesantren diadopsi dari lembaga pendidikan Islam Timur Tengah. Kelompok ini meragukan kebenaran pendapat yang menyatakan bahwa lembaga *mandala* dan *asrama* yang sudah ada sejak zaman Hindu-

Budha merupakan tempat berlangsungnya praktek pengajaran tekstual sebagaimana di pesantren (Haedori, 2004: 10).

Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai proses lahirnya pesantren di atas, yang jelas bahwa pesantren merupakan suatu institusi atau lembaga pendidikan Islam khususnya di Indonesia yang tujuan pendiriannya adalah untuk mendalami ilmu agama Islam dan juga mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan pentingnya akhlak dalam hidup bermasyarakat.

2. Pola Umum Pendidikan Pesantren.

Sesuai dengan latar belakang sejarah pesantren, dapat dilihat bahwa tujuan utama didirikannya suatu pesantren adalah untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam seperti tauhid, fiqh, ushul fiqh, tafsir, hadis, akhlak, tasawuf, bahasa Arab, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar para santri yang keluar dari pesantren telah memahami dan menguasai beraneka ragam mata pelajaran agama serta memiliki kemampuan untuk merujuk kepada kitab-kitab klasik.

Seorang santri sebagai calon kyai, selain harus menguasai ilmu-ilmu agama secara menyeluruh, secara khusus dia dituntut harus memiliki keahlian atau spesialisasi dalam mata pelajaran tertentu. Karena ada spesialisasi kyai-kyai, maka ini juga berpengaruh kepada spesifik pesantren yang diasuh oleh kyia

tersebut. Misalnya Pesantren Krapyak Yogyakarta terkenal dengan spesialisasi Alquran. Pesantren Lirboyo Kediri, spesialisasi nahwu saraf. Pesantren Tebuireng Jombang, terkenal dengan spesialisasi ilmu hadis, demikian juga dengan pesantren-pesantren lainnya.

Oleh karena adanya spesifikasi dari beraneka pesantren tersebut, maka tidak mengherankan apabila seorang santri yang telah menyelesaikan pelajaran-pelajaran pada salah satu pesantren kemudian ia pindah ke pesantren lain untuk melanjutkan pelajaran yang menjadi spesifikasi dari pesantren tersebut.

Karena tuntutan pokok yang mesti dikuasai oleh santri adalah ilmu-ilmu agama Islam, maka tidak boleh tidak para santri mesti memahami ilmu-ilmu agama Islam itu dari sumber aslinya yaitu Alquran dan Sunnah yang telah dijabarkan oleh ulama-ulama terdahulu dalam kitab-kitab klasik berbahasa Arab dengan segala cabang-cabangnya yang merupakan unsur pokok dalam suatu pesantren.

Untuk mengajarkan kitab-kitab klasik tersebut seorang kyai menempuh cara : *wetonan* atau *bandongan* dan *sorogan*. *Wetonan* atau *bandongan* adalah metode kuliah dimana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kyai. Kyai membacakan kitab yang dipelajari saat itu, santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan. *Sorogan* adalah metode kuliah dengan cara santri

menghadap guru seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajari (Haidar Putra Daulay, 2001: 10).

Kitab-kitab yang dipelajari itu diklasifikasikan berdasarkan tingkatan-tingkatan. Ada tingkat awal, menengah dan atas. Seorang santri pemula terlebih dahulu dia mempelajari kitab-kitab awal, setelah itu barulah diperkenankan mempelajari kitab-kitab pada tingkat berikutnya. Oleh karena itu, pesantren tradisional tidak mengenal sistem kelas. Kemampuan santri tidak dilihat dari kelas berapanya, tetapi dilihat dari kitab apa yang telah dibacanya.

Di samping metode *wetonan* dan *sorogan*, dalam dunia pesantren dikenal beberapa metodologi pengajaran sebagai berikut:

a. Metode Hafalan (*Tahfiz*).

Metode hafalan menempati kedudukan yang penting di dunia pesantren. Pelajaran-pelajaran dengan materi-materi tertentu diwajibkan untuk dihafal. Seperti pelajaran Alquran dan hadis, fiqh, bahasa Arab, tafsir, tasawuf dan lain-lain..

b. Metode Hiwar atau Musyawarah.

Metode hiwar yakni metode mendiskusikan pelajaran yang sudah dan yang akan dipelajari. Metode ini biasanya para santri melakukan dengan kegiatan belajar secara kelompok untuk membahas bersama materi yang sudah dan yang akan dipelajari tersebut.

c. Metode *Bahsul Masa'il* (*Muzakarah*).

Muzakarah atau *bahsul masa'il* merupakan pertemuan ilmiah untuk membahasan masalah agama seperti ibadah, aqidah, dan permasalahan-permasalahan agama lainnya. Metode ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan metode musyawarah. Akan tetapi metode *muzakarah* ini umumnya hanya diikuti oleh para kyai atau para santri tingkat tinggi.

d. Metode *Fathul Kutub*.

Fathul kutub merupakan kegiatan latihan membaca kitab (terutama kitab klasik) yang pada umumnya ditugaskan kepada santri senior. Sebagai sebuah metode, *fathul kutub* bertujuan menguji kemampuan santri dalam membaca kitab kuning, khususnya setelah mereka berhasil menyelesaikan mata pelajaran kaidah bahasa Arab.

e. Metode *Muqaranah*.

Muqaranah adalah sebuah metode yang terfokus pada kegiatan perbandingan, baik perbandingan materi, paham, metode maupun perbandingan kitab. Oleh karena sifatnya yang membandingkan, pada umumnya metode ini juga hanya diterapkan pada kelas-kelas santri senior saja.

f. Metode *Muhawarah* atau *Muhadasah*.

Muhawarah merupakan latihan berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Dalam aplikasinya, metode ini diterapkan dengan mewajibkan para santri untuk berbicara, baik

dengan sesama santri maupun dengan para ustaz atau kyai dengan menggunakan bahasa Arab. Adakalanya hal demikian diterapkan bagi selama mereka berada di pesantren dan adakalanya hanya pada jam-jam tertentu saja (Haedori, 2004: 17-21).

Bagi pesantren yang tergolong pesantren *khalafi* dan pesantren modern, metode pengajaran yang mereka gunakan tidak hanya mengandalkan metode-metode pengajaran sebagaimana di atas, akan tetapi mereka telah mempergunakan metode-metode pengajaran sebagaimana yang dipergunakan pada sekolah-sekolah umum. Bahkan pesantren-pesantren modern telah menerapkan kurikulum nasional dengan menyeimbangkan pelajaran agama dengan pelajaran umum.

Namun demikian, suasana kehidupan belajar dan mengajar yang berlangsung di pesantren memiliki kekhasan tersendiri yaitu kegiatan belajar mengajar berlangsung sepanjang hari dan malam. Seorang santri mulai dari bangun subuh, sampai tidur malam berada dalam proses belajar. Demikian pula kyai berada dalam suasana mengajar. Hubungan antara kyai dan santri sama halnya hubungan orang tua dengan anak. Begitu juga penanaman akhlak sangat penting seperti akhlak kepada sesama teman, kepada masyarakat sekitar, terlebih-lebih kepada kyai. Itulah pola umum pendidikan di pesantren.

3. Unsur-Unsur Pesantren.

Hampir dapat dipastikan, lahirnya suatu pesantren berawal dari beberapa elemen dasar yang selalu ada di dalamnya. Menurut Zamakhsyari Dhofier ada 5 unsur dari pesantren yaitu kyai, santri, pondok, mesjid dan pengajaran kitab-kitab klasik (Zamakhsyari, 44).

a. Kyai.

Kyai atau pengasuh pondok pesantren merupakan unsur yang sangat esensial bagi suatu pesantren, sebab maju mundurnya pesantren sangat ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kyai. Karena itu tidak jarang terjadi, apabila kyai di salah satu pesantren wafat, maka pamor pesantren tersebut merosot karena kyai yang menggantikannya tidak setenar kyai yang semula.

Menurut asal-usulnya, perkataan kyai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda yaitu :

- 1) Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, umpamanya Kyai Garuda Kencana dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di Kraton Yogyakarta.
- 2) Gelar kehormatan untuk orang-orang tua umumnya.
- 3) Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam Klasik kepada santrinya (Ibid). Pengertian

yang ketiga inilah yang penulis maksudkan dalam tulisan ini.

Dalam perkembangannya, gelar kyai tidak lagi menjadi monopoli bagi para pemimpin atau pengasuh pesantren. Gelar kyai dewasa ini juga dianugerahkan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang ulama yang mumpuni dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan, walaupun yang bersangkutan tidak memiliki pesantren. Dengan kata lain, bahwa gelar kyai tetap dipakai bagi seorang ulama yang mempunyai ikatan primordial dengan kelompok Islam tradisional. Bahkan dalam banyak hal, gelar kyai ini juga sering dipakai oleh para da'i atau muballigh yang biasa memberikan ceramah agama.

Bagi kebanyakan masyarakat Islam tradisional di Jawa, kyai di pesantren dianggap sebagai figure sentral yang diibaratkan kerajaan kecil yang mempunyai wewenang dan otoritas mutlak di lingkungan pesantren. Tidak seorangpun santri atau orang lain yang berani melawan kekuasaan kyai (dalam lingkungan pesantrennya), kecuali kyai lain yang lebih besar pengaruhnya.

b. Santri.

Santri adalah siswa yang belajar di pesantren. Santri ini dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu : *pertama*, santri yang mondok atau tinggal di pesantren yaitu mereka yang datang dari tempat yang jauh yang tidak memungkinkan dia untuk pulang.

Kedua, santri yang tidak mondok, yaitu mereka yang berasal dari daerah sekitar pesantren yang memungkinkan mereka pulang ke tempat tinggalnya masing-masing.

c. Pondok.

Pesantren pada umumnya sering juga disebut dengan pendidikan Islam tradisional di mana seluruh santrinya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang kyai. Asrama para santri tersebut berada di lingkungan kompleks pesantren yang terdiri dari rumah tinggal kyai, masjid, ruang untuk belajar, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

Pondok atau tempat tinggal para santri merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakannya dengan sistem pendidikan lainnya. Di pondok, seorang santri patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang diadakan, ada kegiatan pada waktu tertentu yang harus dilaksanakan oleh santri. Ada waktu belajar, salat, makan, olahraga, tidur, istirahat dan sebagainya, bahkan ada juga waktu untuk ronda malam.

d. Masjid.

Seorang kyai yang ingin mengembangkan pesantren, pada umumnya yang pertama-tama menjadi prioritas adalah masjid. Masjid dianggap sebagai simbol yang tidak terpisahkan dari pesantren. Masjid tidak hanya sebagai tempat praktek ritual ibadah,

tetapi juga tempat pengajaran kitab-kitab klasik dan aktivitas pesantren lainnya.

Suatu pesantren mutlak harus memiliki masjid, sebab di situlah pada mulanya pada mulanya- sebelum pesantren mengenal sistem klasikal-dilaksanakan proses belajar mengajar, komunikasi hubungan antara kyai dengan santri.

Kendatipun saat ini kebanyakan pesantren telah melaksanakan proses belajar mengajar di dalam kelas, namun masjid tetap difungsikan sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Hingga saat ini, kyai sering mempergunakan masjid sebagai membaca kitab-kitab klasik, dengan metode *wetonan* dan *sorogan*.

e. Pengajaran kitab-kitab klasik.

Pengajaran ilmu-ilmu agama di pesantren pada umumnya dilaksanakan lewat pengajaran kitab-kitab klasik, di samping ada sebagian pesantren yang memakai kitab-kitab berbahasa Arab yang tidak tergolong kepada kitab klasik.

Kitab-kitab Islam klasik yang lebih populer dengan sebutan kitab kuning adalah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Islam pada zaman pertengahan. Kepintaran dan kemahiran santri diukur dari kemampuannya membaca dan menjelaskan isi kandungan kitab-kitab tersebut.

Kriteria kemampuan membaca dan menjelaskan kitab bukan saja merupakan kriteria diterima atau tidaknya seorang sebagai ulama atau kyai pada zaman dahulu saja, tetapi juga sampai pada saat sekarang. Salah satu persyaratan seseorang telah memenuhi kriteria sebagai kyai atau ulama adalah kemampuannya membaca serta menjelaskan isi kitab-kitab tersebut.

Karena sedemikian tinggi posisi kitab-kitab Islam klasik maka setiap pesantren selalu mengadakan pengajian kitab kuning. Kendatipun sekarang telah banyak pesantren yang memasukkan pelajaran umum, namun pengajian kitab-kitab klasik tetap diadakan terutama pesantren-pesantren yang tergolong pesantren tradisional atau pesantren salafiyah, pengajian kitab-kitab Islam klasik mutlak dilaksanakan dan bagian yang penting.

Namun, bagi pesantren-pesantren yang tergolong modern, pengajian kitab-kitab Islam klasik tidak menjadi bagian yang penting, bahkan boleh dikatakan tidak diajarkan. Pengajian ilmu-ilmu agama diambil dari kitab-kitab berbahasa Arab yang disusun oleh ulama-ulama yang tergolong mutakhir.

4. Pesantren di Sumatera Utara.

Pesantren, jika disandingkan dengan lembaga pendidikan yang pernah muncul di Indonesia, merupakan sistem pendidikan tertua saat ini dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang asli. Pendidikan ini semula merupakan pendidikan agama Islam

yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di nusantara. Beberapa abad kemudia penyelenggaraan pendidikan ini semakin teratur dengan munculnya tempat-tempat pengajian. Bentuk ini kemudian berkembang dengan pendirian tempat-tempat menginap bagi para pelajar (santri), yang kemudian disebut pesantren.

Meskipun bentuknya masih sangat sederhana, pada waktu itu pendidikan pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang terstruktur, sehingga pendidikan ini dianggap sangat bergengsi. Di lembaga inilah kaum muslimin Indonesia mendalami doktrin dasar Islam, khususnya menyangkut praktek kehidupan keagamaan.

Lembaga pesantren semakin berkembang secara cepat dengan adanya sikap non-kooperatif ulama terhadap kebijakan "politik etis" pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke 19. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda tersebut dimaksudkan sebagai balas jasa kepada rakyat Indonesia dengan memberikan pendidikan modern, termasuk budaya Barat. Namun pendidikan yang diberikan tersebut sangat terbatas, baik dari segi jumlah yang mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan maupun juga dari segi tingkat pendidikan yang diberikan (M. Sulthoni, 2004: 1).

Sikap non-kooperatif dan *silent opposition* para ulama itu kemudian ditunjukkan dengan mendirikan pesantren di daerah-daerah yang jauh dari kota untuk menghindari intervensi

pemerintah kolonial serta memberi kesempatan kepada rakyat yang belum memperoleh pendidikan. Sampai akhir abad ke-19, tepatnya tahun 1860-an, menurut hasil penelitian Sartono Kartodirdjo (1984), jumlah pesantren mengalami peningkatan yang luar biasa, terutama di Jawa yang diperkirakan mencapai 300 buah (Ibid, 2).

Perkembangan pesantren yang begitu pesat juga ditengarai berkat dibukanya terusan Suez pada 1869 sehingga memungkinkan banyak pelajar Indonesia yang mengikuti pendidikan di Mekah. Sepulangnya ke kampung halaman, para pelajar yang mendapat gelar haji tersebut mengembangkan pendidikan agama di tanah air yang bentuk kelembagaannya kemudian disebut pesantren atau pondok pesantren.

Pada masa-masa awal, pesantren sudah memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Tingkatan yang paling sederhana hanya mengajarkan cara membaca huruf Arab dan Alquran. Sementara, pesantren yang agak tinggi adalah pesantren yang mengajarkan berbagai kitab fiqh, ilmu aqidah, dan kadang-kadang amalan sufi, di samping tata bahasa Arab (Nahwu Sarf).

Memasuki era 1970-an, pesantren mengalami perubahan signifikan. Pesantren mengalami perkembangan kuantitas luar biasa dan menakjubkan, baik di wilayah pedesaan, pinggiran kota, maupun perkotaan. Data Departemen Agama menyebutkan pada tahun 1977 jumlah pesantren masih sekitar 4.195 buah dengan

jumlah santri sekitar 677.394 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan berarti pada tahun 1985, di mana pesantren berjumlah sekitar 6.239 buah dengan jumlah santri mencapai sekitar 1.084.801 orang. Dua dasawarsa kemudian yaitu tahun 1997, Depag mencatat jumlah pesantren sudah mengalami kenaikan mencapai 224% atau 9.388 buah, dan kenaikan jumlah santri mencapai 261% atau 1.770.768 orang. Data Depag tahun 2001 menunjukkan jumlah pesantren seluruh Indonesia sudah mencapai 11.312 buah dengan santri sebanyak 2.737.805 orang. Jumlah ini meliputi pesantren salafiyah, tradisional sampai modern (Ibid, 4).

Pada perkembangan berikutnya, jumlah pesantren di Indonesia mengalami pertambahan. Hampir semua provinsi di Indonesia terdapat pondok pesantren dan konsentrasinya terdapat di Pulau Jawa. Jumlah pesantren terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur. Menurut versi pemerintah (Direktori Kementerian Agama RI), di Jawa Timur terdapat sebanyak 4.404 buah, Jawa Barat sebanyak 4.322 buah, Jawa Tengah sebanyak 2.574 buah, Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak 1.043 buah, Sumatera Barat terdapat 206 buah dan Provinsi Riau sebanyak 139 buah pesantren.

Sementara itu, di Sumatera Utara berdasarkan data Podes (BPS) 2008 terdapat 194 buah pesantren. Dari jumlah tersebut sebanyak 96 buah pondok pesantren berada di Tapanuli bagian Selatan. Hal ini berarti hampir separuh jumlah pesantren di

Sumatera Utara berada di Tapanuli bagian Selatan. Dengan kata lain, Tapanuli bagian Selatan merupakan wilayah utama sebaran pondok pesantren di Provinsi Sumatera Utara.

Pondok pesantren tertua di Sumatera Utara adalah Pondok Pesantren Musthafawiyah yang terdapat di desa Purba Baru di Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren modern di Indonesia dan terbesar di Sumatera Utara. Pesantren yang juga dikenal dengan nama Pesantren Purba Baru ini memiliki 7.000 – 8000 santri/santriyati. Umumnya santri yang belajar di pondok pesantren ini adalah putra-putri dari Tapanuli Bagian Selatan ditambah putra-putri dari beberapa kabupaten/kota lain di Sumatera Utara seperti Langkat, Medan dan Tapanuli Tengah. Popularitas pondok pesantren Sumatera Utara ini juga diakui di provinsi lain seperti Riau, Sumatera Barat dan Jambi.

Selain pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru, di Sumatera Utara masih terdapat banyak lagi pesantren yang terbilang besar dan moderen. Di antara pesantren tersebut yaitu : Ponpes KH.Ahmad Dahlan di Sipirok, Ponpes Darul Mursyid di Saipar Dolok Hole, Ponpes Nurul Falah di Panompuan, Ponpes Al Kausar di Jl.Pelajar Ujung, Ponpes Raudah Hasanah di Paya Bundong Pancur Batu, Ponpes Darul Arafah di Lau Bakeri Deli Serdang, Ponpes Daar Ulum di kota Kisaran, Ponpes Al Falah di

kota Tanjung Balai, Ponpes Toyyibah di Pinang Lembang Labuhan Batu, Ponpes Muhammadiyah Langkat-Binjai dan lain sebagainya.

Kehadiran pesantren-pesantren dengan pola modern di Sumatera Utara di atas telah turut serta dalam proses pembangunan pendidikan dan sosial di Sumatera Utara bahkan tidak sedikit dari pondok-pondok pesantren tersebut telah menghasilkan ulama-ulama yang bukan hanya pada tingkat daerah akan tetapi juga tingkat nasional.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian survey yang ingin mengungkapkan pendapat dan kecenderungan pilihan santri terhadap organisasi dan politik pada Pemilu 2014 di Sumatera Utara.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh Pondok Pesantren tingkat Aliyah di Sumatera Utara. Sebagai sampel mewakili Pondok Pesantren, secara purposif ditentukan empat Pondok Pesantren yang dipandang mempunyai basis organisasi sosial keagamaan yang berbeda, yaitu Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru di Kabupaten Madina, Pondok Pesantren Muhammadiyah Kuala Madu di Binjai, Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah di Medan dan Pondok Pesantren Darul Ulum Kisaran.

Dari setiap Pondok Pesantren tersebut secara sistematis random diambil 50 orang santri. Sehingga sampel penelitian seluruhnya berjumlah 200 orang.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan kepada dua jenis, yaitu pertama sumber data yang bersifat primer dan kedua sumber data yang bersifat skunder. Sumber data yang bersifat primer ialah Santri yang terpilih sebagai sampel penelitian yang berjumlah 200 orang. Sedangkan sumber data yang bersifat skunder diperoleh dari dokumen dan buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah angket. Kemudian studi terhadap dokumen pondok pesantren yang dipandang berguna untuk penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan, selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan program SPSS.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Yang Dijadikan Sebagai Sampel Penelitian

1. Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Langkat-Binjai

a. Sejarah Ringkas Berdirinya

Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Langkat-Binjai adalah salah satu jenis pendidikan dalam perguruan Muhammadiyah yang memberikan pendidikan agama, pendidikan umum dan keterampilan. Pondok pesantren ini didirikan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Langkat-Binjai pada tanggal 23 Februari 1988 yang peletakan batu pertamanya dihadiri dan disaksikan oleh:

- 1) Keluarga Besar Muhammadiyah dan Aisyiyah tingkat Pimpinan Daerah, cabang dan ranting se-Kabupaten Langkat dan Kotamadya Binjai.
- 2) Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Sumatera Utara, Kadepag Tingkat II Langkat dan Bapak Walikotamadya Binjai.
- 3) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang diwakili oleh Alm. T.A. Lathief Rousydy, yang meresmikan sekaligus sebagai muballigh.

Dasar pemikiran pendirian Pondok Pesantren Moderen Muhammadiyah yaitu Firman Allah Surah al-Mujadalah ayat 11

yang artinya: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selain berusaha memahami dan mengamalkan ayat di atas sebagai motivasi utama, ada beberapa hal penting lain yang mendasari berdirinya Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Langkat-Binjai ini, antara lain :

- a) Sangat pentingnya kedudukan pendidikan iman dan taqwa dalam diri manusia pembangunan yang terdidik.
- b) Sangat dibutuhkannya proses pendidikan Islami yang mampu menahan arus negatif akibat modernisasi.
- c) Perlu diadakannya proses pendidikan yang seimbang antara pendidikan agama dengan pendidikan umum.
- d) Perlunya menyiapkan generasi terdidik yang berpengetahuan luas baik umum maupun agama, terampil, bermoral tinggi dan mandiri.

b. Prestasi Akademik.

Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun, proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Langkat Binjai telah berhasil meraih prestasi akademik yang sangat menggembirakan, di antaranya :

- 1) NEM tertinggi Madrasah Tsanawiyah se-Kabupaten Langkat.
- 2) Lulus program MAPK Medan.
- 3) Lulus program MAPK Aceh
- 4) Lulus PMP ke USU
- 5) Lulus PMP ke UNIMED
- 6) Masuk 10 besar Olympiade Matematika Wilayah Sumatera Utara dan Aceh.
- 7) Lulus SNMPTN ke USU.
- 8) Lulus SNMPTN ke UNIMED
- 9) Lulus PMP ke IAIN.
- 10) Lulus seleksi belajar ke Al-Azhar, Cairo Mesir.
- 11) Juara 1 lomba pidato Bahasa Arab tingkat Sumatera Utara yang diadakan oleh Fakultas Sastra USU.

c. Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler.

Pendidikan ekstrakurikuler yang diberikan kepada santri/ah di kampus Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Langkat-Binjai antara lain :

- 1) Pendidikan computer untuk semua tingkatan.
- 2) Pendidikan beladiri yang terdiri dari tapak suci dan karate.
- 3) Praktikum bahasa yaitu Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.
- 4) Drum Band.
- 5) Pendidikan Kepramukaan.

- 6) Pendidikan kesehatan santri/ah (UKS).
- 7) Muhadarah (Praktek pidato).
- 8) Mudzkarah (diskusi tentang hukum-hukum Islam).
- 9) Keterampilan jahit menjahit.

Di samping prestasi akademik yang sudah dicapai selama ini, Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Langkat-Binjai telah dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya baik sebagai lembaga pendidikan maupun sebagai salah satu amal usaha persyarikatan Muhammadiyah yang sekaligus merupakan keunggulan dibanding dengan pesantren-pesantren lain yang ada di Sumatera Utara, khususnya di bawah naungan Majelis Dikdasmen Wilayah Sumatera Utara, yaitu :

- 1) Membuat perjanjian kerja dengan seluruh tenaga kerja dan pengasuh Pondok Pesantren.
- 2) Melaksanakan tabungan kesejahteraan (dana pensiun) bagi seluruh tenaga kerja dan pengasuh Pondok Pesantren.
- 3) Mulai tahun 2000-2001, Pondok Pesantren bekerja sama dengan PT Asuransi Bumi Putera 1912 dalam hal memberikan asuransi kecelakaan untuk seluruh tenaga kerja dan pengasuh serta santri/ah.
- 4) Sebagai lembaga pendidikan di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah telah melaksanakan :

- a) Menyampaikan laporan bulanan tertulis kepada Majelis Dikdasmen Daerah, Wilayah dan Pusat tentang keadaan guru, siswa, kondisi keuangan dan keadaan dana pension.
- b) Membayar kewajiban pesantren secara rutin setiap enam bulan kepada Majelis Dikdasmen Daerah, wilayah dan pusat berupa Uang Infaq Guru (UIG) dan Uang Infaq Siswa (UIS).
- c) Menyampaikan daftar isian (quisioner) pesantren secara berkala kepada pemerintah.

d. Sarana dan Prasarana.

Pondok pesantren Modern Muhammadiyah Langkat-Binjai menyediakan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Saran dan prasarana tersebut yaitu :

- 1) Lokasi yang nyaman, asri dan jauh dari kebisingan.
- 2) Mesjid yang cukup baik dan megah berukuran 17x17 m.
- 3) Asrama putra dan putrid yang permanent.
- 4) Sarana listrik yang cukup.
- 5) Kapasitas air bersih yang cukup
- 6) Sarana olahraga yang memadai yaitu lapangan bola kaki, basket, volley, tennis meja, bulu tangkis dan takraw.
- 7) Perpustakaan.

- 8) Laboratorium yang terdiri dari laboratorium Fisika, Kimia, Biologi dan Bahasa.
- 9) Ruang makan yang representative.
- 10) Ruang belajar yang memenuhi standard pendidikan.
- 11) Ruang kantor yang permanent.
- 12) Kantin yang representative.
- 13) Ruang tamu dan ruang tunggu.
- 14) Ruang Guru/pengasuh pondok.
- 15) Koperasi yang representative.
- 16) Komputer 24 unit.
- 17) LCD 6 unit

e. Keadaan Guru dan Siswa.

Guru yang mengajar di Pesantren Modern Muhammadiyah Langkat-Binjai khususnya untuk madrasah Aliyah berjumlah 21 orang dengan kualifikasi pendidikan S.1 berjumlah 20 orang dan Diploma 1 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1:
Keadaan Guru

No	Jenis Guru	Pendidikan Terakhir			Jumlah
		SMA	Diploma	S.1	
1	PNS	-	-	-	-
2	Guru Tetap	-	-	-	-

	Yayasan				
3	Guru Tidak Tetap	-	1	20	21
4	Guru Bantu Pusat	-	-	-	-
5	Guru Bantu Lokal	-	-	-	-
Jumlah		-	1	20	21

Sedangkan perkembangan siswa Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah khususnya siswa Aliyah, setiap tahun jumlahnya mengalami naik turun. Akan tetapi pada tahun pelajaran 2011/2012 ini, jumlah siswanya mengalami peningkatan. Untuk lebih jelas mengenai perkembangan siswa Aliyah Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Langkat-Binjai, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2:

Keadaan siswa

No	Tahun Pelajaran	Kls I		Kls II		Kls III		Kls IV		Kls V		Kls VI		Jlh	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2003/2004	32	32	24	34	17	21	-	-	-	-	-	-	73	87
2	2004/2005	26	36	26	32	17	33	-	-	-	-	-	-	69	101
3	2005/2006	41	24	20	31	25	30	-	-	-	-	-	-	85	86
4	2006/2007	34	28	40	25	21	30	-	-	-	-	-	-	95	83
5	2007/2008	35	35	24	25	36	23	-	-	-	-	-	-	95	83
6	2008/2009	24	19	34	33	20	24	-	-	-	-	-	-	78	75
7	2009/2010	23	27	20	21	34	32	-	-	-	-	-	-	73	79

8	2010/2011	29	40	20	25	18	20	-	-	-	-	-	-	67	85
9	2011/2012	31	52	33	41	18	24	-	-	-	-	-	-	82	116

2. Pondok Pesantren Ar-Raudatul Hasanah

Untuk mengemukakan data berkenaan dengan Pondok Pesantren ar-Raudatul Hasanah, peneliti mengutip dari buku profilnya yang diberikan langsung oleh Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren ar-Raudatul Hasanah. Peneliti lebih menjelaskan data Madrasah Aliyahnya karena yang menjadi fokus penelitian ini adalah para santri di Madrasah Aliyahnya, tidak yang lainnya.

a. Sejarah Singkat

Pesantren Tarbiyah Islamiyah Ar-Raudhatul Hasanah Berdiri, Tahun 1982. Tanggal 15 Januari 1981, saat pelaksanaan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan acara masuk rumah baru kediaman Drs. M. Ilyas Tarigan, Ust. Usman Husni diundang untuk memberikan *taushiah* yang diantara isinya adalah menyinggung tentang keluarga yang telah mapan secara ekonomi dan intelektual, tapi belum mapan secara pendidikan agama, karena hingga saat itu, di antara keluarga belum ada yang menempuh pendidikan dalam bidang agama. Padahal, sudah banyak pengajian diadakan, bahkan banyak diantara anggota keluarga ini yang berjihad menghidupkan dakwah, mengingat masih banyak keluarga yang belum memeluk agama Islam. Di satu sisi, mereka juga harus telah memikirkan estafet perjuangan ini,

yang salah satu cara mempersiapkannya adalah melalui jalur pendidikan.

Masyarakat Paya Bundung dan sekitarnya yang sejak lama berkeinginan mendirikan Lembaga Pendidikan agama pun menyambut dengan antusias. Isi *taushiah* di atas seakan menjadi dorongan untuk segera mewujudkan lembaga yang dimaksud, sebagaimana yang sudah sering mereka gagas sejak lama. Di sela-sela pengajian khusus yang selalu diadakan di rumah bapak dr. H. Mochtar Tarigan, hal ini selalu didiskusikan. Pembahasan dalam pengajian-pengajian inilah sebenarnya yang menjadi embrio kelahiran 'Pesantren'. Dari komunikasi dan interaksi intensif di atas, dan setelah mengkaji model dan bentuk Lembaga Pendidikan yang diinginkan, maka disepakati untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Islam berbentuk pesantren.

Sebagai *follow up* dari pertemuan-pertemuan tersebut, diadakanlah pertemuan bulan Maret tahun 1982 di Sibolangit untuk membicarakan model dan nama Pesantren yang diinginkan. Muncullah lebih dari 20 nama Pesantren yang diusulkan. Namun pertemuan tersebut belum menghasilkan nama yang disepakati.

Dalam sebuah pengajian Tafsir di rumah dr. H. Mochtar Tarigan, saat pembahasan ayat 32 dari Surah An-Naba', pada jilid pertama halaman 16 dalam Tafsir Al-Shâwy disebutkan bahwa maksud dari kata '*hadâiq*' dalam ayat tersebut adalah '*ar-raudhatul*

hasanah' (taman surga yang indah). Pada saat itu, tercetuslah ide untuk menamai Pesantren ini dengan 'Ar-Raudhatul Hasanah', dengan harapan bahwa pesantren wakaf tersebut menjadi taman yang indah bagi para pewakif dan pelajarnya dan bagi semua yang berjihad di dalamnya. Setelah dibahas, masyarakat pun menyetujui nama tersebut. Setelah melalui proses yang panjang, pada tanggal 18 Oktober 1982, bertepatan dengan peringatan tahun baru Hijriah 1 Muharram 1403 H, dideklarasikanlah pendirian Pesantren Tarbiyah Islamiyah Ar-Raudhatul Hasanah secara resmi.

Setelah Pesantren berdiri di atas tanah wakaf dengan perkembangan yang menggembirakan, baik secara kuantitas maupun kualitas, muncullah pemikiran untuk meng-akte-notariskan sebuah badan hukum sebagai majelis kenazhiran, yang berperan untuk mengayomi dan menjaga kelestarian wakaf tersebut. Setelah peletakan batu pertama pembangunan Gedung Saudi pada tahun 1985, mulailah diinventarisir nama-nama yang bisa dimasukkan menjadi anggota dalam majelis ini, dengan berbagai pertimbangan; seperti dari keluarga pewakif, keterwakilan daerah di Tanah Karo, ketokohan, profesi, kedudukan di pemerintahan, dan lain-lain.

Majelis ini secara resmi di-akte-notariskan pada tanggal 13 Agustus 1986 oleh Notaris Djaidir, SH di Medan, dengan nama "Badan Wakaf Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah". Meskipun baru di-akte-notariskan pada tahun 1986, namun tersirat bahwa Badan

Wakaf ini didirikan terhitung sejak tanggal 1 Muharram 1403 H bertepatan dengan tanggal 18 Oktober 1982, sesuai dengan tanggal berdirinya Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Nama-nama yang tercantum sebagai pendiri Badan Wakaf tersebut adalah: H. Hasan Tarigan, H. M. Arsyad Tarigan, Usman Husni (Musyrif), H. Mochtar Tarigan (Ketua Umum), H. Abdul Muthalib Sembiring (Ketua I), H. M. Ardyan Tarigan (Ketua II), H. M. Ilyas Tarigan (Sekretaris Umum), H. Goman Rusydi Pinem (Sekretaris I), H. Musa Sembiring (Sekretaris II), H. Hilaluddin Sembiring (Bendahara I), H. Panji Mohammad Bahrum Tarigan (Bendahara II), Hj. Moendyah Mochtar, H. Syaad Afifuddin Sembiring, H. Sehat Keloko, H. Raja Syaf Tarigan, H. Benyamin Tarigan, H.M. Nurdin Ginting, H. Ja'far Tarigan (Anggota).

Setelah berdirinya Pesantren diikrarkan pada tahun 1982, maka dimulailah program pendidikan yang diawali dengan berdirinya Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), pada tahun 1986 dimulai program pendidikan dengan sistem Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah (KMI) dengan sistem asrama. Sebagai pelayanan terhadap masyarakat, di samping membuka program KMI, Pesantren juga membuka program Madrasah Tsanawiyah (1989) dan Madrasah Aliyah (1990). Meskipun demikian, kedua program pendidikan ini tetap tidak mengganggu sistem kepesantrenan yang

sejak semula dilaksanakan. Bahkan keduanya mendukung program KMI di atas.

b. Panca Jiwa Madrasah Aliyah PP Raudhatul Hasanah

Seluruh kehidupan di Madrasah Aliyah PP Raudhatul Hasanah didasarkan pada nilai-nilai yang dijiwai oleh suasana-suasana yang dapat disimpulkan dalam Panca Jiwa sebagai berikut:

1) Jiwa Keikhlasan

Jiwa ini berarti berbuat sesuatu bukan karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Segala perbuatan dilakukan dengan niat semata-mata untuk ibadah, *lillah*. Badan Wakaf ikhlas mengayomi tanpa berharap apapun dari Pesantren, Pimpinan ikhlas bekerja meskipun menyita waktu kesibukan mereka, Majelis Pengasuh ikhlas mendidik dan para guru ikhlas dalam membantu menjalankan proses pendidikan dan pengajaran, para santri ikhlas dididik dan para wali juga ikhlas menyerahkan putra-putrinya sepenuhnya kepada Pesantren untuk dididik. Jiwa ini menciptakan suasana kehidupan Pesantren yang harmonis antara Badan Wakaf yang dihormati, Pimpinan dan Majelis Pengasuh serta guru yang disegani, dan santri/wati yang taat, cinta dan penuh hormat. Jiwa ini menjadikan santri senantiasa siap berjuang di jalan Allah, di manapun dan kapanpun.

2) Jiwa Kesederhanaan

Kehidupan di Pesantren diliputi oleh suasana kesederhanaan. Sederhana tidak berarti pasif, tidak juga berarti miskin atau melarat. Justru dalam jiwa kesederhanaan itu terdapat nilai-nilai kekuatan, kesanggupan, ketabahan dan penguasaan diri dalam menghadapi perjuangan hidup. Di balik kesederhanaan ini terpancar jiwa besar, berani maju dan pantang mundur dalam segala keadaan. Bahkan di sinilah hidup tumbuhnya mental dan karakter yang kuat, yang menjadi syarat bagi perjuangan dalam segala segi kehidupan.

3) Jiwa Berdikari

Berdikari atau kesanggupan menolong diri sendiri merupakan senjata ampuh yang dibekalkan Pesantren kepada para santrinya. Berdikari tidak saja berarti bahwa santri sanggup belajar dan berlatih mengurus segala kepentingan sendiri, tetapi Pesantren sendiri sebagai lembaga pendidikan juga harus sanggup berdikasi sehingga tidak pernah menyandarkan kehidupannya kepada bantuan atau belas kasihan dari pihak-pihak lainnya.

Inilah *Zelp berdruijing system* (sama-sama memberikan iuran dan sama-sama memakai/menggunakan). Dari pada itu, Pesantren tidaklah bersifat kaku, sehingga menolak orang-orang yang hendak membantu. Semua pekerjaan yang ada di dalam Pesantren dikerjakan oleh para pengelola dan para santrinya sendiri.

4) Jiwa Ukhuwwah Islamiyah

Kehidupan di Pesantren diliputi suasana persaudaraan yang akrab, sehingga segala suka dan duka dirasakan bersama dalam jalinan *ukhuwwah islamiyah*. Tidak ada dinding yang dapat memisahkan antara mereka. *Ukhuwwah* ini bukan saja selama mereka di Pesantren, tetapi juga mempengaruhi ke arah persatuan umat dalam masyarakat setelah mereka terjun di masyarakat.

5) Jiwa Bebas

Bebas dalam berpikir dan berbuat, bebas dalam menentukan masa depan, bebas dalam memilih jalan hidup, dan bahkan bebas dari berbagai pengaruh negatif dari luar dan masyarakat. Jiwa bebas ini akan menjadikan santri/wati berjiwa besar dan optimis dalam menghadapi segala kesulitan. Hanya saja dalam kebebasan ini seringkali ditemukan unsur-unsur negatif, yaitu apabila kebebasan itu disalahgunakan, sehingga terlalu bebas (liberal) dan berakibat hilangnya arah dan tujuan atau prinsip.

Sebaliknya ada pula yang terlalu bebas (untuk tidak mau dipengaruhi), berpegang teguh kepada tradisi yang dianggapnya sendiri pernah menguntungkan pada zamannya, sehingga tidak mau menoleh kepada zaman yang telah berubah. Akhirnya dia sudah tidak lagi bebas, karena mengikatkan diri pada yang diketahui saja.

Maka kebebasan ini harus dikembalikan ke aslinya, yaitu bebas di dalam garis-garis positif yang masih berada dalam rel-rel

yang diridhoi Allah SWT, dengan penuh tanggung jawab, baik di dalam kehidupan Pesantren itu sendiri, maupun dalam kehidupan masyarakat.

Jiwa yang meliputi suasana kehidupan Pesantren itulah yang dibawa oleh santri sebagai bekal utama di dalam kehidupannya di masyarakat. Jiwa ini juga harus dipelihara dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya.

a. Motto Madrasah Aliyah PP Raudhatul Hasanah

Pendidikan Madrasah Aliyah PP Raudhatul Hasanah menekankan pada pembentukan pribadi muslim, mukmin dan muhsin yang Berbudi Tinggi, Berbadan Sehat, Berpengetahuan Luas, Berpikiran Bebas dan Beramal Ikhlas. Kriteria atau sifat-sifat utama ini merupakan motto pendidikan di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah.

1) Berbudi Tinggi

Berbudi tinggi merupakan landasan paling utama yang ditanamkan oleh Pesantren ini kepada seluruh santrinya dalam semua tingkatan; dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Realisasi penanaman motto ini dilakukan melalui seluruh unsur pendidikan dan pengajaran yang ada.

2) Berbadan Sehat

Tubuh yang sehat adalah sisi lain yang dianggap penting dalam pendidikan di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah ini. Dengan

tubuh yang sehat para santri akan dapat melaksanakan tugas hidup dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan kesehatan dilakukan melalui berbagai kegiatan olahraga, dan bahkan ada olahraga rutin yang wajib diikuti oleh seluruh santri sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3) Berpengetahuan Luas

Para santri di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah ini dididik melalui proses yang telah dirancang secara sistematis untuk dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mereka. Santri tidak hanya diajari pengetahuan, lebih dari itu mereka diajari cara belajar yang dapat digunakan untuk membuka khazanah pengetahuan. Majelis Pengasuh sering berpesan bahwa pengetahuan itu luas, tidak terbatas, tetapi tidak boleh terlepas dari berbudi tinggi, sehingga seseorang itu tahu untuk apa dia belajar serta tahu prinsip untuk apa dia menambah ilmu.

4) Berpikiran Bebas

Berpikiran bebas tidaklah berarti bebas sebebas-bebasnya (liberal). Kebebasan di sini tidak boleh menghilangkan prinsip, teristimewa prinsip sebagai muslim, mukmin dan muhsin. Justru kebebasan di sini merupakan lambang kematangan dan kedewasaan dari hasil pendidikan yang telah diterangi petunjuk *Ilahi* (*hidayatullah*). Motto ini ditanamkan sesudah santri memiliki budi tinggi atau budi luhur dan sesudah ia berpengetahuan luas.

5) Beramal Ikhlas

Dengan menghayati secara benar keempat sifat utama sebelumnya, diharapkan santri dapat beramal ikhlas dalam semua perbuatannya, sepenuhnya *lillah*, hatinya *billah* dan aktifitasnya *fillah*, sebagaimana tercantum dalam Panca Jiwa Pesantren.

b. Panca Jangka Madrasah Aliyah PP Raudhatul Hasanah

Dalam rangka mengembangkan dan memajukan Madrasah, dirumuskan Panca Jangka yang merupakan Program Kerja yang memberikan arah dan panduan untuk mewujudkan upaya pengembangan dan pemajuan tersebut. Adapun Panca Jangka itu meliputi bidang-bidang berikut:

1) Pendidikan dan Pengajaran

Maksud jangka ini adalah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan dan menyempurnakan pendidikan dan pengajaran di Pesantren sebagai induk Madrasah Aliyah PP Raudhatul Hasanah. Usaha ini selalu menjadi perhatian utama, mengingat tuntutan akan perubahan yang akomodatif, selama tidak mengubah nilai-nilai kepesantrenan. Dalam hal ini, Pendidikan dan Pengajaran difokuskan kepada empat tujuan: Kemasyarakatan, Hidup Sederhana, Tidak Berpartai dan Ibadah *thalabul 'ilmi*.

2) Kaderisasi

Sejarah timbul dan tenggelamnya suatu usaha, terutama hidup dan matinya pesantren-pesantren di tanah air, memberikan

pelajaran kepada para pengelola Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah tentang pentingnya perhatian terhadap kaderisasi. Sudah banyak riwayat tentang pesantren-pesantren yang maju dan terkenal pada suatu ketika, tetapi kemudian menjadi mundur dan bahkan mati setelah pendiri atau pewakifnya meninggal dunia. Diantara faktor terpenting yang menyebabkan kemunduran ataupun matinya pesantren-pesantren tersebut adalah tidak adanya program kaderisasi yang baik.

Bercermin pada kenyataan ini, Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah memberikan perhatian terhadap upaya menyiapkan kader-kader yang akan melanjutkan cita-cita Pesantren.

3) Pergedungan

Jangka ini memberikan perhatian kepada upaya penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pengajaran yang layak bagi para santri.

4) Khizanatullah

Di antara syarat terpenting bagi sebuah lembaga pendidikan agar tetap bertahan hidup dan berkembang adalah memiliki sumber dana sendiri. Sebuah lembaga pendidikan yang hanya menggantungkan hidupnya kepada bantuan pihak lain yang belum tentu didapat, tentu tidak dapat terjamin keberlangsungan hidupnya. Bahkan hidupnya akan seperti ilalang di atas batu, "Hidup enggan mati tak hendak".

Di antara usaha yang dilakukan untuk memenuhi maksud ini adalah membentuk suatu bidang usaha yang mengelola semua jenis usaha yang dimiliki Pesantren. Bidang itu disebut dengan Bidang Usaha Milik Pesantren (BUMP). Hal ini agar Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah tetap eksis, bertahan hidup dan berkembang.

5) Kesejahteraan Keluarga Pesantren

Yang disebut dengan keluarga Pesantren adalah mereka yang membantu langsung jalannya pendidikan dan pengajaran di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Jangka ini bertujuan untuk memberdayakan kehidupan keluarga-keluarga yang membantu dan bertanggungjawab terhadap hidup dan matinya Pesantren secara langsung, sehingga mereka tidak menggantungkan penghidupannya kepada Pesantren. Mereka hendaknya dapat memberi penghidupan kepada Pesantren sesuai dengan semboyan: "Hidupilah Pesantren dan jangan menggantungkan hidup kepada Pesantren", juga "Berjalah tapi jangan minta jasa"

c. Struktur Organisasi

Lembaga tertinggi dalam organisasi Madrasah Aliyah PP Ar-Raudhatul Hasanah Medan adalah Badan Wakaf. Badan Wakaf adalah semacam badan legislatif yang beranggotakan 17 orang, berfungsi sebagai nazhir wakaf dan berperan menjaga serta menyuburkan wakaf Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Sementara untuk pelaksanaan dan perkembangan pendidikan dan pengajaran

di Pesantren, Badan Wakaf membentuk Majelis Pimpinan terdiri dari 3 orang anggota Badan Wakaf, yang berperan sebagai mandataris Badan Wakaf dan sebagai mediator antara pengelola dalam Pesantren dengan Badan Wakaf. Untuk tugas dan kewajiban keseharian amanat ini dijalankan oleh Majelis Pengasuh yang dikoordinir oleh Direktur Pesantren.

Direktur dan Majelis Pengasuh Pesantren merupakan semacam badan eksekutif, bertanggungjawab terhadap operasional keseharian pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, dibantu oleh kepala bidang yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang pengasuhan, bidang kesejahteraan, bidang penelitian dan pengembangan, dan bidang usaha milik pesantren beserta semua guru dan karyawan. Selain memimpin bidang-bidang yang ada dalam Pesantren, Majelis Pengasuh juga berkewajiban mengasuh para santri sesuai dengan sunnah Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Adapun bidang pendidikan yang ada di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah membina lembaga-lembaga yang terdiri dari lembaga formal dan non-formal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah (KMI).

d. Sistem Pendidikan

1) Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah

Madrasah Aliyah adalah sistem pendidikan formal di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah yang dibuka sejak tahun 1990. Madrasah ini merupakan lembaga pendidikan lanjutan tingkat menengah atas yang berbasis dan berbentuk pesantren berasrama, dengan masa studi 3 tahun bagi tamatan SLTP/MTs.

Pendidikan formal di atas sebagai implementasi dari misi madrasah, mempersiapkan individu-individu yang unggul dan berkualitas menuju terbentuknya *Khairul Ummah* (umat terbaik) yang dikeluarkan untuk manusia. Mempersiapkan kader-kader ulama dan pemimpin umat (*mundzirul qaum*) yang *mutafaqqih fi al-din*; baik sebagai ilmuwan akademisi maupun sebagai praktisi, yang mau dan mampu untuk melaksanakan dakwah *ila al-khair*, 'amar ma'ruf nahi munkar.

2) Akreditasi

Adapun akreditasi yang telah diterima Madrasah Aliyah adalah sebagai berikut:

- a) DEPAG RI No. B/E.IV/MA/0257/1994 dengan status DIAKUI, dan telah diperbaharui No. 291/MA/12.75/2006 dengan nilai "A" dan telah diakreditasi ulang yang tertuang dalam Sertifikat Akreditasi BAN-S/M No. Ma. 002807 tanggal 05 Oktober 2009.

b) Universitas Islam Madinah Saudi Arabia pada tanggal 19 November 1995 dengan nomor 109/4 yang ditandatangani oleh Dekan Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa baru Dr. Abdurrahman bin Abdullah al-Zaid.

c) Universitas Al-Azhar Kairo Mesir pada tanggal 22 Agustus 1996 dengan nomor 29 yang ditandatangani oleh Muhammad Abdul Rahman Arab, dan telah diperpanjang pada 1 Maret 2002, dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Umum Mahasiswa Asing, Dr. Muhammad Syaui al-Subky.

3) Ciri / Karakteristik

Dilihat dari jenjang dan masa studi, Madrasah Aliyah Raudhatul Hasanah hanya 3 tahun, namun terdapat beberapa perbedaan mendasar dari sekolah lain, diantaranya :

- Selain nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, Madrasah Aliyah juga berlandaskan dan mengacu pada nilai-nilai kepesantrenan dan kejuangan.
- Pengajaran di Madrasah Aliyah PP Raudhatul Hasanah lebih ditekankan pada aspek jiwa, akhlak dan wawasan guru yang harus dimiliki oleh para siswa atau alumninya. Itu sebabnya fungsi guru di madrasah tidak terbatas pada *transfer of knowledge* namun lebih pada upaya *transfer of value and morality*.

4) Kurikulum

Kurikulum yang digunakan di Madrasah Aliyah PP Raudhatul Hasanah, adalah perpaduan antara kurikulum Pondok Modern Gontor dengan SKB 3 Menteri, yang meliputi sebagai berikut : Kelas X

No	Pelajaran	Semester Ganjil	Semester Genap
1	Insyah (mengarang berbahasa Arab)	2	2
2	Muthola'ah	2	2
3	Mahfuzhat	1	1
4	Nahwu	3	3
5	Sharaf	1	1
6	Balaghah	2	2
7	Tarikh Islam	1	1
8	Tarjamah	1	1
9	Tafsir	2	2
10	Hadits	1	1
11	Tauhid	1	1
12	Fiqih	2	2
13	Ushul al-Fiqh	2	2
14	Bahasa Inggris	3	3
15	Grammar	2	2
16	Matematika	4	4
17	Fisika	2	2
18	Kimia	2	2
19	Biologi	2	2
20	Bahasa Indonesia	2	2
21	Akuntansi	1	1
22	Ekonomi	1	1
TOTAL		40	40

Kelas XI

No	Pelajaran	IPA		IPS	
		Sem. Ganjil	Sem. Genap	Sem. Ganjil	Sem. Genap
1	Insya (mengarang berbahasa Arab)	2	2	2	2
2	Muthala'ah	2	2	2	2
3	Mahfuzhat	1	1	1	1
4	Nahwu	3	3	3	3
5	Sharaf	1	1	1	1
6	Balaghah	2	2	2	2
7	Tarjamah	1	1	1	1
8	Tafsir	2	2	2	2
9	Hadits	1	1	1	1
10	Musthalah Hadits	1	1	1	1
11	Tauhid	1	1	1	1
12	Fiqih	2	2	2	2
13	Ushul al-Fiqh	2	2	2	2
14	Adyan (perbandingan agama)	1	1	1	1
15	Bahasa Inggris	3	3	3	3
16	Grammar	2	2	2	2
17	Matematika	4	4	4	4
18	Fisika	3	3	-	-
19	Kimia	3	3	-	-
20	Biologi	2	2	-	-
21	Bahasa Indonesia	2	2	2	2
22	Akuntansi	-	-	3	3
23	Ekonomi	-	-	3	3
24	Sosiologi	-	-	2	2
TOTAL		40	40	40	40

Kelas XII

No	Pelajaran	IPA		IPS	
		Sem. Ganjil	Sem. Genap	Sem. Ganjil	Sem. Genap
1	Insyah (mengarang bahasa Arab)	2	2	2	2
2	Muthala'ah	2	2	2	2
3	Nahwu	3	3	3	3
4	Sharaf	1	1	1	1
5	Balaghah	2	2	2	2
6	Tarjamah	1	1	1	1
7	Tafsir	2	2	2	2
8	Hadits	1	1	1	1
9	Musthalah Hadits	1	1	1	1
10	Tauhid	1	1	1	1
11	Fiqih	2	2	2	2
12	Ushul al-Fiqh	2	2	2	2
13	Adyan (perbandingan agama)	1	1	1	1
14	Bahasa Inggris	3	3	3	3
15	Grammar	2	2	2	2
16	Matematika	4	4	4	4
17	Fisika	3	3	-	-
18	Kimia	4	4	-	-
19	Biologi	3	3	-	-
20	Bahasa Indonesia	2	2	2	2
21	Akuntansi	-	-	4	4
22	Ekonomi	-	-	4	4
23	Tata Negara	-	-	2	2
24	Sosiologi	-	-	2	2
TOTAL		40	40	40	40

5) Ekstra Kurikuler

Adapun ekstra kurikuler di Madrasah Aliyah, meliputi dua hal :

a. Ekstra kurikuler wajib :

- Latihan organisasi
- Pidato dalam 3 bahasa
- Pramuka
- Komputer
- Kajian kitab klasik (*turats*)
- Praktek mengajar
- Manasik haji
- Pembekalan kewirausahaan
- Jurnalistik
- Kursus Mahir Dasar Pembina Pramuka

b. Ekstra kurikuler pilihan :

- Olah raga
- Kesenian
- Ketrampilan

Rekapitulasi Siswa/Siswi

Tahun Ajaran	Kelas			Jumlah
	X	XI	XII	
2004/2005	234	218	191	643
2005/2006	197	183	167	547
2006/2007	274	210	160	644
2007/2008	290	240	201	731
2008/2009	365	248	220	833
2009/2010	322	265	234	821
2010/2011	361	302	250	913
2011/2012	437	344	294	1075

Kelulusan Ujian Nasional (UN)

Tahun Ajaran	IPA	Kelulusan	IPS	Kelulusan
2004/2005	74	94,59 %	117	82,05 %
2005/2006	80	100,00 %	87	100,00 %
2006/2007	70	100,00 %	90	98,89 %
2007/2008	130	93,85%	71	100,00 %
2008/2009	104	98,08%	118	97,46 %
2009/2010	129	100,00 %	105	98,10 %
2010/2011	141	69,45 %	109	96,33 %

Daftar Nilai Rata-rata Ujian Nasional

Tahun Ajaran	IPA			IPS		
	B. Indo	B. Ing	Mtk	B.Ind	B.Ing	Ekonomi
2004/2005	7,77	8,12	7,91	7,22	7,57	7,59
2005/2006	7,68	7,13	7,41	7,22	7,97	7,61
2006/2007	7,62	9,21	7,87	7,24	8,74	5,64

Tenaga Pengajar

No	Nama Guru	Pendidikan	Mata Pelajaran
1	Muhammad Subhan, S. Ag	S1- IAIN SU	Qur'an Hadist
2	Muhammad Ilyas, S.Pd., M. Si	S2- IPB	Biologi
3	Rasyidin Bina, Drs. MA	S2- IAIN SU	B.Arab
4	H. Solihin Adin, S. Ag	S1- IAIN SU	B. Arab
5	Faturrahman, S. Ag	S1- IAIN SU	Fiqh
6	Rosmalem Ginting, Ir, S.Pd	S1- UMN/RIAMA	Fisika
7	Abdul Hamid Adam,	S1- SUKMA/STAIRA	PAI

	SE, S.Pd.I		
8	Aisah S. Ag, S.Pd.I	S1- IAIN/STAIRA	PAI
9	Dermawan, SE, S.Pd.I	S1- SUKMA/STAIRA	SKI
10	Miftahuddin Arifin, SS, S.Pd.I	S1- USU/STAIRA	B. Arab
11	Zulfikri, S.Pd.I	S1- STAIRA	B.Ingggris
12	Faizun Fahmi, M.S.I	S2- UIN WALISONGO	Fiqh
13	Holidah, S.Ag	S1- IAIN SU	Qur'an Hadist
14	H. Syamsuddin Tarigan, Lc, S.Pd.I	S1- Azhar Cairo/STAIRA	Aqidah Akhlak
15	Joko Kuncoro, SH, MKn	S2- USU	Tata Negara
16	Purnama Sembiring, SE, S.Pd.I	S1- UMSU/STAIRA	PAI
17	Amman Lingga, S. Ag, S.Pd.I	S1- IAIN/STAIRA	PAI
18	Evianta Ginting, S.Sos	S1- USU	PPKN
19	Fahmi Jamaluddin, SE	S1- SUKMA	B.Ingggris
20	Swanto, SE	S1- UMSU	Ekonomi
21	H. Andi Wahyudi, Lc., MA	S1- Azhar Cairo	B. Arab
22	Evi Linda Nasution, S. Pd	S1- UISU	B.Indonesia
23	H. Habibie Sembiring, Lc, S.Pd.I	S1- Azhar Cairo/STAIRA	Fiqh
24	Luqman Hakim Arifin, SH, S.Pd.I	S1- UMSU/STAIRA	SKI
25	Aam Aminuddin, SH	S1- UMSU	B. Indonesia
26	Dewindarni, SE, S.Pd	S1- UMSU	Ekonomi
27	Jawarni, S. Pd	S1- UISU	Biologi
28	Rini Hartati, S.Sos, S.Pd	S1- USU	Geografi
29	Sulastri, S.Si	S1- USU	Matematika
30	Ahmad Nasihin, SHI	S1- ISID	B.Ingggris
31	Pardamean Hsb, S. Si	S1- UNIMED	Biologi
32	Tut Wuri Handayani, S. Pd, I	S1- STAIRA	Akuntansi

33	Masyitah Fachri, S.Pd	S1- UNIMED	Kimia
34	Ishaq Saragih, S.Pd	S1- UMN	Matematika
35	Suprianto, S.Si., A.pt	S1-USU	Kimia
36	Basyaruddin Hrp, S.Pd	S1- UNIMED	Matematika
37	H. Mukhlis Mubarak,Lc,M.S.I	S2- UIN Yogyakarta	Bahasa Arab
38	H. Alamsyah Daulay, Lc	S1- Azhar Cairo	Aqidah Akhlak
39	Edi Suprpto, S. Si	S1- USU	Matematika
40	M. Hendripal Panjaitan S. Pd	S1- Asahan	Bahasa Inggris
41	M. Yusuf Fadli, S.Pd	S1- UNIMED	Matematika
42	Sarmadiani Rambe, S.E. S.Pd	S1-UMSU	Bahasa Arab
43	Eli Marni, S.H. S.Pd.I	S1-UMSU/STAIRA	Bahasa Arab
44	Muchlis Ichsan,S.Pd.I	S1-STAIRA	Matematika
45	Darvina Lubis, S.Ag	S1-IAIN SU	Bahasa Arab
46	Elvi Yulianti, S.Pd	S1-UISU	Bahasa Indonesia
47	Rika Agustina, Lc	S1-Azhar Cairo	Aqidah Akhlak
48	Ovi Ramadhani,SQ	S1-MITA Al IRSYAD	Qur'an Hadist
49	Azhar, S.Th.I	S1-ISID	Aqidah Akhlak
50	Muhammad Zuhirsyan,Lc.MA	S2-IAIN SU	Fiqih
51	Qosim Nursheha Dzulhadi,Lc	S1-Azhar Cairo	Qur'an Hadist
52	Desi Sri Pascasari Sembiring,SP,SE,M.Si	S2-USU	Biologi
53	Hamdan Noor,Lc	S1-Damascus Syria	Bahasa Arab
54	Hesty Asnita, S.Pd	S1-UNIMED	Fisika
55	Citra Arihta Meliala,S.Pd	S1-UNIMED	Akutansi
56	Maryam Jamilah Batubara,Lc	S1- Azhar Cairo	Bahasa Arab
57	Khairul Anwar,S.H.I, S.Pd.I	S1-ISID/STAIRA	Fiqih
58	Nurul Huda Prasetyo, S.Ag	S1- IAIN SU	Aqidah Akhlak

1. Fasilitas

Adapun Fasilitas di madrasah aliyah meliputi :

- a. Sarana Belajar (Kelas) Yang masih Sederhana
- b. Kantor Administarasi
- c. Ruang laboratorium bahasa
- d. Ruang laboratorium FIKIB
- e. Ruang Perpustakaan
- f. Masjid
- g. Toko Siswa dan kantin
- h. Asrama siswa yang masih sederhana
- i. Balai pengobatan siswa dan masyarakat (BPSM)
- j. Gedung Pertemuan
- k. Sarana olah raga meliputi : lapangan bola kaki, basket, badminton, volley, takraw, tenis meja

3. Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing

a. Sejarah Berdirinya

Madrasah Aliyah (MA) Musthafawiyah merupakan bagian dari Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain program tingkat SMTA untuk kelas V s/d VII, pesantren ini juga mengasuh tingkat SMP, yaitu Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk kelas I s/d IV. Dengan

demikian pesantren ini melaksanakan program pondok pesantren selama 7 (tujuh) tahun.

Pada tahun 2012 ini Pondok Pesantren Musthafawiyah, Purba Baru, Mandailing genap berusia satu abad (100 tahun). Adalah Syeikh H. Musthafa Husein Nasution yang mendirikan pesantren ini pada tahun 1912. Saat ini pesantren dipimpin oleh cucu pendirinya, yaitu H. Mustafa Bakri Nasution. Khusus untuk tingkat Madrasah Aliyah di Pesantren Musthafawiyah telah berdiri sejak tahun 1985. Berdasarkan data tahun 2011 MA Musthafawiyah memiliki Izin Operasional dengan Nomor: 245/MA/12.12/2006 tertanggal 1 Maret 2006, NSM: 312.12.12.09.001/131.21.21.3000.10, NPSM: 10208268, NPWP: 20 024 487 9 118 000 dengan Akreditasi Peringkat: B (Baik). MA Musthafawiyah saat dikepalai oleh Drs. Musonnif.

Dalam perjalanannya Pondok Pesantren Musthafawiyah telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan. Tampuk kepemimpinan yang sekarang merupakan generasi ke-3 setelah mengalami 4 kali pergantian. Kepemimpinan awal sebagai masa berdirinya pesantren ini berlangsung selama 43 tahun, yaitu pada masa Syeikh H. Musthafa Husein Nasution dari tahun 1912 s/d 1955. Ketika itu gedung sekolah baru berjumlah 9 lokal saja dengan jumlah snatri sebanyak 450 orang. Setelah pendiri pesantren ini meninggal dunia, kemudian digantikan oleh anaknya

H. Abdollah Musthafa Nasution. Kepemimpinan beliau di pesantren ini berlangsung selama 41 tahun sejak tahun 1955 s/d 1996. Kepemimpinan beliau terbilang sangat gemilang, sebab kemajuan terjadi demikian pesat hingga santrinya berjumlah 8.500 orang dengan gedung sekolah 74 lokal, ruang asrama putri sebanyak 50 kamar, perpustakaan 1 unit, mesjid 2 unit, koperasi dan ruang perkantoran masing-masing 1 unit. Setelah beliau meninggal dunia, kepemimpinan beralih kepada adik kandungnya, yaitu Drs. H. Abdul Kholik Nasution, sejak tahun 1996 s/d 2003 (sekitar 8 tahun). Pada masa kepemimpinan beliau ini, jumlah santri yang menimba ilmu di pesantren ini berjumlah 6.300 orang, jumlah lokal kemudian bertambah menjadi 77 lokal, asrama putri, perpustakaan, mesjid, koperasi dan ruang perkantoran tidak mengalami perubahan dari segi jumlahnya. Pada tahun 2003 hingga sekarang tampuk kepemimpinan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandaling dilanjutkan oleh anak dari H. Abdollah Musthafa Nasution, pimpinan generasi kedua yang tidak lain cucu pendirinya, Syeikh H. Musthafa Husein Nasution, yaitu H. Mustafa Bakri Nasution.

Dalam kepemimpinan H. Mustafa Bakri Nasution, beliau berusaha semaksimal mungkin melanjutkan pembangunan pesantren ini dalam segala bidang, baik fisik maupun non-fisik. Pembangunan pertama dimulai dari memperhatikan dan

meningkatkan kesejahteraan guru, yang dibarengi dengan peningkatan jumlah santri, dan kemudian mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana sebagai pendukung dan penunjang kemajuan pendidikan. Dari gebrakan beliau ini, maka jumlah santri yang belajar di pesantren ini sudah berjumlah 7.185 orang dengan jumlah kelas sebanyak 92 ruang, ada 43 ruang untuk asrama putri, masing-masing 1 unit untuk ruangan perpustakaan, koperasi, lapangan parkir roda dua, halte, sarana air bersih, dan laboratorium internet. Di samping itu terdapat masing-masing 2 unit mesjid, ruang kantor piket dan ruang komputer. Sebanyak 4 unit ruang perkantoran, 3 unit ruang laboratorium bahasa, 4 unit ruang kamar mandi, dan 50 kamar WC umum.

b. Keadaan Guru dan Staf

Guru atau tenaga pengajar merupakan salah satu komponen MA Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal di samping pegawai, siswa dan sumber daya material berupa gedung, kantor, ruang belajar dan fasilitas lainnya. Keberadaan guru merupakan penting dalam menentukan kegiatan belajar mengajar guna mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu jumlah dan mutu guru menjadi ukuran perkembangan suatu sekolah. Untuk tingkat Madrasah Aliyah guru yang mengajar di pesantren ini berjumlah 48 orang yang terdiri dari 16 orang guru laki-laki dan 32 orang guru perempuan. Para guru ini dilayani oleh 7 orang pegawai, 4 orang di

antaranya laki-laki dan 3 orang perempuan. Adapun staf secara keseluruhan sebagaimana di bawah ini:

1. Staf Tata Usaha

- Mukhlis Lubis (Skr.)
- Yuhibban A.R. Sir.
- Abdul Kholid Nst.
- Irpan Nst.
- Ahyar Nst.
- Ermina Pohan
- Hj.Nurhamidah Lbs.

3. Staf Kurikulum

- H. Arda Bili Batubara (PKS)
- Amir Husein Lubis
- Adanan Nasution
- Hj.Hannah Chan., S.Pd.I
- H. Alwin Tanjung
- Mulkanuddin A.Ma.
- Luci Andriani, SP., S.Pd.I

5. Staf Kesiswaan

- Ja'far Lubis (PKS)
- Ahmad Nurdin Nst.
- Kasmir Hasibuan
- Mhd. Tohir Hasibuan
- Mhd. Ramli
- Zulfan Efendi

2. Staf MAS SKB 3 Menteri

- Drs. Musonnif (Kep.)
- Hj. Hannah Chan., S.Pd.I
- Ahmad Arriadi, S.Pd.I
- Ramlan
- Irma Suryani

4. Staf Keuangan

- Ridwan Efendi Nasution
- Drs.Mhd. Yazid Lubis
- Bangun Siddik Sir.
- Marwanuddin Nst.
- Nurhamidah Lubis
- Hannah Chan., S.Pd.I
- Dra. Warlina Batubara
- Hasrin Nasution
- Mustamam Hasibuan
- Toibah Nasution

6. Staf Keamanan

- Mhd. Ridwan Nasution
- Abdussomad Rangkuti
- Bangun Siddik Sir.
- Ridwan EfendiNasution
- Miswaruddin Rangkuti
- Hasanuddin Nasution
- Muammar Rangkuti
- Satpam

c. *Keadaan Siswa*

Hingga tahun pelajaran 2011-2012 jumlah siswa MA Musthafawiyah sebanyak 2.382 siswa yang dibagi ke dalam kelas IPA dan IPS dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Kelas	ROMBEL			SANTRI			KET
	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	
I IPA	4	4	8	219	373	592	
I IPS	4	3	7	261	149	410	
II IPA	4	3	7	229	167	396	
II IPS	3	3	6	193	142	335	
III IPA	4	3	7	211	201	412	
III IPS	3	2	5	148	89	237	
TOTAL	22	18	40	1.261	1.121	2.382	

Sumber: Dokumen Kepala Sekolah MA Musthafawiyah 2011

Berdasarkan tabel di atas dipahami bahwa ternyata jumlah pelajar laki-laki di sekolah ini lebih banyak (1.261 orang) dibanding dengan jumlah pelajar perempuan (1.121 orang), suatu kenyataan yang mungkin agak berbeda dengan sekolah-sekolah lain, di mana perempuan biasanya lebih banyak ketimbang pelajar laki-laki.

Gambaran di atas juga mengindikasikan bahwa siswa kelas VII atau kelas 1 lebih banyak yakni 1002 orang, kelas VIII atau kelas 2 sebanyak 734 orang, sedangkan kelas IX atau kelas 3 berjumlah 649 orang.

d. *Struktur Organisasi*

Untuk menjalankan roda organisasi pada Pesantren Musthafawiyah secara umum dan pada Madrasah Aliyahnya secara khusus maka secara manajerial hubungan antara atasan dengan bawahan dan spesialisasi kerja dapat dilihat dari struktur organisasi dan kepemimpinan yang ada. Untuk mengetahui bidang-bidang tugas apa saja yang ada pada MA Musthafawiyah dapat dilihat pada kepngurusan di bawah ini:

Tabel 3:

**Struktur Organisasi Kepengurusan
Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru
Tahun 2010**

1.	Pimpinan/Mudir	:	H. Musthafa Bakri Nasution
2.	Wakil Pimpinan/Wakil Mudir	:	H. Abdul Hakim Lubis
3.	Pimpinan Asrama Putri	:	Hj. Zahara Hannum Lubis
4.	Kepala Sekolah	:	H. Muhammad Yakub Nasution
5.	Sekretaris	:	Mukhlis Lubis
6.	Bendahara	:	Hj. Marzuki Tanjung
7.	Wakil Bendahara	:	Ahmad Lubis
8.	Ro'isul Mu'allimin	:	H. Abdi Batubara
9.	Wakil Ro'isul Mu'allimin	:	Amir Husein Lubis
10.	PKS Bidang Kurikulum	:	H. Arda Billi Batubara
11.	PKS Bidang Kesiswaan	:	Ja'far Lubis
12.	PKS Bidang Keamanan	:	Muhammad Ridwan Nasution
13.	PKS Bidang Ibadah	:	H. Muhammad Dasuki Nasution
14.	PKS Bidang Kebersihan	:	Sutan Karitua Lubis

15.	PKS Bidang Sarana/Prasarana	:	Abdussomad Rangkuti, S.Pd.I
16.	Kabid. Litbang	:	H. Mahmuddin Pasaribu
17.	Kabag Perpustakaan	:	Amir Husein Lubis
18.	Kabag Humas	:	H. Zulkarnein Lubis
19.	Ketua Koperasi Karyawan	:	Mukhlis Lubis
20.	Kabid Majelis Fatwa	:	H. Abdi Batubara
21.	Kepala Ponpes Salafiyah	:	Mukhlis Lubis
22.	Kepala MTs Prog. SKB 3 Menteri	:	Muhammad Faisal Hs, SP
23.	Kepala MAS Prog. SKB 3 Menteri	:	Drs. Musonnif
24.	Staf-Staf		

4. Pesantren Modern Daar Al Uluum Kisaran

Bagian ini memaparkan secara umum sejarah ringkas Pesantren Daar Al Uluum dan sekilas tentang perkembangannya. Pada Tahun 1972 Bapak H. Abdul Manan Simatupang yang pada waktu itu menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan mempunyai keinginan untuk membangun dan mendirikan sebuah perguruan agama Islam atau Pesantren di Kabupaten Asahan. Hasrat tersebut dikemukakannya kepada seorang Ulama yaitu H. Mohammad Dahlan, beliau menyambutnya dan memberikan saran agar dapat disediakan lahan secukupnya. Kemudian, Bapak H. Abdul Manan memenuhinya dengan menyediakan tanah seluas 50 Ha yang terletak di Desa Teluk Dalam Kecamatan Simpang Empat. Dari segi lokasi tanah tersebut cocok untuk mendirikan Pesantren karena jauh dari keramaian

Kota. Namun, dari segi transportasi dan tenaga pengajar yang harus didatangkan ke lokasi merupakan hal yang sulit, mengingat pada waktu itu sarana jalan belum selancar seperti saat ini, karenanya rencana tersebut akhirnya gagal.

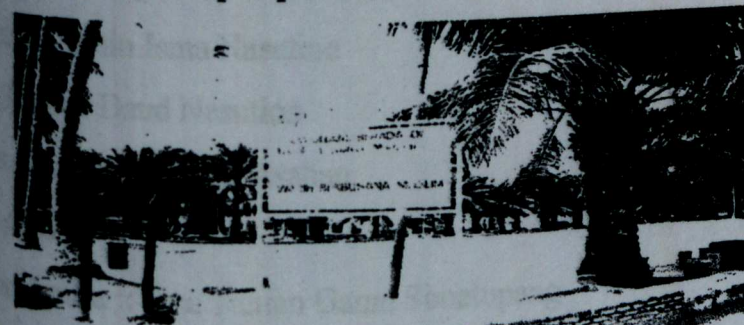
Namun demikian, tekad untuk mendirikan pesantren terus menggelora di hati Bapak H. Abdul Manan Simatupang sebagai baktinya selaku putra Asahan. Kemudian, hasrat tersebut beliau sampaikan lagi kepada Ulama lainnya di Asahan yaitu H. Muhammad Thahir Abdullah, beliau memberi apresiasi dan menyambut baik rencana yang mulia itu.

Singkat kata, akhirnya dengan adanya perluasan Kota Kisa ran menjadi Ibu Kota Kabupaten Asahan dimana Bapak H. Abdul Manan Simatupang yang pada waktu itu menjabat selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan telah dapat menyediakan tanah untuk tapak dan areal Pesantren Modern Daar Al Uluum seluas lebih kurang 6,4 Ha di Desa Sibogat Kecamatan Kisaran Barat.

Akhirnya pada Tanggal 6 Januari 1975 dimulai pendidikan PGA 6 Tahun dengan menampung murid di SD Inpres Mutiara Kisaran dan belajar pada waktu sore hari, karena pagi hari digunakan untuk belajar oleh SD yang bersangkutan. Sementara pengerjaan bangunan fisik ruang belajar Pesantren sedang dalam tahap pengerjaan, termasuk bangunan pendukung bagi sebuah Pesantren diantaranya yaitu pondok (asrama), rumah Kiyai/Guru,

Workshop, Musholla dan lain-lain. Pembangunannya sudah dimulai pada akhir Tahun 1974 dan selesai pada Tanggal 15 Februari 1975, yang terdiri dari 5 lokal belajar. Dengan demikian, para santri mulai dapat belajar pada pagi hari di gedung baru di kompleks Sibogat Kisaran. Selanjutnya, Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan-Kisaran bernaung dibawah sebuah yayasan yang bernama "Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan" sesuai dengan Akte Notaris Johan Palti Situmeang, SH di Medan pada Tanggal 10 Maret 1977, dimana duduk sebagai Ketua Yayasan adalah Bapak H. Abdul Manan Simatupang.

Pada Tanggal 16 Maret 1976 gedung Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Bapak Amir Mahmud, sekaligus menandatangani prasasti peresmian Pesantren, dan sejak saat itu ditetapkan bahwa semua santri baik putra maupun putri harus tinggal di asrama.



Gambar 1: Pesantren Daar Al Uluum tampak dari depan gerbang pintu masuk

Kemudian, pembangunan dilanjutkan dengan membangun sebuah mesjid bertingkat yang diberi nama mesjid "Al Hidayah", pada bagian atas tempat sholat dan bagian bawah dipergunakan untuk ruangan pertemuan dan kegiatan lainnya. Mesjid ini diresmikan oleh Menteri Agama RI Bapak H. Alamsyah Ratu Prawiranegara pada Tanggal 29 Desember 1978.

Setelah meninggal Almarhum H. Abdul Manan Simatupang diadakan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum (PMDU) Nomor 12, hari Jumat tanggal 21 Juli 1995 dihadapan Isly Burhanuddin Siregar, SH Notaris di Kisaran, dengan Susunan Kepengurusan Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan-Kisaran sebagai berikut :

I. Penasehat

1. H. Rihold Sihotang (Bupati Kepala Daerah Tk.II Asahan)
2. Ir. H. Amir Syarifuddin AF (ketua IPHI Kabupaten Asahan)
3. Drs. H. Muin Isma Nasution

4. H. Ruslan Daud Nasution

5. Majelis Ulama Tk. II Asahan

II. Pengurus

Ketua Umum : Drs. Taufan Gama Simatupang

Ketua : Drs. H. Ibrahim Gani

Sekretaris : Drs. H. A. Wahab Harahap

Bendahara : Drs. H. Zainul Arifin

Wakil : Drs. Kodri, M

Anggota

1. Dr. H. Yahdin Syahlan

2. Dr. Fathi Dahlan

3. Dr. H. Sulaiman Lubis

4. Ir. H. Nursuhadi

5. H. Ahmad Azhari

6. Hj. Zaleha SMHK

7. Drs. H. Syarkawi Sabar

8. Hj. Anna Sulmi

9. H. Syahbuddin Siregar

10. H. Zein Marpaung

11. Dr. H. Margono

12. Dr. H. Ramli AW

13. Hj. Khoiriyah Sujono Giatmo

14. Dr. Bahmid Muhammad

III. Komisaris

1. Hj. Fatimah Abdul Manan Simatupang

2. H. Armen Simatupang

3. Drs. H. Rudi Supriatna

4. Mayor Purnawirawan H. Muhammad Efendi Hasyim Nst

5. Drs. H. Alwan Rizal Simatupang

Sejak berdirinya hingga kini, Pesantren Modern Daar Al Uluum (PMDU) Asahan Kisaran terus mengalami perkembangan,

dan telah menghasilkan ribuan santri sebagai alumninya, baik dari tingkat Tsanawiyah (MTs) maupun Aliyah (MA). Diantara para alumni banyak yang telah berhasil dalam berbagai bidang sesuai dengan keahliannya masing-masing, diantaranya H. Fadly Nurzal (Ketua PPP) anggota DPRD Sumatera Utara, Dr. Umar Syadat Hasibuan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, H. Hasanuddin Sinaga Imam Mesjid Istiqlal Jakarta, H. Fakhruddin Sarumpaet Qari Internasional, Drs. H. Zainal Arifin Sinaga, MH Kepala Dinas di Pemkab Asahan, Dr. Supri A. Gani Dosen Perguruan Tinggi di Malaysia, Drs. Azwani Lubis, MA dan Ahmad Tamrin SK, MA Dosen IAIN Sumatera Utara, Al Ustad Drs. H. Taufik Lubis di Medan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mereka berada di berbagai daerah di Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Malaysia dan lain-lain.

Dari segi tingkatan pendidikan juga mengalami kemajuan. Saat ini Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Kisaran mengelola pendidikan mulai dari tingkat Raudhatul Athfal (RA), Taman Pembacaan Alquran (TPA), Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Madrasah Tsanawiyah, Aliyah dan Perguruan Tinggi yaitu Institut Agama Islam Daar Al Uluum (IAIDU). Jadi dapat dikatakan bahwa saat ini di Pesantren terdapat jenjang pendidikan yang lengkap, mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi Islam. Dengan

jumlah siswa/santri yang terus mengalami perkembangan. Sedangkan kurikulum yang digunakan yakni kurikulum yang berlaku di Kementerian Agama dengan penambahan dalam bidang tertentu disesuaikan dengan pola pendidikan Pesantren. Kurikulum mengajarkan pendidikan agama yang padat dan didampingi dengan pendidikan ketrampilan yang cukup. Kemudian, untuk pelajaran umum juga dipergunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sementara dari segi tenaga pengajar atau guru merupakan alumni dari berbagai Perguruan Tinggi baik yang berasal dari dalam negeri seperti alumni IAIN Sunan Kalijaga, IAIN Imam Bonjol, IAIN Sumatera Utara, IAIN Ar-Raniry Aceh, Gontor, maupun alumni dari luar negeri seperti Universitas Al Azhar Kairo, Universitas di India, Universitas Syria, dan Universitas Malaya Kuala Lumpur, dengan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari strata satu (S1) hingga Doktor (S3). Sementara dari segi sarana prasarana cukup lengkap dan sangat memadai, seperti gedung ruang belajar yang cukup representatif (lihat foto), asrama putra/putri, mesjid Al hidayah yang megah dan bertingkat dua, laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium bahasa, ruang komputer, poliklinik, aula, ruang makan putra/putri, perpustakaan, lapangan olahraga dan berbagai fasilitas pendukung, ruang workshop untuk berbagai keperluan dalam bidang

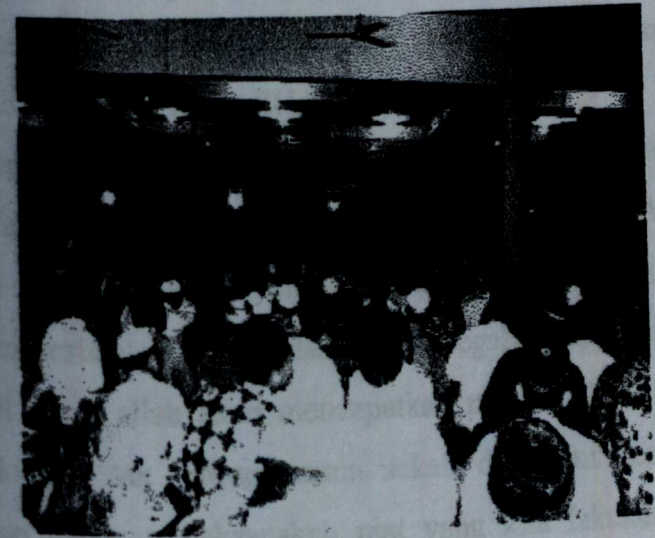
ketrampilan, dan berbagai kegiatan ekstra kurikuler seperti, pramuka, pencak silat, nasyid, kaligrafi dan lain sebagainya.



Gambar 2: Gedung Belajar di Pesantren Modern Daar Al Uluum

Pelaksanaan acara Haul ke 17 Pesantren Daar Uluum Kisaran Asahan berlangsung khidmad dibuka oleh Drs. H. Rudi Supriyatna, MM yang dilanjutkan dengan sholat Magrib bersama. Setelah acara sholat Magrib bersama terdengar Lantunan Takhtim dari H.Ramlan Siregar S.Ag yang diikuti para jemaah secara gegap gempita dikarenakan banyaknya undangan yang hadir pada acara Haul ke 17 Pesantren Daar Al Uluum Kisaran. Setelah lantunan takhtim terdengar Imam Tahlil KH. Alimuddin siregar memulai

tahlil yang diikuti oleh seluruh peserta yang hadir dan di tutup do'a yang di imami H.Salman abdullah Tanjung MA.



Gambar 3: Suasana Ketika Haul ke 17

Ketika hendak melaksanakan sholat Isya bersama dikarenakan pengunjung Haul Pesantren Daar Uluum ke 17 semakin banyak hadir dan ingin sholat berjemaah bersama di dalam masjid terlihat Bupati asahan Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP ikut mengatur barisan shaf yang paling belakang dan mengatakan : agak miring sikit ya Pak arah kiblatnya, sontak para jemaah yang bahagian belakang merasa berbahagia karena pada saat acara tersebut Bupati Asahan membaur dengan jemaah dan peduli pada jemaah yang paling belakang.

Setelah sholat Isya bersama acara Haul dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Alquran yang dibacakan oleh ; H.If darsyam Ritonga LC, dan dilanjutkan dengan ucapan terimakasih dari salah seorang keluarga yang ditahlilkan yang pada saat itu disampaikan oleh Mhd.salim Fauzi Lubis,SH,MM.

Para peserta hening dan Khidmad karena acara dilanjutkan dengan Taushiyah yang disampaikan oleh Drs.H.Yusuf Adi MM yang di dalam Taushiyahnya menyampaikan pentingnya melakukan sesuatu dengan Iklas dalam segala hal, Iklas dalam segala hal Insya allah akan mendapatkan rahmad dari allah swt yang terkadang tak terduga sama sekali diberikan kemudahan kemudahan dalam melaksanakan niat yang kita lakukan secara iklas. Dalam Tausyiah tersebut Drs.H.Yusuf Adi MM menekankan pentingnya silaturrahmi, karena dengan silaturrahmi akan mempercepat suksesnya niat yang kita punya dan dengan silaturrahmi bisa membuat awet muda. Dan sebagai akhir dari Taushiyahnya juga menyampaikan pentingnya berbuat baik terhadap orang tua (birrul walidain) adalah memberi kebaikan atau berkhidmat kepada keduanya serta mentaati perintahnya (kecuali yang ma'siat) dan mendoa'kannya apabila keduanya telah wafat.

Setelah Tausyiah Drs.H.Yusuf adi MM acara diakhiri dengan santap malam bersama yang kelihatan dari wajah para peserta Haul dan undangan sangat menikmati acara Haul dan

hidangan yang telah disediakan panitia. Pada saat santap makan bersama terlihat wakil Bupati asahan H.Surya, BSc menikmati santap malam bersama para ulama dan peserta HAUL ke 17. Acara berakhir pk1 22.00 Wib dan terlihat undangan Haul Peantren Daar Uluum Kisaran berangsur meninggalkan lapangan Pesantren, yang pada kesempatan itu terlihat Bupati Asahan memberikan salam ucapan terima kasih kepada undangan.

B. Profil Responden Penelitian

Responden penelitian terdiri dari 200 orang, 112 orang laki-laki dan 88 orang perempuan, seperti dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4
Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	112	56,0
2	Perempuan	88	44,0
	Jumlah	200	100,0

Responden penelitian ini adalah para siswa pondok pesantren yang berusia 16 tahun berjumlah 66 orang, berusia 17 tahun berjumlah 86 orang, dan yang berusia lebih dari 17 tahun berjumlah 48 seperti dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5

Usia Responden

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	16 tahun	66	33,0
2	17 tahun	86	43,0
3	Lebih 17 tahun	48	24,0
	Jumlah	200	100,0

Responden penelitian ini berasal dari empat pondok pesantren yang berada di Sumatera Utara, yaitu pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru 50 orang, pesantren Darul Ulum Kisaran 50 orang, pesantren Raudhatul Hasanah Medan 50 orang, dan pondok pesantren Muhammadiyah Kuala Madu 50 orang.

Tabel 6
Asal Pesantren

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Musthafawiyah Purba Baru	50	25,0
2	Darul Ulum Kisaran	50	25,0
3	Raudhatul Hasanah Medan	50	25,0
4	Muhammadiyah Kuala Madu	50	25,0
	Jumlah	200	100,0

Siswa/i yang dijadikan sebagai sampel penelitian berasal dari kelas X sebanyak 37 orang, dari kelas XI sebanyak 48 orang,

dan dari kelas XII sebanyak 115 orang seperti dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7
Kelas Siswa/i Yang Jadi Sampel

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	X	37	18,5
2	XI	48	24,0
3	XII	115	57,5
	Jumlah	200	100,0

Rangking siswa/i yang dijadikan sebagai sampel penelitian terdiri dari tiga besar 48 orang, lima besar 43 orang, sepuluh besar 91 orang, dan di atas 10 besar sebanyak 18 orang.

Tabel 8
Rangking Terakhir Siswa/i Yang Jadi Sampel

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tiga besar	48	24
2	Lima besar	43	21,5
3	Sepuluh besar	91	45,5
4	Di atas sepuluh besar	18	9,0
	Jumlah	200	100,0

Suku responden yang paling dominan adalah Jawa (35 %), Suku Batak 26,5 %, Mandailing 21,5 %, dan yang paling sedikit

adalah Minang 1 % dan Banten 3 %. Lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 9
Suku Responden

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Batak	53	26,5
2	Mandailing	43	21,5
3	Melayu	13	6,5
4	Jawa	70	35,0
5	Minang	2	1,0
6	Aceh	13	6,5
7	Banten	6	3,0
	Jumlah	200	100,0

Pekerjaan orangtua responden yang paling dominan adalah wiraswasta 39 %, kemudian Pegawai Negeri Sipil 27 % dan petani 20 %. Sedangkan yang paling sedikit buruh hanya 1 % dan TNI/Polri 3, seperti dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 10
Pekerjaan Orang Tua

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	PNS	54	27,0
2	TNI/Polri	6	3,0
3	Wiraswsta	78	39,0
4	Pegawai Swasta	20	10,0
5	Petani	40	20,0
6	Buruh	2	1,0
	Jumlah	200	100,0

C. Kecenderungan Orientasi Pilihan Santri Terhadap Organisasi Sosial Keagamaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (72,5 %) menyatakan bahwa mereka simpati terhadap organisasi sosial keagamaan. Namun mereka belum tentu menjadi anggota salah satu organisasi sosial keagamaan tersebut. Sedangkan 27,5 % lainnya tidak menunjukkan adanya rasa simpati terhadap organisasi sosial keagamaan.

Tabel 11
Simpati Terhadap Organisasi Sosial Keagamaan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Ya	145	72,5
2	Tidak	55	27,5
	Jumlah	200	100,0

Ketika ditanya organisasi sosial keagamaan yang responden simpati, sebanyak 38,5 % menyatakan Muhammadiyah, 23,5 % menyatakan NU, 12 % menyatakan Al Washliyah, dan 0,5 % menyatakan Al Ittihadiyah seperti dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 12
Organisasi Sosial Keagamaan Yang Responden Simpati

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	NU	47	23,5
2	Muhammadiyah	77	38,5

3	Al Washliyah	24	12
4	Al Ittihadiyah	1	0,5
5	Lain-lain	2	1,0
6	Tidak ada	49	24,5
	Jumlah	200	100,0

Hanya sebahagian kecil responden (34 %) yang menyatakan menjadi anggota atau pengurus organisasi sosial keagamaan. Sisanya, 66 % lainnya menyatakan tidak menjadi anggota apalagi pengurus salah satu organisasi sosial keagamaan.

Tabel 13
Menjadi Anggota atau Pengurus Organisasi Sosial keagamaan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Ya	68	34
2	Tidak	132	66
	Jumlah	200	100

Organisasi sosial keagamaan yang pernah diikuti adalah Muhammadiyah 27 %, NU 10,5 % dan Al Washliyah 10 %. Namun mereka sebahagian hanya simpatisan saja, tidak terdaftar resmi sebagai anggota.

Tabel 14
Organisasi Sosial Keagamaan Yang Diikuti

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	NU	21	10,5
2	Muhammadiyah	54	27,0

3	Al Washliyah	20	10,0
4	Al Ittihadiyah	1	0,5
5	Lain-lain	4	2,0
6	Tidak ada	100	50,0
	Jumlah	200	100,0

Mereka yang terlibat di dalam satu organisasi sosial keagamaan tersebut, lima orang diantaranya berperan sebagai ketua, termasuk ketua ranting atau cabang, dan kebanyakannya (27 orang) hanya sebagai anggota biasa.

Tabel 15
Keterlibatan di dalam Organisasi Sosial Keagamaan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Ketua	5	2,5
2	Koord Seksi	6	3,0
3	Seksi	18	9,0
4	Anggota Biasa	27	13,5
5	Tidak ada pilihan	144	72,0
	Jumlah	200	100,0

Pertimbangan utama responden ketika memilih organisasi sosial keagamaan adalah besarnya pengaruh organisasi tersebut terutama bagi luar organisasi (38 %), kemudian terkait dengan faham keagamaan organisasi tersebut (35 %).

Tabel 16
Pertimbangan Memilih Organisasi Sosial Keagamaan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Besarnya pengaruh suatu ormas	76	38,0
2	Fahamnya sejalan	70	35,0
3	Lain-lain	54	27,0
	Jumlah	200	100,0

Hal-hal yang menarik bagi responden terkait dengan organisasi sosial keagamaan adalah adanya kebersamaan 23,5 %, kegiatannya 13,3 % dan ketaatan anggota terhadap agama dan organisasi 13 %.

Tabel 17
Hal Yang Menarik dari Ormas yang Dipilih

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Kebersamaan	47	23,5
2	Kegiatannya	27	13,5
3	Ketegasan	8	4,0
4	Ketaatan	26	13,0
5	Tidak ada pilihan	92	46,0
	Jumlah	200	100,0

Manfaat paling utama bagi responden untuk mengikuti organisasi sosial keagamaan adalah adanya kesempatan bagi mereka untuk belajar berorganisasi (29, %). Kemudian pergaulan mereka semakin luas (18 %), dan meningkatkan rasa kebersamaan.

Tabel 18
Manfaat dari Ormas yang Dipilih

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Kebersamaan	10	5,0
2	Pergaulan semakin luas	36	18,0
3	Memahami organisasi	58	29,0
4	Tidak ada pilihan	96	48,0
	Jumlah	200	100,0

Responden juga mengaku bahwa mereka mendapatkan kepuasan tersendiri ketika mengikuti organisasi sosial keagamaan. Di antara kepuasan yang mereka sebut ialah puas karena faham terhadap organisasi (19,5 %), puas karena terbangunnya solidaritas (16 %), dan munculnya rasa kasih sayang terhadap teman.

Tabel 19
Kepuasan dari Ormas yang Dipilih

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Mendatangkan kasih sayang	14	7,0
2	Membangun solidaritas	14	7,0
3	Solidaritas	18	9,0
4	Paham terhadap organisasi	39	19,5
5	Tidak ada pilihan	115	57,5
	Jumlah	200	100,0

D. Kecenderungan Orientasi Pilihan Santri Terhadap Politik Pada Pemilu 2014

Mayoritas responden (54 %) menyatakan bahwa mereka simpati terhadap organisasi peserta pemilu. Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yang mereka simpati paling banyak adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 16 %, Demokrat 12,5 %, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 11,5 %, Nasional Demokrat (Nasdem) 10,5 % dan Golongan Karya (Golkar) 6 %. Kemudian ada sekitar 36 % yang menyatakan tidak ada pilihan. Keadaan yang demikian dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 20
Simpati Terhadap Organisasi Peserta Pemilu (OPP)

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Ya	108	54,0
2	Tidak	92	46,0
	Jumlah	200	100,0

Tabel 21
OPP Yang Paling Responden Simpati

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	PPP	23	11,5
2	PKS	32	16,0
3	Golkar	12	6,0
4	Demokrat	25	12,5
5	PDIP	6	3,0

6	PKB	0	0
7	Hanura	0	0
8	Gerindra	9	4,5
9	Nasdem	21	10,5
10	Tidak ada pilihan	72	36,0
	Jumlah	200	100,0

Mayoritas responden (68 %) menyatakan bahwa mereka tidak ada pilihan terhadap calon Gubernur Sumatera Utara priode mendatang. Namun sebahagian responden sudah menyatakan ada pilihan terhadap calon tertentu. Di antara calon yang akan mereka pilih ialah Gatot Pujo Nugroho (17,5 %), Taufan Gama (7,5 %) yang menjabat sebagai Bupati Asahan dan pengurus yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Kisaran, Abdillah (2,5 %), Rahutman (2 %), dan Samsul Arifin (1 %). Keadaan yang demikian dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 22
Calon Gubernur Yang Akan Responden Pilih

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Rahutman	4	2,0
2	Gatot Pujo Nugroho	35	17,5
3	Abdillah	5	2,5
4	Taufan Gama	15	7,5
5	Samsul Arifin	2	1,0
6	Tidak ada pilihan	136	68,0
	Jumlah	200	100,0

Mayoritas responden (56,5 %) belum menentukan calon Presiden Republik Indonesia mendatang yang akan mereka pilih. Namun sebahagian responden sudah menentukan calon Presiden Republik Indonesia mendatang yang akan dipilihnya. Di antara calon Presiden yang akan mereka pilih ialah Susilo Bambang Yudoyono (9,5 %), Hidayat Nur Wahid (6 %), Abu Rizal Bakri (5,5 %) dan beberapa calon lain seperti dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 23
Calon Presiden Yang Akan Dipilih Responden

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Surya Paloh	2	1,0
2	Yusuf Kalla	4	2,0
3	Ani Yudoyono	2	1,0
4	Amien Rais	7	3,5
5	Din Samsuddin	2	1,0
6	Hidayat Nur Wahid	12	6,0
7	Susilo Bambang Yudoyono	19	9,5
8	Abu Rizal Bakrie	11	5,5
9	Tifatul Sembiring	2	1,0
10	Habibi	4	2,0
11	Gamawan Fauzi	1	0,5
12	Prabowo Subianto	7	3,5
13	Surya Dharma Ali	2	1,0
14	Budiono	6	3,0
15	Wiranto	4	2,0

16	Edi Baskoro	2	1,0
17	Tidak ada pilihan	113	56,5
	Jumlah	200	100,0

Kriteria partai politik yang akan dipilih responden yang paling dominan adalah berasaskan Islam (82,5 %), kemudian bersifat kerakyatan (13,5 %) dan bersifat nasional (2 %). Keadaan yang demikian dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 24
Kriteria Partai Politik Yang Akan Dipilih Responden

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Berasaskan Islam	165	82,5
2	Bersifat nasional	4	2,0
3	Bersifat kerakyatan	27	13,5
4	Lain-lain	4	2,0
	Jumlah	200	100,0

Mayoritas responden (71,5 %) menyatakan akan ikut memilih pada pemilihan umum tahun 2014 mendatang. Hanya 7 % yang menyatakan tidak akan ikut memilih, dan 21,5 % lainnya belum menentukan jawaban seperti dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 25
Rencana Memilih Pada Pemilu 2014

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Ya	143	71,5
2	Tidak	14	7,0
3	Tidak menjawab	43	21,5
	Jumlah	200	100,0

Dari 14 responden yang menjawab tidak memilih alasan mereka beragam, diantaranya pada tahun 2014 usia mereka belum cukup menjadi pemilih. Selain itu mereka juga ada yang menyebutkan bahwa partai yang ada tidak ada yang benar-benar islami.

Ada perbedaan data antara partai yang menurut responden paling simpati dengan partai yang akan mereka pilih. Ada 21 responden yang simpati dengan PPP, tetapi yang akan memilihnya hanya 21 orang. Responden yang simpati dengan PKS ada 32 orang, tetapi yang akan memilihnya ada 38 orang. Perbedaan yang mencolok pada Partai Demokrat, responden yang simpati ada 25 orang, tetapi yang akan memilihnya mencapai 36 orang.

PAN banyak akan dipilih oleh para santri yang berasal dari Pesantren Muhammadiyah Kuala Madu. Hal ini karena meski PAN menyatakan sebagai partai nasional, tetapi faktanya PAN didirikan

dan banyak didukung oleh orang-orang yang berasal dari organisasi Muhammadiyah.

Calon pemilih PKS terbanyak (28 orang) berasal dari pesantren Raudhatul Hasanah. Calon pemilih Demokrat ada 16 orang dari Darul Ulum, 12 orang dari Raudhatul Hasanah dan 8 orang dari Muhammadiyah. Para santri dari Musthafawiyah 86% tidak memilih.

Sebanyak 19 % responden menyatakan akan memilih PKS pada pemilu mendatang, 18 % akan memilih demokrat, 12 % akan memilih PAN, 6 % akan memilih Golkar, dan 5,5 % akan memilih Gerindra. Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 26
OPP Yang Cenderung Akan Dipilih Pada Pemilu 2014

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	PPP	21	10,5
2	PKS	38	19,0
3	Golkar	12	6,0
4	Demokrat	36	18,0
5	PDIP	6	3,0
6	PKB	0	0
7	Hanura	0	0
8	Gerindra	11	5,5
9	Nasdem	2	1
10	PAN	24	12,0
11	Tidak ada pilihan	50	25,0
	Jumlah	200	100,0

Kriteria calon anggota DPR/DPD yang akan mereka pilih amat mengutamakan sifat kerakyatan calon (40 %), seaqidah (23,5 %) serta jujur dan adil (25,5 %) seperti dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 27
Kriteria Calon Anggota DPR/DPD Yang Akan Dipilih

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	47	23,5
2	Kerakyatan	80	40,0
3	Nasionalis	1	0,5
4	Jujur dan adil	51	25,5
5	Cerdas	6	3,0
6	Tidak memilih	15	7,5
	Jumlah	200	100,0

Kriteria calon gubernur yang akan dipilih responden lebih dominan adalah bersifat jujur dan adil (36,5 %), bersifat kerakyatan (31,5 %), dan seaqidah (25,5 %). Lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 28
Kriteria Calon Gubernur Yang Akan Dipilih Responden

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	51	25,5
2	Kerakyatan	63	31,5
3	Nasionalis	0	0
4	Jujur dan adil	73	36,5

5	Cerdas	2	1,0
6	Tidak memilih	11	5,5
	Jumlah	200	100,0

Kriteria calon presiden yang akan dipilih responden nampaknya juga senada dengan kriteria calon gubernur yang akan dipilih responden. Kriteria yang dominan yaitu jujur dan adil 40,5 %, kerakyatan 30,5 % dan Islam atau seaqidah 21,5 % seperti dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 29
Kriteria Calon Presiden Yang Akan Dipilih

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	43	21,5
2	Kerakyatan	61	30,5
3	Nasionalis	5	2,5
4	Jujur dan adil	81	40,5
5	Anti Korupsi	4	2,0
6	Tidak memilih	6	3,0
	Jumlah	200	100,0

Ada data yang sangat menarik pada tabel di atas, yaitu ternyata sebagian besar responden hingga mencapai 40,5% responden menginginkan presiden yang jujur dan adil. Kriteria ini jauh melebihi kriteria kesamaan agama. Artinya responden menilai bahwa presiden beragama Islam itu penting, tetapi lebih penting lagi bahwa presiden itu harus jujur dan adil

Sebagian besar responden belum dapat melihat apa sebenarnya yang menarik bagi mereka dari parpol peserta pemilu. Namun setidaknya ada sepertiga responden mereka tertarik pada parpol tertentu karena dinilai islami.

Tabel 30
Hal yang menarik dari Parpol yang akan dipilih

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Bersifat sosial	18	9,0
2	Bersifat Rasional	7	3,5
3	Islami	65	37,5
4	Besarnya Parpol	12	6,0
5	Tidak menjawab	98	49,0
	Jumlah	200	100,0

Ada 50% responden yang tidak memberikan jawaban tentang hal yang menarik dari para calon gubernur. Sikap ini seiring dengan sikap mereka (68%) yang menyatakan tidak memiliki calon gubernur yang ideal menurut mereka.

Tabel 31
Hal yang menarik dari calon Gubernur yang akan dipilih

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pemurah	16	8,0
2	Adil	24	12,0
3	Kaya	2	1,0
4	Cerdas	21	10,5
5	Penampilan	11	5,5

6	Taat	26	13,0
7	Tidak menjawab	100	50,0
	Jumlah	200	100,0

Ada beberapa hal yang menarik bagi responden untuk memilih calon Presiden seperti adil, program jelas, pemurah dan taat beribadah. Namun sebahagian responden (48,5 %) tidak menjawab.

Tabel 32

Hal yang menarik dari calon Presiden yang akan dipilih

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pemurah	20	10,0
2	Adil	29	14,5
3	Kaya	2	1,0
4	Muda	5	2,5
5	Program jelas	25	12,5
6	Taat	15	7,5
7	Penglamn	7	3,5
8	Tidak menjawab	97	48,5
	Jumlah	200	100,0

Mayoritas responden (57 %) tidak menjawab ketika ditanya manfaat yang akan didapat dari parpol yang akan dipilih. Namun sebahagian menjawab bahwa manfaat yang akan didapat dari parpol yang akan dipilih ialah bangsa menjadi maju, rakyat sejahtera, mendapatkan keadilan, faham berpolitik dan menjalin

silaturahmi. Manfaat yang sama juga mereka dapatkan ketika memilih gubernur dan Presiden.

Tabel 33

Manfaat yang akan didapat dari parpol yang akan dipilih

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Bangsa menjadi maju	26	13,0
2	Rakyat jadi sejahtera	26	13,0
3	Paham berpolitik	11	5,5
4	Mendapatkan keadilan	15	7,5
5	Menjalin silaturahmi	8	4,0
6	Tidak menjawab	114	57,0
	Jumlah	200	100,0

Tabel 34

Manfaat yang akan didapat dari calon Gubernur yang akan dipilih

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Bangsa menjadi maju	64	32,0
2	Rakyat jadi sejahtera	8	4,0
3	Paham berpolitik	4	2,0
4	Mendapatkan keadilan	14	7,0
5	Tidak menjawab	110	55,0
	Jumlah	200	100,0

Tabel 35

Manfaat yang akan didapat dari calon Presiden yang akan dipilih

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Bangsa menjadi maju	65	32,5

2	Rakyat jadi sejahtera	4	2,0
3	Paham berpolitik	14	7,0
4	Mendapatkan keadilan	2	1,0
5	Tidak menjawab	115	57,5
	Jumlah	200	100,0

Sebahagian besar responden tidak dapat menunjukkan kepuasan tertentu ketika memilih Parpol, gubernur dan Presiden. Tetapi sebahagian mengatakan bahwa kepuasan yang mereka peroleh ialah rakyat menjadi sejahtera dan tersalur aspirasi mereka.

Tabel 36
Kepuasan Memilih Parpol

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Rakyat lebih sejahtera	58	29,0
2	Tersalur aspirasi	14	7,0
3	Tidak menjawab	128	64,0
	Jumlah	200	100,0

Tabel 37
Kepuasan Memilih Gubernur/Presiden

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Rakyat lebih sejahtera	74	37,0
2	Tersalur aspirasi	10	5,0
3	Tidak menjawab	116	58,0
	Jumlah	200	100,0

E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Orientasi Pilihan Santri

Dalam penelitian ini responden diminta untuk memberikan jawaban tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan mereka untuk memilih organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik dan gubernur serta Presiden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan responden untuk memilih organisasi sosial kemasyarakatan yang paling utama adalah media massa seperti TV, surat kabar dan radio (28 %), kemudian komunikasi interpersonal dengan teman dan orang lain (22,5 %), pimpinan atau guru di pesantren (14 %), dan hasil diskusi kelompok (8 %). Keadaan yang demikian dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 38.
Faktor Utama Yang Mempengaruhi Kecenderungan Responden Memilih Ormas

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Hasil pembicaraan pribadi dengan teman atau orang lain	45	22,5
2	Hasil diskusi	16	8,0
3	Melalui media massa seperti tv, koran, radio dsb	56	28,0
4	Pimpinan/guru di pesantren	28	14,0
5	Lain-lain	55	27,5
	Jumlah	200	100,0

Hal senada juga terjadi pada faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan responden untuk memilih partai politik, dimana faktor yang paling utama tetap media massa (30 %), kemudian faktor komunikasi antarperibadi dengan teman dan orang lain (23,5 %), pimpinan atau guru di pesantren dan diskusi dengan orang lain masing-masing 9,5 %. Responden lainnya (27,5 %) tidak memberikan jawaban.

Tabel 39
Faktor Utama Yang Mempengaruhi Kecenderungan
Responden Memilih Parpol

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Hasil pembicaraan pribadi dengan teman atau orang lain	47	23,5
2	Hasil diskusi	19	9,5
3	Melalui media massa seperti tv, koran, radio dsb	60	30,0
4	Pimpinan/guru di pesantren	19	9,5
5	Lain-lain	55	27,5
	Jumlah	200	100,0

Faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan responden untuk memilih gubernur dan Presiden adalah komunikasi antarperibadi dengan teman atau orang lain (31 %), kemudian pengaruh media massa (27 %), pengaruh pimpinan atau guru di pesantren (8 %) dan hasil diskusi dengan orang lain (5,5 %). Hal yang demikian dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 40
Faktor Utama Yang Mempengaruhi Kecenderungan Responden
Memilih Gubernur/Presiden

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Hasil pembicaraan pribadi dengan teman atau orang lain	62	31,0
2	Hasil diskusi	11	5,5
3	Melalui media massa seperti tv, koran, radio dsb	54	27,0
4	Pimpinan/guru di pesantren	16	8,0
5	Lain-lain	57	27,5
	Jumlah	200	100,0

F. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walau pun mayoritas responden (72,5 %) menyatakan simpati terhadap organisasi sosial keagamaan, mereka bukan berarti menjadi anggota salah satu organisasi sosial keagamaan tersebut. Sebahagian mereka hanya sebagai simpatisan saja. Organisasi sosial keagamaan yang besar seperti Muhammadiyah, NU dan Al Washliyah disebut sebagai organisasi sosial keagamaan yang mereka simpati. Namun ternyata hanya sebahagian kecil saja (34 %) yang menyatakan menjadi anggota atau pengurus organisasi sosial keagamaan. Sisanya (66

%) tidak menjadi anggota apalagi pengurus salah satu organisasi sosial keagamaan.

Besarnya pengaruh organisasi tersebut terutama bagi luar organisasi, menjadi pertimbangan utama bagi responden ketika memilih organisasi sosial keagamaan. Selain itu, pertimbangan yang menonjol lainnya adalah terkait dengan faham keagamaan organisasi dimaksud. Hal-hal yang menarik bagi responden terkait dengan organisasi sosial keagamaan adalah adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik antar sesama anggota, kemudian kegiatan-kegiatan organisasi dan ketaatan anggota terhadap agama dan organisasi.

Manfaat paling utama bagi responden untuk mengikuti organisasi sosial keagamaan adalah adanya kesempatan bagi mereka untuk belajar berorganisasi. Kemudian menambah pergaulan, dan meningkatkan rasa kebersamaan. Responden juga mengaku bahwa mereka mendapatkan kepuasan tersendiri ketika mengikuti organisasi sosial keagamaan, termasuk perasaan puas karena faham terhadap organisasi dan terbangunnya solidaritas atau rasa kesetia kawan terhadap sesama anggota.

Mayoritas responden juga menyatakan bahwa mereka simpati terhadap organisasi peserta pemilu, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nasional Demokrat (Nasdem) dan Golongan Karya (Golkar). Dua

organisasi partai politik (PKS dan PPP) yang dipandang lebih religius merupakan yang paling banyak mendapat simpati dari responden. Kriteria partai politik yang akan dipilih responden yang paling dominan adalah berasaskan Islam, kemudian bersifat kerakyatan dan bersifat nasional.

Mayoritas responden menyatakan akan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum tahun 2014 mendatang. Sebagian responden sudah menyatakan ada pilihan terhadap calon gubernur tertentu. Di antara calon yang akan mereka pilih ialah Gatot Pujo Nugroho, Taufan Gama (Bupati Asahan dan pengurus yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Kisaran), Abdillah, Rahutman, dan Samsul Arifin. Demikian juga tentang calon Presiden priode mendatang, sebagian responden menyatakan sudah punya pilihan. Di antara calon presiden yang mereka sebut untuk mereka pilih ialah Susilo Bambang Yudoyono (9,5 %), Hidayat Nur Wahid (6 %), dan Abu Rizal Bakri (5,5 %).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan data antara partai yang menurut reponden paling simpati dengan partai yang akan mereka pilih. Ada 21 responden yang simpati dengan PPP, tetapi yang akan memilihnya hanya 21 orang. Responden yang simpati dengan PKS ada 32 orang, tetapi yang akan memilihnya ada 38 orang. Perbedaan yang mencolok pada Partai Demokrat, responden yang simpati ada 25 orang, tetapi yang akan

memilihnya mencapai 36 orang. Dengan demikian perasaan simpati terhadap partai politik tertentu tidak otomatis menjadi pilihan mereka. Sebab banyak faktor-faktor politis lainnya yang dapat mempengaruhi santri ketika memberikan hak suaranya.

PAN banyak akan dipilih oleh para santri yang berasal dari Pesantren Muhammadiyah Kuala Madu. Hal ini karena meski PAN menyatakan sebagai partai nasional, tetapi faktanya PAN didirikan dan banyak didukung oleh orang-orang yang berasal dari organisasi Muhammadiyah.

Calon pemilih PKS terbanyak (28 orang) berasal dari pesantren Raudhatul Hasanah. Calon pemilih Demokrat ada 16 orang dari Darul Ulum, 12 orang dari Raudhatul Hasanah dan 8 orang dari Muhammadiyah. Para santri dari Musthafawiyah 86% tidak memilih.

Tiga kriteria calon anggota DPR/DPD yang paling penting dan menjadi pilihan responden pada pemilu mendatang, yaitu bersifat kerakyatan, beragama Islam, serta jujur dan adil. Kriteria yang sama juga berlaku bagi calon gubernur yang akan mereka pilih. Demikian juga kriteria calon presiden yang akan dipilih responden nampaknya juga senada dengan kriteria calon gubernur yang akan dipilih responden.

Satu hal yang menarik adalah ternyata sebagian besar responden hingga mencapai 40,5% menginginkan presiden yang

jujur dan adil. Kriteria ini jauh melebihi kriteria kesamaan agama. Artinya responden menilai bahwa presiden beragama Islam itu penting, tetapi lebih penting lagi bahwa presiden itu harus jujur dan adil.

Sebagian besar responden belum dapat melihat apa sebenarnya yang menarik bagi mereka dari parpol peserta pemilu. Namun setidaknya ada sepertiga responden mereka tertarik pada parpol tertentu karena dinilai islami.

Manfaat yang mereka dapat dari parpol yang akan dipilih ialah bangsa menjadi maju, rakyat sejahtera, mendapatkan keadilan, faham berpolitik dan menjalin silaturahmi. Manfaat yang sama juga mereka dapatkan ketika memilih gubernur dan Presiden.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan responden untuk memilih organisasi sosial kemasyarakatan dan partai politik yang paling utama adalah media massa seperti TV, surat kabar dan radio. Pengaruh media massa untuk menentukan pilihan santri lebih dominan dibandingkan dengan faktor lainnya. Kemudian faktor komunikasi interpersonal dengan teman dan orang lain juga mempunyai peranan penting. Demikian juga faktor pengaruh pimpinan atau guru mereka di pesantren.

Faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan responden untuk memilih gubernur dan Presiden adalah komunikasi antarperibadi dengan teman atau orang lain, kemudian

pengaruh media massa, pengaruh pimpinan atau guru di pesantren dan hasil diskusi dengan orang lain. Dengan demikian ada sedikit perbedaan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan santri memilih organisasi sosial keagamaan dan partai politik dengan memilih gubernur dan Presiden. Dimana memilih gubernur dan Presiden ini lebih besar pengaruh komunikasi antarperibadi dibandingkan dengan pengaruh media komunikasi massa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada umumnya santri pondok pesantren tidak menjadi anggota atau pengurus organisasi sosial kemasyarakatan, mereka hanya sebagai simpatisan saja. Organisasi sosial keagamaan yang besar seperti Muhammadiyah, NU dan Al Washliyah disebut sebagai organisasi sosial keagamaan yang mereka simpati. Besarnya pengaruh organisasi tersebut terutama bagi luar organisasi, menjadi pertimbangan utama bagi responden ketika memilih organisasi sosial keagamaan. Selain itu, pertimbangan yang menonjol lainnya adalah terkait dengan faham keagamaan organisasi dimaksud. Hal-hal yang menarik bagi responden terkait dengan organisasi sosial keagamaan adalah adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik antar sesama anggota, kemudian kegiatan-kegiatan organisasi dan ketaatan anggota terhadap agama dan organisasi. Manfaat paling utama bagi responden untuk mengikuti organisasi sosial keagamaan adalah adanya kesempatan bagi mereka

untuk belajar berorganisasi. Kemudian menambah pergaulan, dan meningkatkan rasa kebersamaan.

2. Kecenderungan orientasi pilihan santri terhadap partai politik menunjukkan bahwa mayoritas mereka simpati terhadap organisasi peserta pemilu, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nasional Demokrat (Nasdem) dan Golongan Karya (Golkar). Dua organisasi partai politik (PKS dan PPP) yang dipandang lebih religius merupakan yang paling banyak mendapat simpati dari responden. Kriteria partai politik yang akan dipilih responden yang paling dominan adalah berasaskan Islam, kemudian bersifat kerakyatan dan bersifat nasional. Mayoritas santri juga menyatakan akan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum tahun 2014 mendatang. Sebahagian responden sudah menyatakan ada pilihan terhadap calon gubernur tertentu. Demikian juga tentang calon Presiden priode mendatang, sebahagian responden menyatakan sudah punya pilihan. Tiga kriteria calon anggota DPR/DPD yang paling penting dan menjadi pilihan santri pada pemilu mendatang, yaitu bersifat kerakyatan, beragama Islam, serta jujur dan adil. Kriteria yang sama juga berlaku bagi calon gubernur yang akan mereka pilih. Demikian juga kriteria calon presiden yang

akan dipilih santri nampaknya juga senada dengan kriteria calon gubernur yang akan dipilih. Manfaat yang mereka dapat dari parpol yang akan dipilih ialah bangsa menjadi maju, rakyat sejahtera, mendapatkan keadilan, faham berpolitik dan menjalin silaturahmi. Manfaat yang sama juga mereka dapatkan ketika memilih gubernur dan Presiden.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi orientasi pilihan santri terhadap organisasi sosial keagamaan dan organisasi partai politik yang paling utama adalah pengaruh media massa seperti televisi, surat kabar dan radio, kemudian komunikasi antarperibadi dan pimpinan atau guru pondok pesantren. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi orientasi pilihan santri terhadap gubernur dan Presiden yang lebih dominan adalah komunikasi antarperibadi, baru kemudian media massa, pimpinan atau guru di pondok pesantren dan melalui diskusi kelompok.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada pihak pengelola pondok pesantren agar tetap memelihara kemurnian orientasi pilihan politik para santri. Karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan orientasi pilihan santri terhadap organisasi

sosial keagamaan, partai politik, dan calon gubernur dan Presiden nampaknya masih murni dan objektif.

2. Disarankan kepada santri agar tetap mempertahankan objektivitas dan idealisme serta mengutamakan suara hati nurani dalam memilih organisasi sosial keagamaan, organisasi partai politik, dalam memilih DPR, gubernur dan Presiden.

DAFTAR BACAAN

- Afan Gaffar, *Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegomonic Party System*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Amroeni Dradjat (editor), *Komunikasi Islam dan Tantangan Modernitas, Sebentuk Komunikasi Apresiatif bagi Prof.Dr.H.Syukur Kholil, MA atas Pengukuhanannya sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Komunikasi* (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2008).
- Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, terj. Lukman Hakim, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*, (bandung : Remaja Rosdakarya, 2005).
- Dean Jaros et.al, *Political Behavior, Choices and Perspectives* (New York : St.Martin's Press, 1974).
- Gerald Pomper, *Voter's Choice: Varieties of American Electoral behavior* (New York :Dod, Mead Company, 1978).
- J. Kristiadi, "Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia", dalam Prisma, 3, Maret 1996.
- Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memili 1955-2004*, (Surabaya : Pustaka Eureka, 2006).
- M. Ridha Taqwa, "Perilaku Politik Umat Islam: Kasus di Lekkong, Enrekang, 1971-1992", dalam Prisma, 3, 1996..
- Robert.S.Woodworth & Marquis D.G (1977), *Psychology*, New York : Henri Holt and Co

- R Robert.S.Woodworth (1986), *Contemporary Schools of Psychology*, London : Methueen & Co.KTD.
- Saodah Wok, dkk, *Teori-teori Komunikasi* (Kuala Lumpur : Percetakan Cergas Sdn.Bhd, 2004).
- Sastrapratedja (ed.), *Manusia Multi Dimensional: Sebuah Remungan Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- Bruinessen, Martin van. *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Fathoni AF, Farid. *Kelahiran Yang Dipersoalkan*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.
- Harun, Yahya. *Sejarah Masuknya Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1995.
- Ismail, Faisal. *Ketegangan Kreatif Peradaban Islam*. Jakarta: Bakti Asara Persada, 2003.
- Jainuri. *Muhammadiyah Gerak Reformasi Islam Di Jawa Pada Awal Abad Kedua Puluhan*. Surabaya: Bina Ilmu, 1981.
- Khitthah Nahdlatul Ulama, Hasil Keputusan Mukhtamar Ke-27 NU di Situbondo, 12 Desember 1984.
- Kurzman, Charles (ed.). *Modernist Islam 1840-1940: A Sourcebook*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Kusumo, Hadi. *Aliran Pembaharuan Islam*. Yogyakarta: Penerbit Persatuan, t.t.
- Lubis, Arbiyah. *Pemikiran Muhammadiyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Lubis, Saiful Akhyar (Ed.). *Peran Moderasi Al-Washliyah*. Medan: UNIVA PRESS, 2008.

Maryadi & Aly, Abdullah (ed.). *Muhammadiyah Dalam Kritik*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2000.

Pengurus Besar Al Djamijatul Washlijah. *Peringatan: ¼ Abad (30 Nop. 1930 – 30 Nop. 1955) Al Djamijatul Washlijah*. Medan: PB Al Djamijatul Washlijah, 1956.

Tim Penyusun. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Vongrenebaun, G.E. *Islam Kesatuan Dalam Keagamaa*. Jakarta: Yayasan Obor, 1983.

Zada, Khamami & Sjadzili, A. Fawaid (ed.). *Nahdhatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.

Internet, majalah, dan lain-lain:

Elhany, Hemlan. "Karakteristik Dakwah NU dan Muhammadiyah Dalam Pengembangan Masyarakat Islam Lampung" dalam *Jurnal TAPIS* Vol. 7 No. 01 Januari 2007.

<http://pcnucilacap.com/khitthah-nahdlatul-ulama-nu>, diakses

tanggal 12 Desember 2011.

<http://pcnucilacap.com/risalah-aswaja-syeikh-hasyim-asyari-bagian-3/>, diakses tanggal 12 Desember 2011.

<http://www.al-washliyah.com/about/sejarah>

Helmut Norpoth, *President and the Prospective Voter*, dalam jurnal *The Journal of Politics*, Vol. 56, No. 3. 1996.

Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955 - 2004*,
Surabaya, Pustaka Eureka, 2006

KEMENTERIAN AGAMA
KURATILAH KEMENTERIAN AGAMA

Yang terhormat Bapak/Ibu

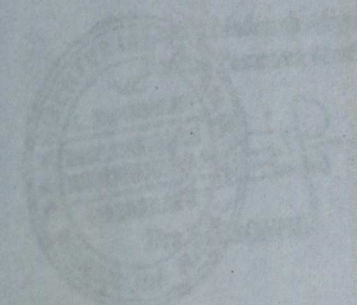
Kepada Yth. Bapak/Ibu
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah
Kantor : Kantor Wilayah
Kantor : Kantor Wilayah

Yang terhormat Bapak/Ibu

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah
Kantor : Kantor Wilayah
Kantor : Kantor Wilayah

Sehubungan dengan surat nomor 100/1000/2006 tanggal 10 Mei 2006 dari Bapak/Ibu tentang permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Kantor Wilayah, dengan ini saya sampaikan bahwa permohonan tersebut telah diterima dan sedang dalam proses pemeriksaan. Apabila diperlukan, akan saya sampaikan informasi lebih lanjut kepada Bapak/Ibu.

Atas perhatian dan kerjasamanya,
saya ucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH MUSTHAFAWIYAH PURBA BARU
JL. LINTAS SUMATERA DESA PURBABARU KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI Kode Pos 22952

SURAT KETERANGAN
Nomor : 810/MA.M/XII/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Musonnif
Jabatan : Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren
Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal
Sumatera Utara

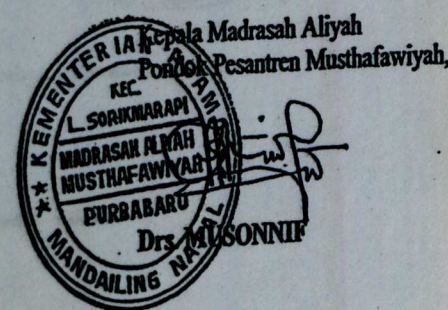
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hasnun Jauhari Ritonga
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Dosen IAIN Sumatera Utara

Benar telah mengambil data penelitian yang berjudul: *Kecenderungan Orientasi Pilihan Santri Terhadap Organisasi dan Politik pada Pemilu 2014 di Sumatera Utara* sesuai dengan surat tugas Ketua Lembaga Penelitian IAIN-SU No. In.07/Lemlit/Kp.01/15/2011 di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal Sumatera Utara, pada tanggal 22 dan 23 Desember 2011.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 22 Desember 2011





**PESANTREN MODERN DAAR AL ULUUM
ASAHAN – KISARAN**

JALAN MAHONI (SIBOGAT) TELP. (0623) 41952 KISARAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Nomor : 629 / DIR – PMDU / AS / 2011

Direktur Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan – Kisaran dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD THAMRIN SIKUMBANG
Pekerjaan : Dosen IAIN Sumatera Utara.

Telah melaksanakan tugas Riset di Pondok Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan – Kisaran pada tanggal 26 Desember 2011.

Kami telah memberikan Informasi tentang keberadaan Pondok Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan – Kisaran dan data yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penelitian tentang: "KECENDRONGAN ORIENTASI PILIHAN SANTRI TERHADAP ORGANISASI DAN POLITIK PADA PEMILU 2014 SUMATERA UTARA"

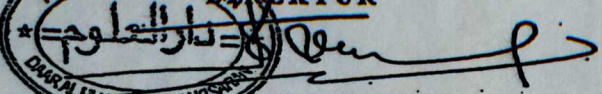
Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagai bukti pemenuhan terhadap surat dari Kementerian Agama Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Lembaga Penelitian dengan nomor : In.07/Lemlit/Kp.01/ /2011, tanggal 15 Desember 2011.

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

01 Shafar 1433 H

Kisaran, _____
26 Desember 2011 M

PESANTREN MODERN DAAR AL ULUUM
ASAHAN – KISARAN
DIREKTUR


BAN NASUTION, S.Pd.I

Tembusan :

- Buva Ketua Umum Yayasan PMDU Asahan – Kisaran.
- Arsip

Kantor Direktur Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan – Kisaran

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

VOLUME 12, PART 1, 1902

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
VOLUME 12, PART 1, 1902
CONTENTS
PAGES
THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
VOLUME 12, PART 1, 1902
CONTENTS
PAGES
THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
VOLUME 12, PART 1, 1902
CONTENTS
PAGES

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
VOLUME 12, PART 1, 1902
CONTENTS
PAGES

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
VOLUME 12, PART 1, 1902
CONTENTS
PAGES

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
VOLUME 12, PART 1, 1902
CONTENTS
PAGES

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
VOLUME 12, PART 1, 1902
CONTENTS
PAGES

